



**WALI KOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH**

PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 – 2026

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SUBULUSSALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kota Subulussalam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Subulussalam tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2023 - 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);

4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
9. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
19. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
20. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
21. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data

7

Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
23. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014 - 2034. (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 3);
24. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);
25. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 1);
26. Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2021 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUBULUSSALAM TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Subulussalam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Subulussalam.
4. Peraturan Wali Kota adalah Peraturan Wali Kota Subulussalam.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Subulussalam.

4

6. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.
7. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026.
8. Rencana Aksi Tahunan, selanjutnya disingkat RAT adalah dokumen penjabaran dari RPKD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah Kegiatan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
11. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan penanggulangan kemiskinan di Kota Subulussalam.
12. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem atau yang selanjutnya disingkat Data P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam dokumen elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil).
13. Desil adalah pengelompokan kesejahteraan rumah tangga ke dalam 10 (sepuluh) kelompok yang menunjukkan tingkat kesejahteraan rumah tangga.

BAB II
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
Pasal 2

RPKD Kota Subulussalam merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam upaya penanggulangan kemiskinan tahun 2023-2026, yang memuat rencana kebijakan pembangunan daerah berupa strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 3

- 1) RPKD Kota Subulussalam disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kondisi Umum Daerah
 - c. BAB III : Profil Kemiskinan Daerah
 - d. BAB IV : Prioritas Program
 - e. BAB V : Lokasi Prioritas
 - f. BAB VI : Penutup
- 2) RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Dalam penyusunannya, RPKD Kota Subulussalam menggunakan Data BPS dan Data P3KE sebagai data sasaran penanggulangan kemiskinan berbasis lokus prioritas kemiskinan ekstrem.

Pasal 5

RPKD Kota Subulussalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman bagi perangkat daerah, perusahaan dalam forum TJSPL dan mitra pembangunan lainnya dalam menyusun rencana kerja dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Subulussalam.

Pasal 6

- 1) Sebagai penjabaran dari prioritas program penanggulangan kemiskinan tahun 2023-2026, maka TKPK perlu menyusun RAT
- 2) RAT sekurang-kurangnya berisikan:
 - a. hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - b. kebijakan dan strategi tahun berjalan;
 - c. matriks target keberhasilan; dan
 - d. lokasi prioritas.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 7

- 1) Pemerintah Kota melalui TKPK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
- 2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 8



Pendanaan bagi pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9



Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di : Subulussalam
pada tanggal : 26 Juni 2023M
7 Dzulhijjah 1444H


WALI KOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di : Subulussalam
pada tanggal : 26 Juni 2023M
7 Dzulhijjah 1444H


SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

TAUFIT HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2023 NOMOR: 20



RPKD

KOTA SUBULUSSALAM

RENCANA
PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
DAERAH 2023-2026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2022

SAMBUTAN WALIKOTA

Segala puja dan puji serta syukur Ke hadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Subulussalam Tahun 2023-2026 dapat berjalan lancar dan diselesaikan sesuai dengan rencana.

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi, sehingga dalam penanggulangannya tidak bisa dilakukan secara parsial melainkan diperlukan upaya-upaya penanggulangan yang terukur, sistematis dan terencana. Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan Kota Subulussalam. Pada tahun 2021, capaian angka kemiskinan di Kota Subulussalam masih berada bawah angka kemiskinan Provinsi dan Nasional. Meskipun demikian, tren persentase kemiskinan di Kota Subulussalam mengalami perbaikan dan penurunan.

Dengan hadirnya dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ini, bisa menjadi panduan dan menjadi dasar perencanaan dan penganggaran penanggulangan kemiskinan di Kota Subulussalam. Selain itu, keterlibatan dan kolaborasi dari multi sektor dan multi aktor juga sangat diperlukan dalam penanggulangan kemiskinan di Kota Subulussalam, sehingga upaya-upaya yang dilakukan mampu secara efektif memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dan memberikan kontribusinya dalam penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Subulussalam 2023-2026. Semoga dokumen ini bermanfaat sebagai bahan dasar perencanaan dan penganggaran pembangunan Subulussalam yang lebih berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Subulussalam, Juni 2023

WALIKOTA SUBULUSSALAM

H. AFFAN ALFIAN, SE

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Ke hadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Kuasa atas curahan Nikmat dan Hidayah-Nya, maka penyusunan dokumen "Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Subulussalam Tahun 2020-2024" telah selesai dilakukan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Subulussalam.

Niatan Pemerintah Kota Subulussalam dalam menyusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ini, sebagai salah satu langkah percepatan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Sehingga penanganan dan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara holistik, komprehensif serta berdasarkan data by name by address yang valid dan update. Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Subulussalam diharapkan peran aktif dari berbagai unsur baik itu pemerintah, masyarakat umum, swasta, dan lain-lain.

Perumusan dokumen RPKD memuat dan menguraikan secara utuh dan rinci tentang penanganan masalah kemiskinan, mulai dari identifikasi masalah pada setiap bidang, identifikasi akar masalah dan identifikasi prioritas program dan prioritas wilayah. Selanjutnya Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ini menjadi acuan dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Subulussalam.

Subulussalam, Juni 2023

KEPALA BAPPEDA

MHD. ALI TUMANGGER, S.STP, M.Sc

DAFTAR ISI

SAMBUTAN WALIKOTA.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	6
BAB II KONDISI UMUM DAERAH.....	9
2.1. Geografi Kota Subulussalam	9
2.2. Demografi Kota Subulussalam	15
2.3. Akses Pelayanan Publik	17
2.4. Informasi Sosial Budaya Kota Subulussalam.....	19
2.5. Pertumbuhan Ekonomi	20
2.6. Capaian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Subulussalam	29
BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH.....	30
3.1. Indikator Kemiskinan Ekonomi/Konsumsi	30
3.2. Analisis Karakteristik Masalah Ketenagakerjaan	42
3.3. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Kesehatan	46
3.4. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Pendidikan.....	52
3.5. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar	62
3.6. Analisis Karakteristik Masalah Ketahanan Pangan.....	68
3.7. Analisis Karakteristik Masalah Perlindungan Sosial.....	70
3.8. Analisis Karakteristik Masalah Pertanian dan Perkebunan.....	70
3.9. Analisis Karakteristik Masalah Kelautan dan Perikanan	71
3.10. Analisis Karakteristik Masalah Strategis lainnya	72
3.11. Analisis Karakteristik Masalah Pembangunan Desa.....	73
BAB IV PRIORITAS PROGRAM	74
4.1. Prioritas Program atau Teori Perubahan.....	74

4.2. Strategi, Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan	94
BAB V LOKASI PROGRAM	112
5.1. Prioritas Wilayah Bidang Kemiskinan	112
5.2. Prioritas Wilayah Bidang Ketenagakerjaan	113
5.3. Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan	114
5.4. Prioritas Wilayah Bidang Pendidikan	116
5.5. Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar	117
5.6. Prioritas Wilayah Bidang Perlindungan Sosial	121
5.7. Prioritas Wilayah Bidang Ketahanan Pangan	122
5.8. Data Spasial	123
BAB VI PENUTUP	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Subulussalam.....	11
Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Subulussalam Menurut Kecamatan Tahun 2018-2021	17
Gambar 3.3 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan, Kelembagaan dan Penurunan Kemiskinan	20
Gambar 3.23 PDRB (Miliar Rupiah) Kota Subulussalam Tahun 2017 – 2021.....	21
Gambar 3.24 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Subulussalam Tahun 2017 – 2021	22
Gambar 3.19 Pengeluaran Perkapita di Kota Subulussalam Tahun 2007 – 2021	24
Gambar 3.20 Persentase Pengeluaran per Kapita Kota Subulussalam Tahun 2017-2021	25
Gambar 3.21 Analisis Relevansi Pengeluaran Riil per Kapita Kota Subulussalam Tahun 2018-2021	26
Gambar 3.22 Analisis Posisi Relatif Pengeluaran Riil per Kapita Kota Subulussalam Tahun 2021.....	26
Gambar 3.25 Koefisien Gini Kota Subulussalam Tahun 2017 – 2021	27
Gambar 3.26 Analisis Relevansi Rasio Gini Kota Subulussalam Tahun 2016-2021.....	28
Gambar 3.27 Posisi Relatif Rasio Gini Kota Subulussalam Tahun 2020.....	28
Gambar 3.4 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Subulussalam	31
Gambar 3.5 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kota Subulussalam	32
Gambar 3.6 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Subulussalam Tahun 2021	33
Gambar 3.7 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Subulussalam Tahun 2007 – 2021	33
Gambar 3.8 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin Kota Subulussalam Tahun 2016-2021	34
Gambar 3.9 Analisis Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Subulussalam Tahun 2021	35
Gambar 3.10 Perkembangan Tingkat Kedalaman Kemiskinan di Kota Subulussalam Tahun 2007 – 2021.....	36
Gambar 3.11 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Subulussalam Tahun 2016-2021.....	36
Gambar 3.12 Analisis Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Subulussalam Tahun 2021	37
Gambar 3.13 Tingkat Keparahan Kemiskinan di Kota Subulussalam Tahun 2007 – 2021	38
Gambar 3.14 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kota Subulussalam Tahun 2016-2021	39
Gambar 3.15 Analisis Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2016-2021	39
Gambar 3.16 Garis Kemiskinan di Kota Subulussalam Tahun 2007 – 2021	40
Gambar 3.17 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2016-2021	41
Gambar 3.18 Analisis Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2021	41
Gambar 3.28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Subulussalam Tahun 2015-2021	43
Gambar 3.29 Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Subulussalam Tahun 2016 – 2020.....	43
Gambar 3.30 Analisis Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Subulussalam	44
Gambar 3.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Subulussalam Tahun 2015-2021	45
Gambar 3.32 Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Subulussalam Tahun 2016 - 2020.....	45
Gambar 3.33 Analisis Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Subulussalam Tahun 2020	46
Gambar 3.34 Angka Kesakitan (Morbidity Rate) Kota Subulussalam 2019 – 2021	47

Gambar 3.35 Analisis Relevansi Angka Morbiditas Kota Subulussalam	48
Gambar 3.36 Analisis Posisi Relatif Angka Morbiditas Kota Subulussalam	48
Gambar 3.37 Angka Harapan Hidup Kota Subulussalam 2015 – 2021	49
Gambar 3.38 Analisis Relevansi Angka Harapan Hidup Kota Subulussalam 2016– 2021	50
Gambar 3.39 Analisis Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kota Subulussalam 2016– 2021	50
Gambar 3.40 Prevalensi Stunting Kota Subulussalam Tahun 2018-2021	51
Gambar 3.41 Analisis Relevansi Prevalensi Stunting Kota Subulussalam Tahun 2018-2021	52
Gambar 3.42 Analisis Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kota Subulussalam Tahun 2018-2021	52
Gambar 3.43 Angka Partisipasi Murni Kota Subulussalam 2015 – 2021	54
Gambar 3.44 Angka Partisipasi Kasar Kota Subulussalam 2015 – 2021	55
Gambar 3.45 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Subulussalam Tahun 2020 – 2021	56
Gambar 3.46 Angka Melek Huruf Usia 15+ Kota Subulussalam Tahun 2020-2021	57
Gambar 3.47 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Subulussalam Tahun 2015-2021	58
Gambar 3.48 Analisis Relevansi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Subulussalam Tahun 2016-2021	59
Gambar 3.49 Analisis Posisi Relatif Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Subulussalam Tahun 2021	59
Gambar 3.50 Angka Rata-rata Lama Sekolah (HLS) Kota Subulussalam tahun 2015-2021	60
Gambar 3.51 Analisis Relevansi Angka Rata-rata Lama Sekolah (HLS) Kota Subulussalam Tahun 2016-2021	61
Gambar 3.52 Analisis Posisi Relatif Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Subulussalam Tahun 2021	61
Gambar 3.53 Persentase Layanan Sanitasi Layak di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019	62
Gambar 3.54 Analisis Relevansi Persentase Layanan Sanitasi Layak di Kota Subulussalam Tahun 2016-2020.....	63
Gambar 3.55 Analisis Posisi Relatif Persentase Layanan Sanitasi Layak di Kota Subulussalam Tahun 2020.....	64
Gambar 3.56 Persentase Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar Kota Subulussalam Tahun 2021	64
Gambar 3.57 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Tahun 2015 – 2021	65
Gambar 3.58 Analisis Relevansi Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Tahun 2018 – 2020	66
Gambar 3.59 Analisis Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Tahun 2020.....	66
Gambar 3.60 Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan dari Listrik Tahun 2016 - 2021	67
Gambar 3.61 Persentase Kepemilikan Rumah di Kota Subulussalam Tahun 2021.....	68
Gambar 3.62 Produksi Komoditas Pangan Kota Subulussalam Tahun 2020-2021	69
Gambar 3.63 Posisi Relatif Produksi Komoditas Pangan Kota Subulussalam Tahun 2021.....	69
Gambar 3.64 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Tahun 2021	70
Gambar 4.65 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2016-2021	82
Gambar 4.66 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan Kota Subulussalam Tahun 2016-2020.....	84
Gambar 4.67 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan Kota Subulussalam Tahun 2016-2020.....	86
Gambar 4.68 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Kota Subulussalam Tahun 2016-2021	88

Gambar 4.69 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar Kota Subulussalam Tahun 2016-2021	90
Gambar 4.70 Komposisi Pendapatan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2017 – 2021	92
Gambar 4.71 Komposisi Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun 2017 – 2021	93
Gambar 4.72 Komposisi Belanja Daerah Kota Subulussalam Berdasarkan Fungsi Pelayanan Tahun 2020 – 2021..	93
Gambar 4.73 Kuadran Prioritas Kapasitas Fiskal Daerah dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Tahun 2021	94
Gambar 5.74 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Kemiskinan.....	113
Gambar 5.75 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Ketenagakerjaan	114
Gambar 5.76 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Kesehatan (AKI dan Gizi Buruk).....	115
Gambar 5.77 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Kesehatan	116
Gambar 5.78 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Pendidikan	117
Gambar 5.79 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Infrastruktur Dasar (Sumber Air Minum).....	118
Gambar 5.80 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Infrastruktur Dasar (Sanitasi).....	119
Gambar 5.81 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang (Elektrifikasi/Penerangan).....	120
Gambar 5.82 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Infrastruktur Dasar (Kepemilikan Rumah) ..	121
Gambar 5.83 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Perlindungan Sosial	122
Gambar 5.84 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Ketahanan Pangan	123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Kecamatan, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Desa Per Kecamatan.....	11
Tabel 2.2 Jarak desa ke ibukota kecamatan dan kondisi topografi desa di Kecamatan Simpang Kiri.....	12
Tabel 2.3 Jarak desa ke ibukota kecamatan dan kondisi topografi desa di Kecamatan Penanggalan	13
Tabel 2.4 Jarak desa ke ibukota kecamatan dan kondisi topografi desa di Kecamatan Rundeng.....	13
Tabel 2.5 Jarak desa ke ibukota kecamatan dan kondisi topografi desa di Kecamatan Sultan Daulat	14
Tabel 2.6 arak desa ke ibukota kecamatan dan kondisi topografi desa di Kecamatan Longkib	15
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin Menurut Kecamatan Dalam Kota Subulussalam tahun 2021	16
Tabel 2.8 Jumlah Fasilitas Pendidikan Menurut Jenjang di Kota Subulussalam, 2021	17
Tabel 2.9 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Jenjang dan Kecamatat di Kota Subulussalam, 2021	18
Tabel 2.10 Jumlah Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kecamatan di Kota Subulussalam, 2021	18
Tabel 2.11 Keadaan Dana Perbankan Berdasarkan Bank di Kota Subulussalam, 2020	18
Tabel 2.12 Jumlah Nasabah Perbankan Berdasarkan Bank di Kota Subulussalam, 2020	18
Tabel 2.13 Jumlah Lembaga Keuangan Non Bank (Koperasi) di Kota Subulussalam, 2020.....	19
Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Subulussalam, 2021	19
Tabel 2.15 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kota Subulussalam Tahun 2019-2021	20
Tabel 2.16 Nilai PDRB (Milyar Rupiah) dan Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Per Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2021	22
Tabel 2.17 Kondisi Kemiskinan di Kota Subulussalam Tahun 2015-2021.....	29
Tabel 3.18 Luas Lahan Tanaman (Ha) Komoditas Perkebunan Berdasarkan Kecamatan di Kota Subulussalam.....	71
Tabel 3.19 Produski (Ton) Komoditas Perkebunan Berdasarkan Kecamatan di Kota Subulussalam	71
Tabel 3.20 Volume (ton) dan Nilai (Rp.000) Perikanan di Kota Subulussalam.....	71
Tabel 3.21 Kejadian Bencana Berdasarkan Kecamatan di Kota Subulussalam, 2020	72
Tabel 3.22 Jumlah Desa Terdampak Banjir Berdasarkan Kecamatan di Kota Subulussalam, 2020	72
Tabel 3.23 Jumlah Rumah Yang Terendam Akibat Bencana Banjir di Kota Subulussalam, 2020.....	73
Tabel 3.24 Karekteristik Desa Menurut Kecamatan di Kota Subulussalam, 2021	73
Tabel 4.25 Teori Perubahan (ToC) Penanggulangan Kemiskinan.....	74
Tabel 4.26 Teori Perubahan bidang Ekonomi (Konsumsi).....	75
Tabel 4.27 Teori Perubahan di Bidang Pendidikan	76
Tabel 4.28 Teori Perubahan di Bidang Kesehatan.....	77
Tabel 4.29 Teori Perubahan di Bidang Infrastruktur Dasar	78
Tabel 4.30 Teori Perubahan Bidang Ketenagakerjaan	79
Tabel 4.31 Teori Perubahan Bidang Pangan	80
Tabel 4.32 Teori Perubahan di Bidang Perlindungan Sosial.....	81

Tabel 4.33 Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Per Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2021.....	82
Tabel 4.34 Jumlah Lansia per Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2021.....	83
Tabel 4.35 Struktur dan Lapangan Pekerjaan Penduduk Miskin Ekstrem Per Kecamatan Tahun 2021	84
Tabel 4.36 Status Pekerjaan Penduduk Miskin Ekstrem per Kecamatan Tahun 2021	85
Tabel 4.37 Sumber Air Minum Rumah Tangga Penduduk Miskin Ekstrem per Kecamatan Tahun 2021	86
Tabel 4.38 Akses Sanitasi Layak Rumah Tangga Penduduk Miskin Ekstrem per Kecamatan Tahun 2021	87
Tabel 4.39 Status Pendidikan Anak Usia Sekolah Penduduk Miskin Ekstrem Per Kecamatan Tahun 2021.....	88
Tabel 4.40 Jenjang Pendidikan Penduduk Miskin Ekstrem per Kecamatan Tahun 2021	89
Tabel 4.41 Status Hunian Rumah Tangga Penduduk Miskin Ekstrem per Kecamatan Tahun 2021	90
Tabel 4.42 Sumber Penerangan Rumah Tangga Penduduk Miskin Ekstrem Per Kecamatan Tahun 2021	91
Tabel 4.43 Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2023-2026	96
Tabel 5.44 Data Spasial Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2021	123

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan suatu permasalahan pembangunan yang sangat strategis dan asasi baik di tingkat daerah, regional, nasional maupun internasional. Pembangunan yang berpusat pada manusia mensyaratkan kemiskinan harus tertanggulangi. Masih ada banyak pihak yang salah memahami kemiskinan dengan pengertian yang paling sederhana yakni hanya sebagai keadaan kekurangan uang, rendahnya tingkat pendapatan dan tidak terpenuhinya kebutuhan materi sehari-hari. Bappenas dalam dokumen Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) mendefinisikan masalah kemiskinan bukan hanya diukur dari kurangnya pendapatan, tetapi karena tidak terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat miskin untuk mempertahankan dan memenuhi kehidupan yang bermartabat sebagai bagian dari hak manusia yang paling asasi. Sehingga cara pandang penanggulangan kemiskinan sekarang ini tidak hanya secara parsial dengan melihat dari sisi ekonomi saja, tetapi berusaha menanggulangi kemiskinan dengan memahami kebutuhan masyarakat miskin baik materi maupun non materi yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak-haknya.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu dan menyeluruh. Apalagi penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan amanat UUD 1945 yang dituangkan dalam berbagai agenda pembangunan nasional. Kemudian penurunan angka kemiskinan juga telah menjadi komitmen global dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), dengan menetapkan target mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun pada tahun 2030.

Dalam hal kebijakan, pemerintah sudah menerbitkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP 2005-2025, yang menjelaskan bahwa perekonomian dikembangkan berlandaskan prinsip demokrasi ekonomi yang mengutamakan kepentingan nasional sehingga terjamin kesempatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya **penanggulangan kemiskinan**.

Selanjutnya, dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, ditegaskan bahwa pengentasan kemiskinan juga merupakan bagian dari 6 strategi layanan dasar dan perlindungan sosial, yaitu: (1) tata kelola kependudukan; (2) perlindungan sosial; (3) kesehatan; (4) pendidikan; (5) **pengentasan kemiskinan** dan (6) kualitas anak, perempuan, dan pemuda, dimana angka kemiskinan ditargetkan mencapai 6-7 % di tahun 2024, sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Prioritas nasional tersebut sejalan dengan prioritas provinsi Aceh yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2022 – 2026 yaitu: (1) meningkatkan kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat untuk penurunan angka pengangguran dan **kemiskinan** dalam rangka mengatasi dampak sosial ekonomi dari Covid-19; (2) meningkatkan kualitas SDM dan mewujudkan pemenuhan hak-hak sipil, politik, sosial, ekonomi masyarakat dan menyukseskan agenda politik pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum kepala daerah

secara serentak; (3) pembangunan infrastruktur strategis untuk mengurangi ketimpangan wilayah dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam serta meningkatkan perdamaian; dan (4) mengoptimalkan penerapan syariat Islam serta menggalang kemitraan dan peningkatan pendapatan asli Aceh untuk meningkatkan kemandirian fiskal. Selanjutnya program penanggulangan kemiskinan itu juga sinkron dengan prioritas Pembangunan Kota Subulussalam dalam RPJMD Kota Subulussalam 2019-2024 : (1) Meningkatkan Kualitas Aksesibilitas, Mutu Dan Daya Saing Pendidikan; (2) Meningkatkan Kualitas SDM Generasi Muda Melalui Pembinaan Olahraga; (3) Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat Dan Jangkauan Pelayanan Kesehatan; (4) Meningkatnya Pengarusutamaan Gender Dan Perlindungan; (5) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup; (6) Meningkatnya Infrastruktur Pelayanan Dasar Yang Berkualitas; (7) Mengembangkan Infrastruktur Pariwisata Untuk Kesejahteraan Masyarakat; (8) Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat; (9) **Menurunnya Tingkat Kemiskinan** (10) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Bersih, Professional Dan Transparan; dan (11) Meningkatkan Layanan Kinerja Lalulintas Angkutan Jalan. Dengan sinkronnya prioritas pembangunan baik dalam RJPMD, RPA Aceh maupun RPJMD Kota Subulussalam tersebut merupakan sebuah momen penting sekaligus peluang bagi seluruh stakeholders khususnya pemerintah Kota Subulussalam dan melakukan percepatan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Subulussalam dimasa yang akan datang.

Salah satu isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2019 - 2024 terdapat isu-isu strategis yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kota Subulussalam dimasa yang akan datang. Strategi pembangunan juga diperlukan agar setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Isu - isu strategis yang ada dalam RPJMD Kota Subulussalam tersebut telah menunjukkan komitmen dan kepedulian pemerintah kota dalam program percepatan penanggulangan kemiskinan yaitu : (1) Peningkatan kualitas dan pelayanan pendidikan; (2) Peningkatan aksesibilitas pendidikan secara menyeluruh; (3) Peningkatan aksesibilitas, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan; (4) Peningkatan akses layanan kesehatan serta Sumber Daya Kesehatan yang berkualitas; (5) Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan di semua Bidang dan terjaminnya Kesetaraan Gender; (6) Peningkatan Infrastruktur ekonomi yang berkualitas; (7) Peningkatan infrastruktur sosial yang berkualitas; (8) Penanggulangan kerawanan bencana, pengelolaan sumber daya alam, dan lingkungan hidup; (9) Peningkatan pertumbuhan ekonomi; **(10) Penurunan jumlah penduduk miskin, pengangguran dan ketimpangan pendapatan.** Isu - isu strategis seperti yang diuraikan diatas memiliki kaitan langsung dengan peran sektoral dalam pencapaian indikator-indikator yang menjadi penilaian dalam penanggulangan kemiskinan dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Pusat.

Kemudian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam tahun 2019 - 2024 juga telah menetapkan visi yang merupakan cita - cita yang ingin dicapai, yaitu : **"Kota Subulussalam Sejahtera dan Islami"**

Penjelasan visi tersebut adalah dalam lima tahun ke depan masyarakat Kota Subulussalam akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana penunjang. Peningkatan kesejahteraan tersebut antara lain ditunjukkan melalui peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran. Kemudian juga adanya cita-cita dan keinginan mewujudkan masyarakat Kota Subulussalam yang islami dengan menjalankan syariat Islam secara Kaffah. Cita-cita tersebut antara lain ditunjukkan melalui peningkatan Indeks Syariat Islam, peningkatan jumlah Hafiz, peningkatan angka melek Al- Quran, Penurunan kasus pelanggaran Syariat Islam. Untuk mencapai keinginan tersebut akan dikembangkan pendidikan keislaman baik formal dan non formal serta menumbuh kembangkan kegiatan- kegiatan sosial kemasyarakatan yang bernuansa Islam dalam kehidupan masyarakat.

Guna mencapai visi "*Kota Subulussalam Sejahtera dan Islami*" maka ditetapkan misi pembangunan Kota Subulussalam sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas;
2. Mewujudkan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas;
3. Mewujudkan dan Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Pelayanan Dasar Berbasis;
4. Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Memiliki Nilai Ekonomis dan Prospek Pasar yang Baik;
5. Mewujudkan Pemerintahan yang baru, profesional dan transparan;
6. Mewujudkan Penerapan Syariat Islam Melalui Penguatan Kembali Sistem Sosial Yang Berbasis Islam Dalam Kehidupan Masyarakat;

Kota Subulussalam melalui Pemerintah Kota mempunyai komitmen dan kepedulian untuk mengurangi jumlah penduduk miskin sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program penanggulangan kemiskinan yang ada dan konsisten melaksanakan program dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, diharapkan bisa mereduksi angka kemiskinan baik secara kuantitas dan kualitasnya. Oleh karenanya, berbagai upaya untuk melakukan penanggulangan kemiskinan tersebut perlu adanya kebijakan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan terintegrasi secara berkelanjutan sebagai acuan agar kebijakan setiap sektor di pemerintahan dan prakarsa masyarakat untuk mengatasi kemiskinan tidak tumpang tindih dan sia-sia karena setiap kegiatan menjadi tidak sinergi. Dengan demikian, untuk menyinergikan langkah penanggulangan kemiskinan di Kota Subulussalam, diperlukan sebuah rencana penanggulangan kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Subulussalam menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di kota Subulussalam pada tahun 2018 sebesar 18,51 persen dapat diturunkan sebesar 0,86 digit menjadi 17,65 persen pada tahun 2021, meskipun angka tersebut masih rata-rata diatas persentase kemiskinan tingkat provinsi dan nasional, namun adanya tren positif ini sebagai tanda adanya upaya yang

dilakukan pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Capaian lain yang telah di upayakan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kota Subulussalam ditunjukkan juga dengan tingkat pertumbuhan ekonomi dimana tahun 2018 sebesar 4,42 persen (menurun sebesar 0,55 persen) sehingga 3,87 persen tahun 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2018 mencapai 6,49 persen (menurun sebesar 0,23 persen) sehingga menjadi 6,26 persen pada tahun 2021, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2018 yang semula hanya 58,76 persen (meningkat sebesar 5,02 persen) hingga menjadi 63,78 persen pada tahun 2021. Dan selanjutnya data jumlah penduduk miskin di Kota Subulussalam pada tahun 2018 sebesar 14.780 jiwa dan menurun pada tahun 2021 menjadi 14.460 jiwa.

Namun dari data jumlah penduduk miskin di atas menunjukkan masih tingginya angka kemiskinan di wilayah kota Subulussalam yang harus menjadi prioritas utama pembangunan di Kota Sada Kata ini. Masih terdapat penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sampai saat ini Pemerintah Kota Subulussalam terus berupaya untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dari tahun ke tahun. Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh daerah bahkan di dunia termasuk Indonesia yang penanganannya membutuhkan campur tangan berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat.

Mengkaji ulang secara nasional, salah satu upaya dalam rangka pencapaian target penurunan tingkat kemiskinan dalam RPJMN 2020-2024 dan pencapaian target SDGs 2015-2030, maka pada tahun 2015 telah diterbitkan kebijakan operasional berupa perpres No. 96 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (sebagai penyempurnaan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan). Perpres 96 Tahun 2015 menegaskan beberapa hal sebagai berikut: (1) **Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan**, meliputi mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin; meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin; mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; serta menyinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan; (2) **Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan** terdiri dari: kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin; (3) **Membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan** sebagai tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan; dan (4) **Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK)** Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Tujuan Perpres No. 96 Tahun 2015 ini adalah meningkatkan efektivitas upaya pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dan sektor swasta dalam penanggulangan kemiskinan. Efektivitas tersebut berjalan melalui penguatan kapasitas pemerintah dan peran masyarakat oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Sebagaimana amanat Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, Menteri Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. Sistem kelembagaan TKPK bekerja untuk mencapai target pengurangan angka kemiskinan di daerah sebagaimana direncanakan dalam RPJMD, sekaligus memantau relevansi arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD terhadap pemenuhan target pengurangan angka kemiskinan nasional dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem pada tahun 2030 sesuai dengan target yang terdapat di dalam SDGs.

Presiden Republik Indonesia juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Presiden menginstruksikan bahwa kemiskinan ekstrem di seluruh Indonesia harus 0 % di tahun 2024. Pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dilakukan secara tepat sasaran melalui strategi kebijakan meliputi : pengurangan beban pengeluaran masyarakat; peningkatan pendapatan masyarakat ; dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Adapun strategi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini sejalan dengan komitmen global yang tertuang dalam SDGs. Bahkan Presiden menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem itu 6 tahun lebih cepat dibandingkan target SDGs. Menindaklanjuti Inpres nomor 4 tahun 2022 tersebut, Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2022 tentang kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024. Pada tahun 2022 lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem ada 212 Kabupaten/Kota dan di tahun 2023-2024 penghapusan kemiskinan ekstrem diprioritaskan untuk seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Diharapkan dalam pelaksanaannya nanti dibawah koordinasi lembaga penanggulangan kemiskinan yaitu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Kelembagaan penanggulangan kemiskinan di Kota Subulussalam telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota Subulussalam Nomor 188.45/99/ 2022 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Sekretariat, dan Kelompok pengelola Program Kota Subulussalam Tahun 2022.

Tugas TKPK Kota Subulussalam adalah melakukan koordinasi, perumusan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Fungsi TKPK Kota Subulussalam adalah : menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) ; koordinasi penyusunan rancangan RPKD kabupaten/kota di bidang penanggulangan kemiskinan; koordinasi pelaksanaan program bidang penanggulangan kemiskinan; fasilitasi pengembangan kemitraan bidang penanggulangan kemiskinan; penyusunan instrumen pemantauan, dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan; pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang penanggulangan kemiskinan sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota. RPKD adalah

dokumen rencana penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.

1.1.1. Tujuan

Tujuan dilakukannya penyusunan dokumen RPKD Kota Subulussalam Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut :

1. Membangun konsensus bersama dan menegaskan komitmen pemerintah kota, bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensi sehingga memerlukan konsep pemahaman kemiskinan dan ruang lingkup intervensi kebijakan untuk penanggulangannya di Kota Subulussalam;
2. Meningkatkan sinergitvitas serta memastikan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas intervensi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, swasta, masyarakat dan pihak yang peduli terhadap kemiskinan di Kota Subulussalam;
3. Sebagai strategi dasar untuk meningkatkan koordinasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Subulussalam;
4. Sebagai strategi untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Subulussalam secara terintegrasi, sistematis, terukur dan berkelanjutan.

1.1.2. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Subulussalam, mengacu pada Pasal 20 Permendagri 53 Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: KONDISI UMUM DAERAH
BAB III	: PROFIL KEMISKINAN DAERAH
BAB IV	: PRIORITAS PROGRAM
BAB V	: LOKASI PROGRAM
BAB VI	: PENUTUP

1.2. Dasar Hukum

Landasan Dasar Hukum dalam penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2023-2026, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 10);
5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kabupaten / Kota Prioritas Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Tahun 2022-2024;
10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
11. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
12. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data Pemasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
13. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9);
14. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 55);
15. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022 (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 9);
16. Qanun Kota Subulussalam Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Subulussalam Tahun 2014-2034 (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2014 Nomor 3);
17. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Subulussalam (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 85);

18. Qanun Kota Subulussalam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Subulussalam Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Subulussalam Tahun 2018 Nomor 1);
19. Qanun Kota Subulussalam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Subulussalam Tahun 2019-2024 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Subulussalam Nomor 105);

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

Kemiskinan merupakan salah satu penghambat proses dalam pembangunan di suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi tidak diimbangi dengan penurunan angka kemiskinan akan menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ekonomi hanya kelompok-kelompok tertentu saja atau bisa diartikan keuntungan yang didapat dari proses produksi barang dan jasa sebagian besar di bawa keluar daerah, sehingga efek terhadap masyarakat sangat kecil.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang sangat kompleks, bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga menyangkut kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin. Cara pandang yang berbeda akan menentukan pemahaman tentang kondisi, sifat dan konteks kemiskinan, bagaimana sebab-sebab kemiskinan dapat diidentifikasi, dan bagaimana masalah kemiskinan dapat diatasi. Agar upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat, hal pertama yang harus dilakukan adalah memahami pengertian kemiskinan secara komprehensif.

Terdapat dua pengertian umum tentang jenis kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. **Kemiskinan absolut** adalah kemiskinan karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik minimum yang diperlukan agar seseorang dapat hidup secara layak. Sedangkan **kemiskinan relatif** adalah kemiskinan yang berkaitan dengan kesenjangan pendapatan suatu kelompok masyarakat yang lain.

Jika seseorang mempunyai pendapatan, tetapi jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik minimumnya, maka orang tersebut dikatakan miskin. Tingkat pendapatan minimum sering disebut sebagai garis batas kemiskinan. Saat ini konsep kemiskinan yang digunakan oleh pemerintah adalah konsep kemiskinan absolut, yaitu kemiskinan yang ditentukan dengan terlebih dulu menetapkan garis kemiskinan atau tingkat kesejahteraan.

Dengan memperhatikan persoalan kemiskinan serta skala kemiskinan yang ada, beban dan tantangan penanggulangan kemiskinan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Subulussalam sangat besar. Salah satu penyebab dari masih tingginya tingkat kemiskinan di Kota Subulussalam karena masyarakat terbuai dengan fasilitas seperti bantuan yang telah diberikan oleh Pemerintah Kota sehingga menyebabkan mereka malas dan tidak mempunyai motivasi untuk berusaha meningkatkan taraf hidupnya. Kondisi seperti ini dapat terlihat dari besarnya anggaran bantuan sosial yang dialokasikan setiap tahunnya.

Untuk menangani persoalan kemiskinan tersebut dengan kemampuan pemerintah Kota Subulussalam yang relatif terbatas, maka masalah penanggulangan kemiskinan perlu diselesaikan secara bersama-sama antara pemerintah, dunia usaha, para pelaku ekonomi maupun masyarakat.

2.1. Geografi Kota Subulussalam

Kota Subulussalam sebagai salah satu daerah Pemerintahan Kota yang masih relatif muda dan satu-satunya Pemerintahan Kota yang berada di wilayah barat Provinsi Aceh. Kota Subulussalam terbentuk pada awal tahun 2007 dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota

Subulussalam. Namun demikian, tidak dapat disangkal bahwa tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Subulussalam belum sepenuhnya dapat diwujudkan dimana masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang dialami sehingga belum semua tujuan dan sasaran dapat diwujudkan sampai saat ini.

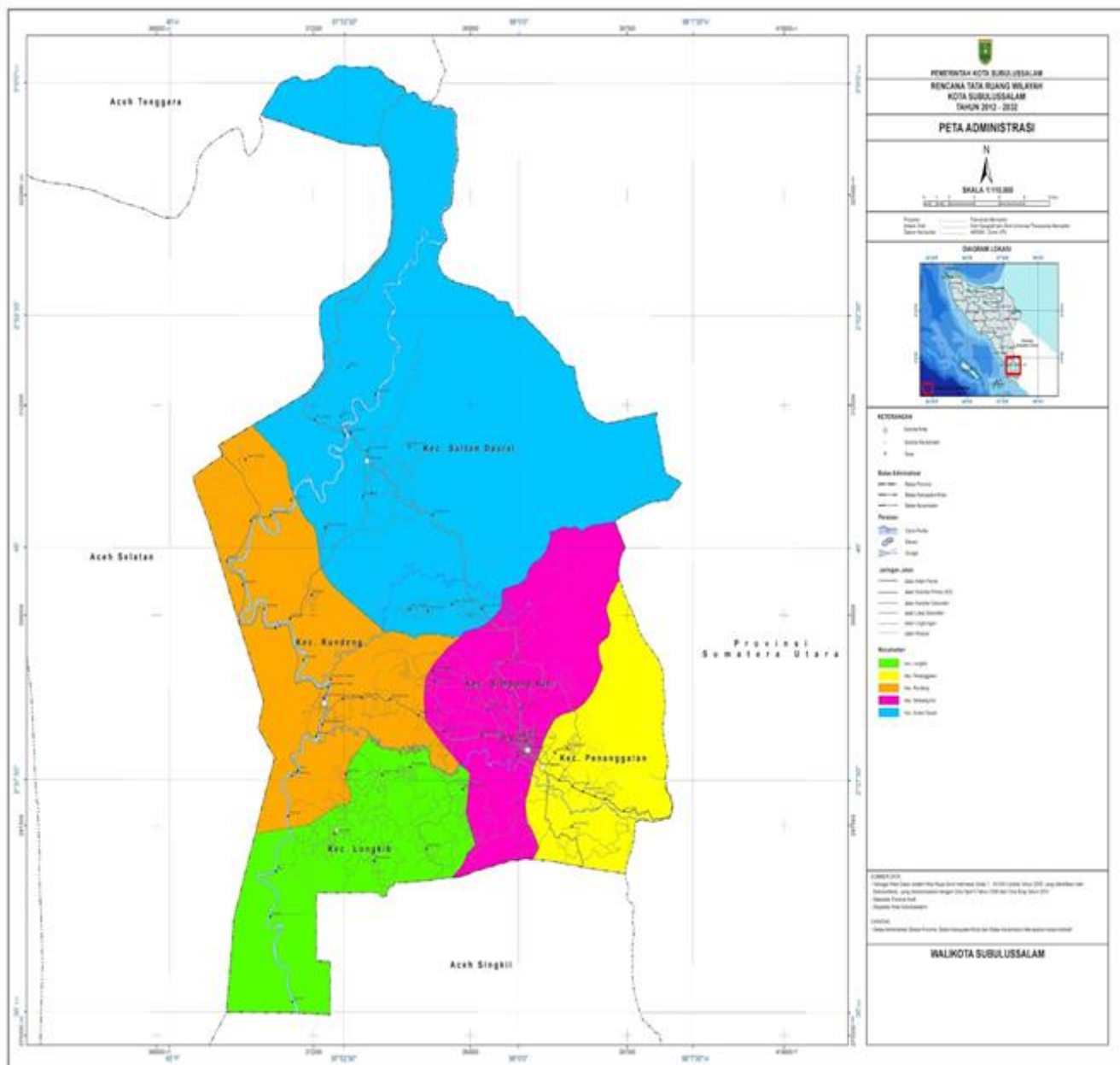
Wilayah Kota Subulussalam memiliki konstelasi regional yang berada di bagian perbatasan antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara dan Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara.
2. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Dairi dan Kabupaten Pakpak Barat, Provinsi Sumatera Utara;
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singkohor dan Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil; dan
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Trumon dan Kecamatan Trumon Timur, Kabupaten Aceh Selatan.

Kota Subulussalam memiliki luas wilayah 1.391 km² (berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik) dengan luas kecamatan yang terbesar adalah Kecamatan Sultan Daulat ($\pm 43\%$), sedangkan kecamatan dengan luasan terkecil adalah Kecamatan Simpang Kiri ($\pm 7\%$). Kota Subulussalam terletak pada posisi 02° 27' 30" - 03° 00' 00" LU/ *North Latitude* dan 0 97° 45' 00' - 98° 10' 00" BT/ *East Latitude*. Pada saat terbentuknya Kota Subulussalam memiliki 5 Kecamatan dengan 74 Desa dan 8 Kemukiman yaitu Kecamatan Simpang Kiri yang terdiri dari 14 Desa dan 2 Kemukiman, Kecamatan Penanggalan yang terdiri dari 10 Desa dan 1 Kemukiman, Kecamatan Rundeng yang terdiri dari 23 Desa dan 2 Kemukiman, Kecamatan Sultan Daulat yang terdiri dari 17 Desa dan 2 Kemukiman serta Kecamatan Longkib dengan 10 Desa termasuk di dalamnya satu Desa Persiapan dan 1 Kemukiman.

Namun pada tahun 2012 terjadi pemekaran sebanyak 8 desa dalam wilayah Kota Subulussalam yaitu Kecamatan Simpang Kiri terjadi pemekaran sebanyak 3 desa, Kecamatan Penanggalan terjadi pemekaran sebanyak 3 Desa, dan kecamatan Sultan Daulat terjadi pemekaran sebanyak 2 desa.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Subulussalam



Sumber: RTRW Kota Subulussalam, 2014-2034

Secara rinci luas kecamatan, jumlah kemukiman dan jumlah desa disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1 Luas Kecamatan, Jumlah Kemukiman dan Jumlah Desa Per Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)	Jumlah Kemukiman (Mukim)	Jumlah Desa
1	Simpang Kiri	213	2	17
2	Penanggalan	93	1	13
3	Rundeng	332	2	23
4	Sultan Daulat	602	2	18
5	Longkib	151	1	10

No.	Kecamatan	Luas Kecamatan (Km ²)	Jumlah Kemukiman (Mukim)	Jumlah Desa
	Kota Subulussalam	1.391	8	82

Sumber : BPS Kota Subulussalam

2.1.1. Kondisi Topografi dan Jarak Desa

Kondisi topografi pada masing-masing kecamatan berbeda, seperti dijelaskan berikut ini :

- Keadaan topografi Kecamatan Simpang Kiri pada umumnya berbentuk dataran, hanya dua desa saja yang sebagian besar keadaan topografinya berbukit yaitu Desa Sikelondang dan Desa Subulussalam Barat, dengan ketinggian rata-rata antara 70 meter sampai 221 meter dari permukaan laut. Posisi desa yang terjauh dari Ibukota Kecamatan Simpang Kiri adalah Desa Mukti Makmur dan Desa Makmur Jaya yaitu masing-masing jauhnya 12 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Subulussalam sebagai ibukota kecamatan dan Desa Subulussalam Utara dengan jauh 0,5 Km. Secara umum semua desa di Kecamatan Simpang Kiri sangat mudah untuk dijangkau dengan kendaraan dan relatif tidak ada daerah/desa yang sulit dijangkau sehingga di harapkan semakin mudah dan cepat untuk berkembang.

Tabel 2.2 Jarak desa ke ibukota kecamatan dan kondisi topografi desa di Kecamatan Simpang Kiri

No.	Desa	Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Keadaan Topografi
1.	Buluh Dori	6	Datar
2.	Pegayo	1	Datar
3.	Subulussalam	0	Datar
4.	Pasar Panjang	4,5	Datar
5.	Tangga Besi	4	Datar
6.	Kuta Cepu	6	Datar
7.	Suka Makmur	10	Datar
8.	Sikelondang	4,5	Berbukit
9.	Mukti Makmur	12	Datar
10.	Subulussalam Barat	9	Berbukit
11.	Subulussalam Selatan	1,2	Datar
12.	Subulussalam Utara	0,5	Datar
13.	Lae Oram	4,4	Datar
14.	Makmur Jaya	12	Datar
15.	Subulussalam Timur	-	
16.	Belegen Mulia	-	
17.	Danau Tras	-	

Sumber : BPS Kota Subulussalam

2. Keadaan topografi Kecamatan Penanggalan pada umumnya berbukit-bukit, hanya dua desa saja yang memiliki keadaan topografi datar yaitu Desa Cepu dan Desa Penanggalan, dengan ketinggian rata-rata antara 70 meter sampai 221 meter dari permukaan laut. Posisi desa yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Lae Ikan yang merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara atau lebih tepatnya dengan Kabupaten Pak-Pak Barat, yaitu 10 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Penanggalan. Pada saat ini Kecamatan Penanggalan merupakan andalan Pemerintah Kota Subulussalam sebagai pintu gerbang ke Ibukota Subulussalam.

Tabel 2.3 Jarak desa ke ibukota kecamatan dan kondisi topografi desa di Kecamatan Penanggalan

No.	Desa	Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Keadaan Topografi
1.	Lae Motong	4	Datar
2.	Kampung Baru	4	Berbukit
3.	Penanggalan	0	Datar
4.	Lae Bersih	2,5	Berbukit
5.	Cepu	2	Datar
6.	Kuta Tengah	3	Berbukit
7.	Sikelang	2	Berbukit
8.	Jontor	4	Berbukit
9.	Lae Ikan	10	Berbukit
10.	Penuntungan	4	Berbukit
11.	Penanggalan Timur	-	
12.	Penanggalan Barat	-	
13.	Dasan Raja	-	

Sumber : BPS Kota Subulussalam

3. Keadaan topografi Kecamatan Rundeng secara keseluruhan berbentuk datar, dengan ketinggian rata-rata hanya 20 meter dari permukaan laut dan hampir semua desa di Kecamatan Rundeng berada di pinggir sungai.

Tabel 2.4 Jarak desa ke ibukota kecamatan dan kondisi topografi desa di Kecamatan Rundeng

No.	Desa	Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Keadaan Topografi
1.	Siperkas	15,5	Datar
2.	Kuta Beringin	15	Datar
3.	Kampung Badar	8	Datar
4.	Harapan Baru	7,5	Datar
5.	Teladan Baru	5,5	Datar
6.	Oboh	14	Datar

No.	Desa	Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Keadaan Topografi
7.	Binanga	2	Datar
8.	Belukur Makmur	1	Datar
9.	Pasar Rundeng	0	Datar
10.	Lae Pemualan	1	Datar
11.	Muara Batu-Batu	1	Datar
12.	Sibungke	4	Datar
13.	Panglima Sahman	12	Datar
14.	Sibuasan	15	Datar
15.	Dah	8	Datar
16.	Sepadan	20	Datar
17.	Geruguh	40	Datar
18.	Lae Mate	12	Datar
19.	Mandilam	32	Datar
20.	Tualang	15	Datar
21.	Tanah Tumbuh	15	Datar
22.	Kuala Kepeng	35	Datar
21.	Suak Jampak	74	Datar

Sumber : BPS Kota Subulussalam

4. Keadaan topografi Kecamatan Sultan Daulat pada umumnya berbukit-bukit, hanya enam desa saja yang memiliki keadaan topografi datar yaitu, Desa Pulo Kedep, Suka Maju, Jambi Baru, Singgersing, Pasir Belo serta Jabi-Jabi, dengan ketinggian rata-rata antara 10 meter sampai 350 meter dari permukaan laut. Posisi desa yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Lae Simolap yaitu sejauh 30 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Jambi baru yaitu sejauh 1,5 Km. sebagian kecil letak desa yang ada di Kecamatan Sultan Daulat terletak pada daerah aliran sungai.

Tabel 2.5 Jarak desa ke ibukota kecamatan dan kondisi topografi desa di Kecamatan Sultan Daulat

No.	Desa	Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Keadaan Topografi
1.	Pulo Belen	9	Berbukit
2.	Pulo Kedep	4	Datar
3.	Suka Maju	3	Datar
4.	Gunung Bakti	3	Berbukit
5.	Jambi Baru	1,2	Datar
6.	Singgersing	10	Datar
7.	Cipare-Pare	17	Berbukit
8.	Namo Buaya	15,2	Berbukit

9.	Cipare-Pare Timur	15	Berbukit
10.	Lae Simolap	30	Berbukit
11.	Darul Makmur	15	Berbukit
12.	Pasir Belo	8	Datar
13.	Bawan	8	Berbukit
14.	Sigrun	4	Berbukit
15.	Lae Langge	3	Berbukit
16.	Jabi-Jabi	7	Datar
17.	Bunga Tanjung	14,6	Berbukit
18.	Jabi-Jabi Barat	-	Datar
19.	Batu-Batu Napal	-	

Sumber : BPS Kota Subulussalam

Keadaan topografi Kecamatan Longkib berbukit-bukit serta datar, posisi desa yang terjauh dari ibukota kecamatan adalah Desa Sepang yaitu sejauh 30 Km dan desa yang terdekat adalah Desa Darul Aman yaitu 0,0 Km dari Ibukota Kecamatan Longkib yang merupakan juga Pusat pemerintahan Kecamatan Longkib.

Tabel 2.6 arak desa ke ibukota kecamatan dan kondisi topografi desa di Kecamatan Longkib

No.	Desa	Jarak Desa Ke Ibukota Kecamatan (Km)	Keadaan Topografi
1.	Sepang	30	Lembah/DAS
2.	Longkib	25	Lembah/DAS
3.	Panji	22	Lembah/DAS
4.	Darul Aman	0	Dataran
5.	Bukit Alim	23	Dataran
6.	Rantau Panjang	20	Dataran
7.	Sikerabang	15	Dataran
8.	Bangun Sari	9	Dataran
9.	Lae Saga	6	Berbukit
10.	Darussalam	7	berbukit

Sumber : BPS Kota Subulussalam

2.2. Demografi Kota Subulussalam

Tiga hal pokok yang merupakan komponen utama dan saling berhubungan satu dengan lainnya dalam terbentuknya suatu wilayah adalah: penduduk, tempat/lokasi, dan pemerintahan. Kependudukan adalah Karakteristik yang paling mewakili dalam menentukan gambaran suatu wilayah masalah, karena

penduduk sebagai suatu objek pokok suatu wilayah merupakan komponen yang selalu mengalami perkembangan yang dinamis dari waktu ke waktu.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Subulussalam tahun 2021, jumlah penduduk di Kota Subulussalam berjumlah 92.671 jiwa terdiri dari 47.049 jiwa laki-laki dan 42.622 jiwa perempuan. Dilihat dari distribusinya jumlah penduduk paling banyak di Kecamatan Simpang Kiri, yaitu sebesar 36.521 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Longkib, yaitu sebesar 6.895 jiwa. Jumlah penduduk Kota Subulussalam mulai tahun 2018-2021 terus mengalami peningkatan, ini berakibat dari semakin pesatnya laju pertumbuhan pembangunan, yang membuat orang dari luar Kota Subulussalam berdatangan ke Kota ini. Secara rinci jumlah penduduk Kota Subulussalam dapat dilihat pada tabel berikut:

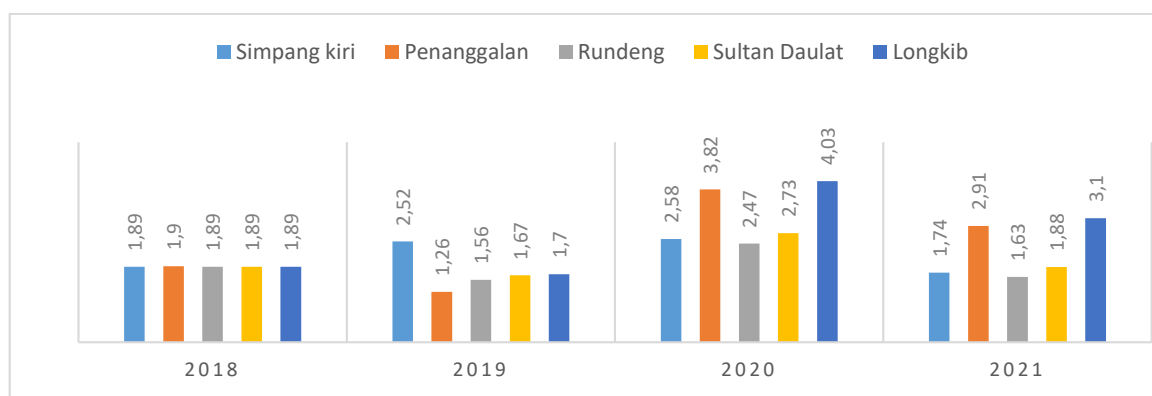
Tabel 2.7 Jumlah Penduduk menurut jenis kelamin Menurut Kecamatan Dalam Kota Subulussalam tahun 2021

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jenis Kelamin)		Jumlah Penduduk (Jiwa)
		Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	
1	Simpang Kiri	18.347	18.174	36.521
2	Penanggalan	8.832	8.591	17.423
3	Rundeng	7.398	6.979	14.388
4	Sultan Daulat	8.944	8.511	17.455
5	Longkib	3.528	3.367	6.895
Jumlah		47.049	45.622	92.671
Tahun 2020		46.065	44.686	90.751
Tahun 2019		40.889	40.528	81.417

Sumber : BPS Kota Subulussalam

Laju pertumbuhan penduduk Kota Subulussalam terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, laju pertumbuhan penduduk Kota Subulussalam rata-rata mencapai 2,25 persen. Laju pertumbuhan ini lebih rendah dibandingkan dengan laju pertumbuhan pada tahun 2020 yang mencapai 2,91 persen. Namun jika dilihat dari persebarannya, Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Subulussalam pada tahun 2021 paling tinggi di Kecamatan Longkib (3,10%). Sedangkan yang paling rendah Kecamatan Rundeng (1,63 %).

Gambar 2.2 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Subulussalam Menurut Kecamatan Tahun 2018-2021



Sumber : BPS Subulussalam

2.3. Akses Pelayanan Publik

Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan diantaranya persamaan perlakuan/tidak diskriminatif. Artinya, tidak ada perbedaan perlakuan karena jenis kelamin. Tidak juga ada perbedaan perlakuan karena status ekonomi terkait antara yang mempunyai dan tidak. Termasuk tidak ada perbedaan perlakuan disebabkan kondisi fisik dan mental (penyandang disabilitas) dalam mengakses pelayanan publik. Apalagi perbedaan perlakuan karena beda suku dan ras serta keyakinan pun seharusnya tak ditemukan perlakuan yang berbeda saat mengakses pelayanan publik. Perlakuanannya harus sama.

Dalam pemerataan akses pelayanan publik dituntut pula pemerataan fasilitas sarana dan prasarana. Adapun jumlah fasilitas pendidikan di Kota Subulussalam pada tahun 2021 dari berbagai jenjang, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.8 Jumlah Fasilitas Pendidikan Menurut Jenjang di Kota Subulussalam, 2021

Kecamatan	TK/RA Sederajat	SD/MI Sederajat	SLTP/SMP/MTs/ Sederajat	SLTA/SMA/SMK/ Sederajat
Simpang Kiri	23	24	9	11
Penanggalan	17	13	9	6
Rundeng	18	24	9	6
Sultan Daulat	9	19	5	3
Longkib	12	10	4	1
Jumlah	79	90	36	27

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa setiap kecamatan memiliki fasilitas pendidikan dari setiap jenjang. Kecamatan Simpang Kiri dengan jumlah penduduk paling banyak memiliki fasilitas pendidikan terbanyak di setiap jenjangnya.

Sedangkan fasilitas kesehatan menurut jenis dan berdasarkan kecamatan pada tahun 2021, dapat dicermati dalam tabel berikut:

Tabel 2.9 Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Jenjang dan Kecamatan di Kota Subulussalam, 2021

Kecamatan	Posyandu	Poskesdes	Apotek	Klinik Pratama	Puskesmas	Rumah Sakit
Simpang Kiri	45	10	5	2	2	1
Penanggalan	16	12	2	1	2	-
Rundeng	23	22	-	-	1	-
Sultan Daulat	23	19	-	-	1	-
Longkib	13	10	-	-	1	-
Jumlah	120	73	11	3	7	1

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas, dapat dicermati bahwa setiap kecamatan memiliki fasilitas kesehatan dari berbagai tingkatan. Fasilitas kesehatan terbanyak tersebar di Kecamatan Simpang Kiri dikarenakan Kecamatan Simpang Kiri merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak.

Kemudian, untuk tenaga kesehatan berdasarkan jenjang dan Kecamatan pada tahun 2021, dapat dicermati sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10 Jumlah Tenaga Kesehatan Berdasarkan Kecamatan di Kota Subulussalam, 2021

Kecamatan	Perawat	Bidan	Tenaga Kefarmasian	Tenaga Gizi	Dokter
Simpang Kiri	21	57	7	3	5
Penanggalan	29	53	7	3	7
Rundeng	11	29	2	-	3
Sultan Daulat	12	38	12	2	1
Longkib	6	24	2	-	0
Jumlah	79	201	30	8	16

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas, dapat dicermati jumlah tenaga kesehatan tersebar di setiap kecamatan dan jumlah terbanyak tersebar di Kecamatan padat penduduk yaitu Kecamatan Simpang Kiri.

Dari aspek akses permodalan, pada tahun 2020 dapat dicermati dalam sajian tabel berikut:

Tabel 2.11 Keadaan Dana Perbankan Berdasarkan Bank di Kota Subulussalam, 2020

Nama Bank	Deposito	Giro	Tabungan
Bank BNI Cab. Subulussalam	3.586.000	321	170.160.000
Bank Syariah Mandiri KCP Subulussalam	2.000.000	1.000.000	19.000.000
Bank Aceh Syariah Cab. Subulussalam	8.996.150	15.969.085	91.146.862
Bank BRI KCP Subulussalam	1.760.000	27.769.995	16.139.434
Jumlah	16.342.150	44.739.401	296.446.296

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas, dapat diketahui jumlah Deposito di berbagai Perbankan di Kota Subulussalam sebesar Rp. 16.342.150.000 pada tahun 2020 dan jumlah Giro sebesar 44.739.401.000 serta Tabungan sebesar 296.446.296.000. Kemudian, jumlah nasabah perbankan di Kota Subulussalam dapat dicermati dalam tabel berikut:

Tabel 2.12 Jumlah Nasabah Perbankan Berdasarkan Bank di Kota Subulussalam, 2020

Nama Bank	Deposito	Giro	Tabungan
Bank BNI Cab. Subulussalam	10	20	32.802
Bank Syariah Mandiri KCP Subulussalam	10	9	1.600
Bank Aceh Syariah Cab. Subulussalam	54	1.537	30.279
Bank BRI KCP Subulussalam	17	26	6.207
Jumlah	91	1.592	70.888

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas, jumlah nasabah Deposito pada tahun 2020 sebanyak 91 orang, jumlah nasabah Giro sebanyak 1592 orang dan Jumlah nasabah Tabungan sebanyak 70.888 orang.

Adapun lembaga keuangan non perbankan berbentuk Koperasi yang terdapat di Kota Subulussalam pada tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.13 Jumlah Lembaga Keuangan Non Bank (Koperasi) di Kota Subulussalam, 2020

Kecamatan	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPPAS	Lainnya	Jumlah
Simpang Kiri	2	0	0	0	35	37
Penanggalan	0	0	2	0	24	26
Rundeng	0	0	0	0	6	6
Sultan Daulat	1	0	0	0	11	12
Longkib	1	0	0	0	3	4
Jumlah	4	0	2	0	79	85

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas, diketahui jumlah Koperasi berdasarkan jenis dan fungsi usahanya tersebar di 5 Kecamatan dalam wilayah Kota Subulussalam. Jumlah sebaran terbanyak di Kecamatan Simpang Kiri karena merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak.

2.4. Informasi Sosial Budaya Kota Subulussalam

Kota Subulussalam adalah kota yang memiliki peninggalan sejarah, baik bangunan maupun budaya. Di Kota Subulussalam banyak aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengorganisir komunitas warga. LSM sebagai modal sosial kota ini dapat dimanfaatkan sebagai forum bagi warga untuk berdiskusi dan bersama-sama pemerintah mengembangkan Kota Subulussalam sebagai Kota sentra produksi.

Dari segi Suku dan Agama, Kota Subulussalam termasuk daerah yang majemuk. Adapun Agama penduduk Kota Subulussalam pada tahun 2021, terdiri dari:

Tabel 2.14 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut di Kota Subulussalam, 2021

Kecamatan	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Lainnya
Simpang Kiri	6.616	85	4	-	-	-

Penanggalan	37.491	318	43	-	1	-
Rundeng	14.621	20	26	-	-	-
Sultan Daultat	15.128	1949	592	-	1	-
Longkib	17.449	195	32	-	-	-
Subulussalam	91.305	2.567	697	-	2	-

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kota Subulussalam dalam perkembangannya sebagai Kota majemuk tentu terdapat kejadian atau tindakan kriminal. Adapun jumlah kejahatan yang tercatat di kantor Kepolisian dalam 3 (tiga) tahun terakhir, sebagai berikut:

Tabel 2.15 Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan di Kota Subulussalam Tahun 2019-2021

Kantor Polisi	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan		
	2019	2020	2021
Polsek Simpang Kiri	59	55	31
Polsek Penanggalan	6	13	9
Polsek Rundeng	10	7	-
Polsek Sultan Daulat	13	11	9
Polsek Longkib	8	10	4
Polres Subulussalam	-	38	111

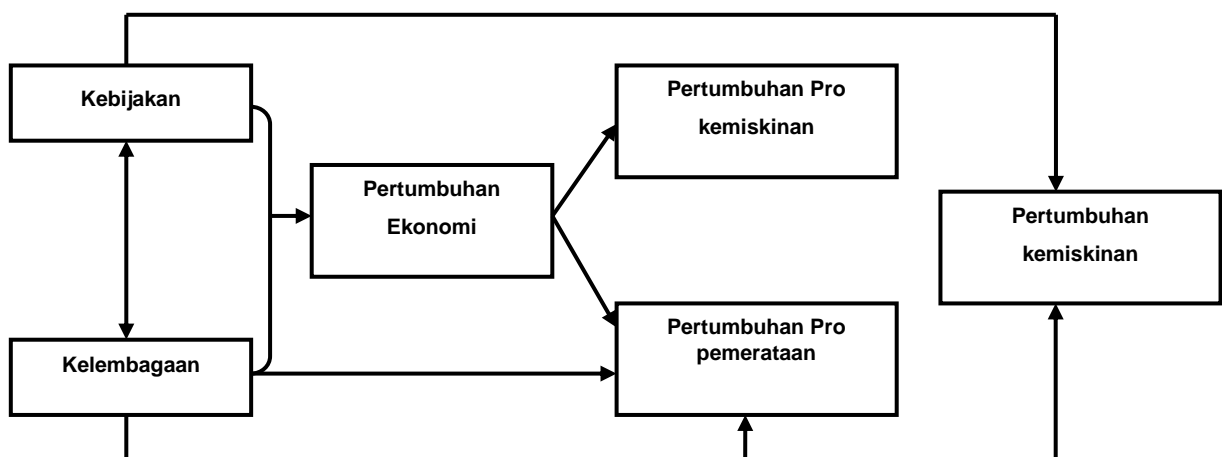
Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data di atas, dapat diketahui bahwa Kecamatan Simpang Kiri dengan jumlah penduduk terbanyak juga diikuti oleh angka kejahatan terbanyak yang terjadi di Kota Subulussalam.

2.5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator makro pembangunan ekonomi suatu wilayah memiliki pengaruh besar terhadap penanggulangan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan kecenderungannya dari waktu ke waktu, hal ini dapat menggambarkan sektor apa (sektoral), wilayah mana (spasial), dan kelompok masyarakat mana (sosial) yang memberikan kontribusinya. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi, kebijakan, kelembagaan dan penurunan kemiskinan dapat disajikan dalam diagram berikut ini.

Gambar 3.3 Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi, Kebijakan, Kelembagaan dan Penurunan Kemiskinan



Sumber :Panduan TNP2K, 2011

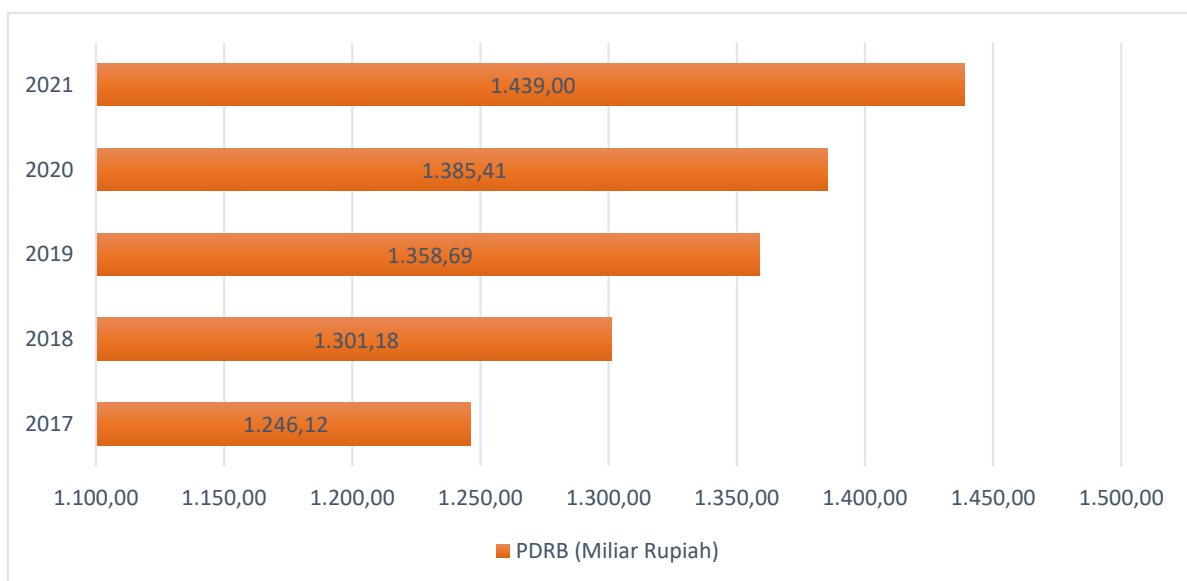
2.5.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Adapun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Subulussalam dalam kurun waktu tahun 2017 – 2021, sebagai berikut:

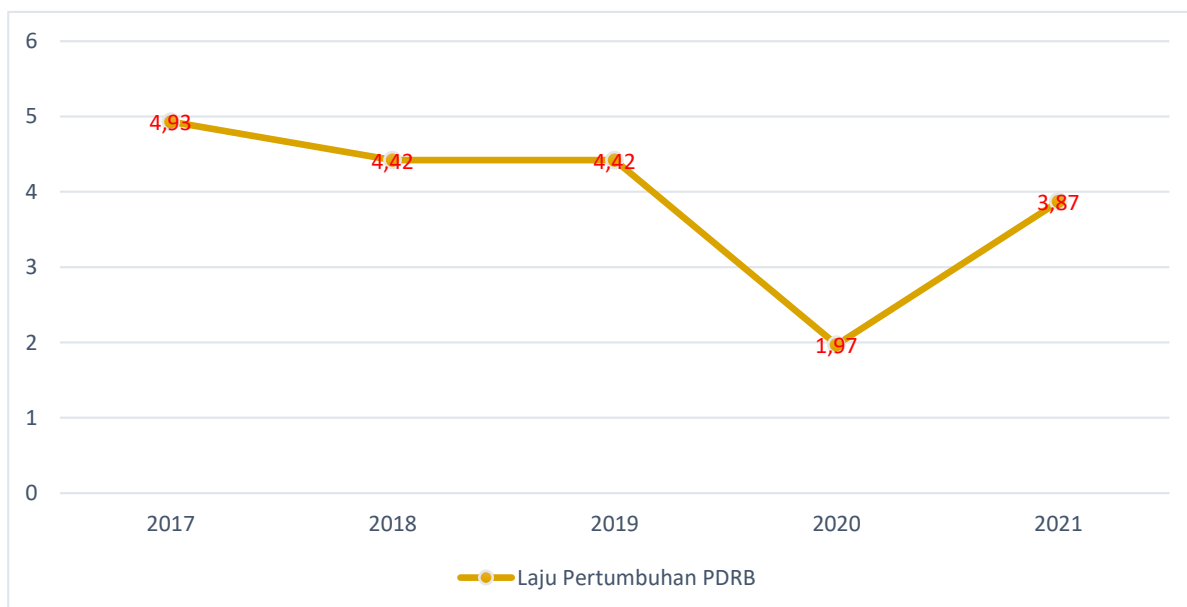
Gambar 3.4 PDRB (Miliar Rupiah) Kota Subulussalam Tahun 2017 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan nilai PDRB Kota Subulussalam dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 nilai PDRB Kota Subulussalam sebesar 1.439,00 Miliar Rupiah. Sedangkan laju pertumbuhan PDRB Kota Subulussalam dalam kurun waktu tahun 2017 – 2021, sebagai berikut:

Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Subulussalam Tahun 2017 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Laju pertumbuhan PDRB Kota Subulussalam, sempat mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020. Hal ini diakibatkan dari efek Pandemi Covid-19. Namun demikian, Kota Subulussalam masih mampu mempertahankan pertumbuhan positif di tengah terjadinya pertumbuhan negatif yang di alami daerah lainnya. Dan pada tahun 2021, pertumbuhan PDRB Kota Subulussalam mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,87.

Pembangunan yang terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Subulussalam perlahan tapi pasti sudah menunjukkan hasil, hal ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin membaik. Tercatat pada Tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Subulussalam mencapai 3,87 % dengan nilai PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 2.122,90 milyar rupiah. Jika dilihat dari struktur perekonomian, terjadi pergeseran, dimana pada saat ini sektor tersier yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor jasa sudah mulai mengalami peningkatan. Kenaikan ini dapat dilihat semakin banyaknya usaha toko, jasa Travel yang beroperasi di Kota Subulussalam. Pada Tahun 2021 tercatat ada 1 hotel berbintang dan 10 hotel melati, serta 48 rumah makan/restoran.

Tabel 2.16 Nilai PDRB (Milyar Rupiah) dan Pertumbuhan Ekonomi (Persen) Per Sektor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018 – 2021

SEKTOR	2018	2019	2020*	2021**
Pertanian	359,57	372,00	387,45	462,55
Laju Pertumbuhan	1,70	2,21	2,99	2,16

SEKTOR	2018	2019	2020*	2021**
Pertambangan dan Penggalian	33,39	28,52	29,42	29,82
Laju Pertumbuhan	-15,99	-22,58	-0,92	-2,84
Industri Pengolahan	241,29	241,51	260,10	414,51
Laju Pertumbuhan	2,07	3,77	3,15	6,33
Listrik dan Gas	1,50	1,59	1,64	1,66
Laju Pertumbuhan	1,87	5,91	3,48	1,52
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,26	0,29	0,31	0,33
Laju Pertumbuhan	5,12	7,14	4,89	5,17
Konstruksi	240,34	276,38	310,33	329,43
Laju Pertumbuhan	5,69	9,88	10,21	1,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	315,13	332,66	330,23	357,32
Laju Pertumbuhan	9,57	5,11	-1,85	4,43
Transportasi dan Pergudangan	81,38	93,74	79,22	96,59
Laju Pertumbuhan	8,69	14,56	-15,77	15,44
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	15,99	17,30	16,66	16,97
Laju Pertumbuhan	11,13	4,41	-5,98	0,70
Informasi dan Komunikasi	44,81	46,43	52,26	56,80
Laju Pertumbuhan	1,89	2,76	10,05	7,48
Jasa Keuangan dan Asuransi	34,87	38,43	39,73	38,77
Laju Pertumbuhan	10,09	8,55	2,47	-4,05
Real Estate	58,56	64,49	64,11	67,05
Laju Pertumbuhan	8,71	7,00	-3,85	3,12
Jasa Perusahaan	5,11	5,56	5,50	5,65
Laju Pertumbuhan	7,96	6,73	-2,63	0,84
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	114,06	121,95	133,22	144,22
Laju Pertumbuhan	7,86	2,73	3,52	4,84
Jasa Pendidikan	38,32	43,91	47,20	50,12
Laju Pertumbuhan	8,57	6,66	3,48	2,47

SEKTOR	2018	2019	2020*	2021**
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	28,34	31,12	34,66	38,93
Laju Pertumbuhan	1,05	2,76	6,65	9,44
Jasa lainnya	9,99	11,05	11,65	12,18
Laju Pertumbuhan	7,70	8,69	0,93	1,82
Total PDRB	1.622,89	1.726,92	1.803,68	2.122,90
Laju Pertumbuhan	4,42	4,42	1,97	3,87

Sumber : BPS Kota Subulussalam
(**) angka sementara

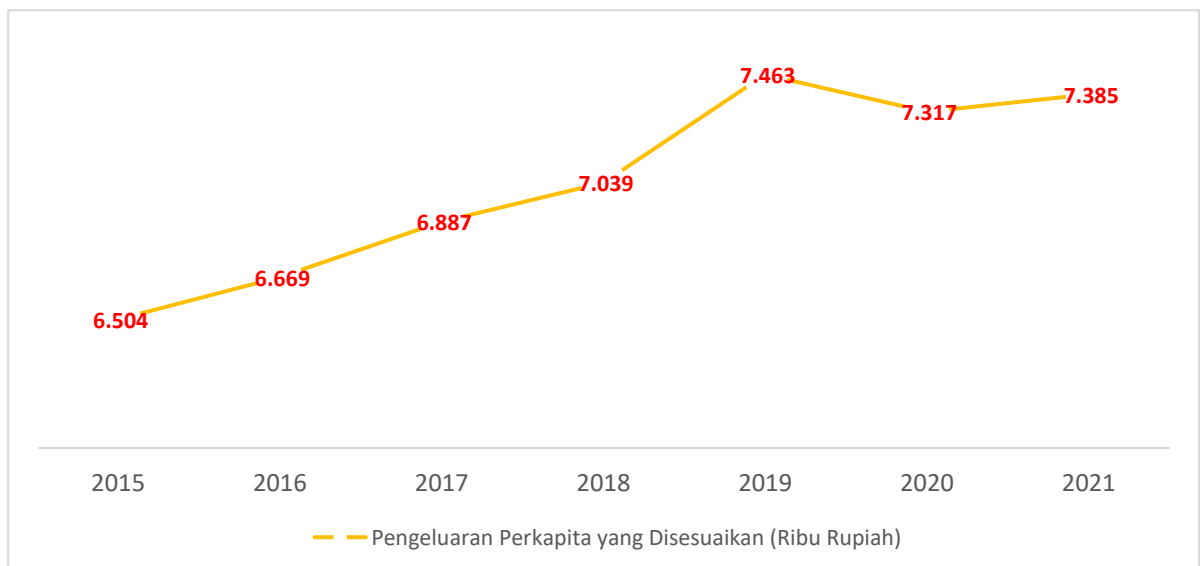
2.5.2. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Dari kurun waktu 2015 – 2021, Pengeluaran per kapita Kota Subulussalam cenderung mengalami peningkatan, hanya pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 7.317 Ribu Rupiah dan kembali meningkat menjadi 7.385 Ribu Rupiah pada tahun 2021. Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk Kota Subulussalam selama setahun sebesar Rp. 7.317.000 pada tahun 2021.

Untuk mengetahui gambaran Pengeluaran per kapita Kota Subulussalam dalam kurun waktu 2015-2021 dapat dilihat dalam gambar berikut:

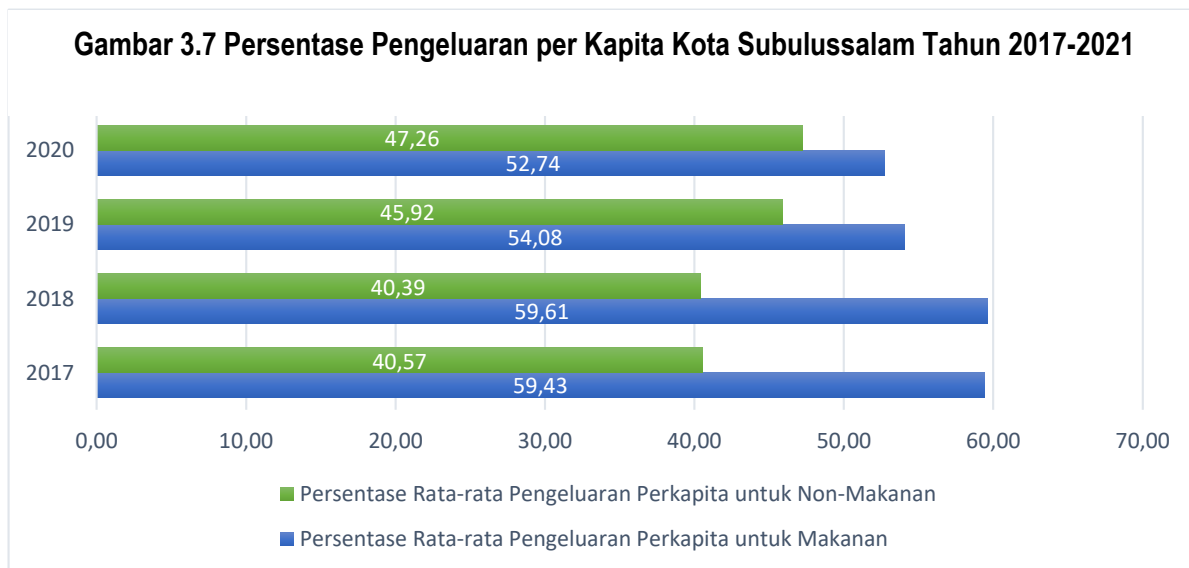
Gambar 3.6 Pengeluaran Perkapita di Kota Subulussalam Tahun 2007 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pengeluaran rumah tangga dibedakan menurut kelompok makanan dan bukan makanan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pengeluaran bukan makanan. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Proporsi pengeluaran rumah tangga di Kota Subulussalam untuk kelompok makanan dan kelompok non makanan, sebagai berikut:

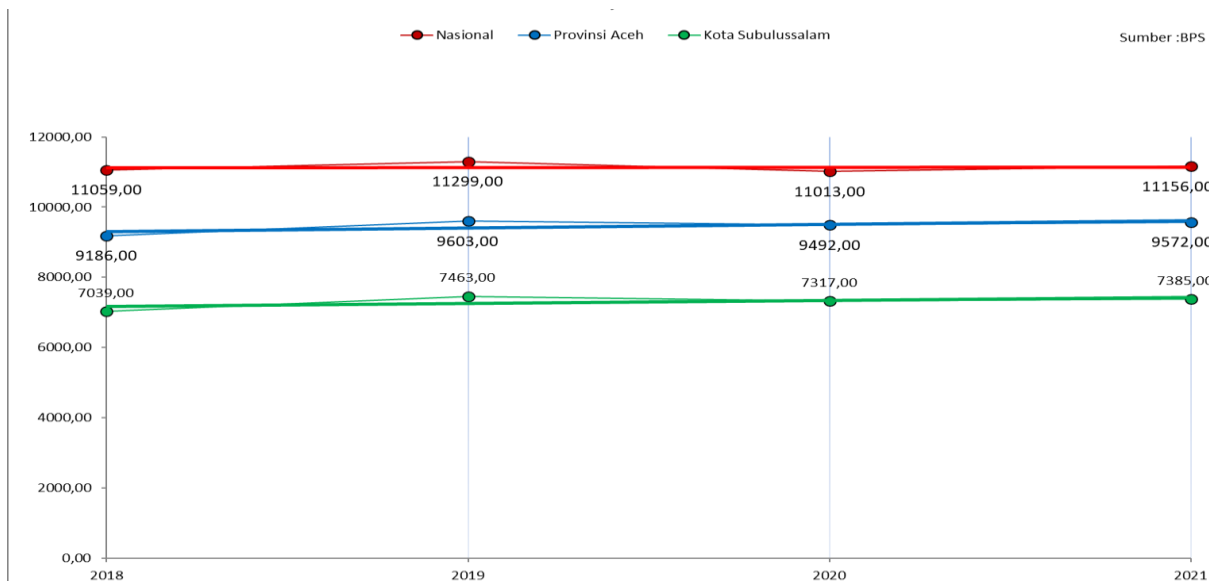


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dalam rentang waktu 2017 – 2021 persentase pengeluaran untuk kelompok makanan masih mendominasi Pengeluaran per kapita di Kota Subulussalam dengan demikian diperlukan upaya-upaya untuk menurunkan persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran.

Adapun relevansi pengeluaran riil per kapita di Kota Subulussalam terhadap pengeluaran riil per kapita Aceh dan Nasional tahun 2018 sampai 2021 dapat dicermati dalam gambar berikut:

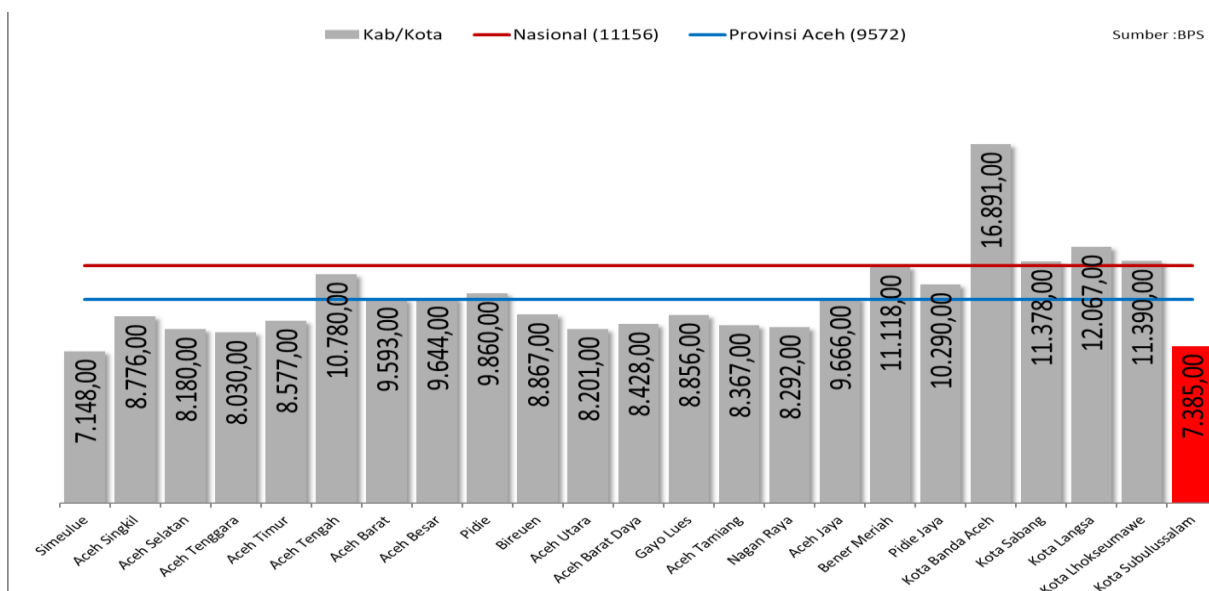
Gambar 3.8 Analisis Relevansi Pengeluaran Riil per Kapita Kota Subulussalam Tahun 2018-2021



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa sama-sama terjadi peningkatan pengeluaran riil per kapita di Kota Subulussalam, Aceh dan Nasional pada tahun 2021. Sedangkan, posisi relatif dari Pengeluaran riil per Kapita Kota Subulussalam dibandingkan dengan 23 Kab/Kota di Aceh pada tahun

Gambar 3.9 Analisis Posisi Relatif Pengeluaran Riil per Kapita Kota Subulussalam Tahun 2021



2021 dapat diketahui dalam gambar berikut:

Dari gambar diatas, diketahui bahwa pengeluaran riil per kapita Kota Subulussalam pada tahun 2021 berada dibawah pengeluaran riil per kapita Aceh dan Nasional bersama 11 Kab/Kota lainnya.

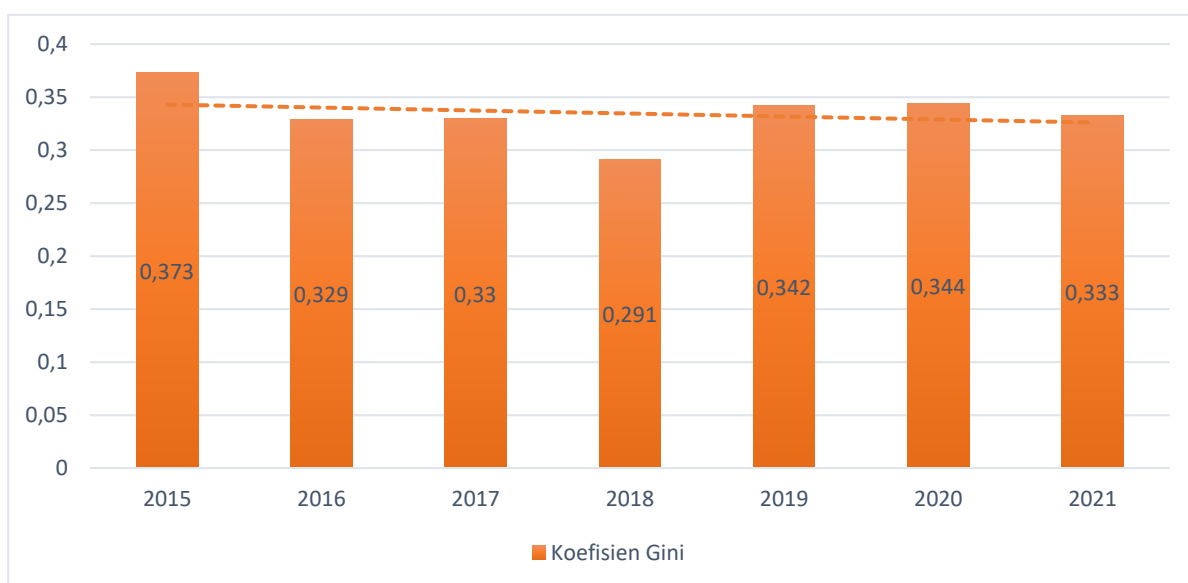
2.5.3. Koefisien Gini

Koefisien gini didasarkan pada kurva lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi uniform (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Mengetahui ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran sebagai proksi pendapatan penduduk.

Koefisien Gini adalah ukuran statistik yang menunjukkan distribusi pengeluaran per kapita penduduk suatu daerah. Koefisien Gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan. Koefisien Gini bernilai 0 (nol) menunjukkan kesetaraan sempurna yang berarti seluruh penduduk memiliki pengeluaran per kapita yang sama. Sedangkan Koefisien Gini bernilai 1 (satu) menunjukkan ketimpangan sempurna yang berarti hanya satu penduduk saja yang memiliki pengeluaran per kapita dan yang lainnya tidak sama sekali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi Koefisien Gini, semakin tinggi tingkat ketimpangan suatu daerah.

Adapun koefisien gini Kota Subulussalam dalam kurun waktu 2015 – 2021 dapat dilihat dalam gambar berikut:

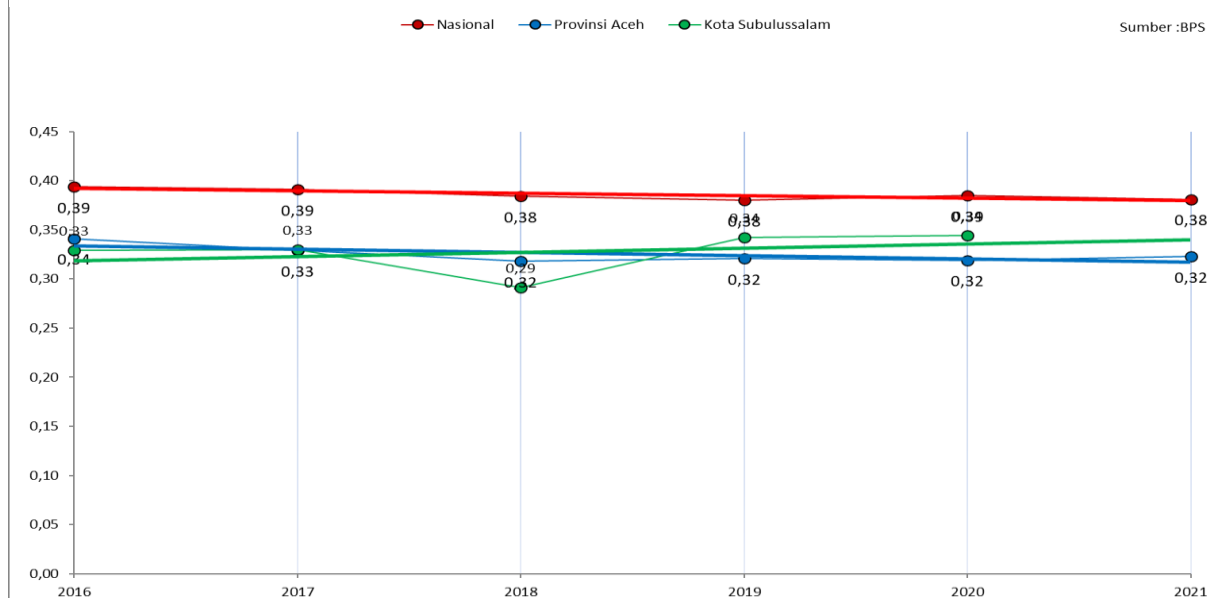
Gambar 3.10 Koefisien Gini Kota Subulussalam Tahun 2017 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tahun 2015 – 2021 Koefisien Gini Kota Subulussalam cenderung fluktuatif mengalami penurunan dan kenaikan. Namun demikian, pada tahun 2021 Koefisien Gini Kota Subulussalam mengalami penurunan menjadi 0,333. Untuk mengetahui relevansi gini rasio Kota Subulussalam terhadap Aceh dan Nasional dari tahun 2016 sampai 2021, dapat dilihat dalam sajian gambar berikut:

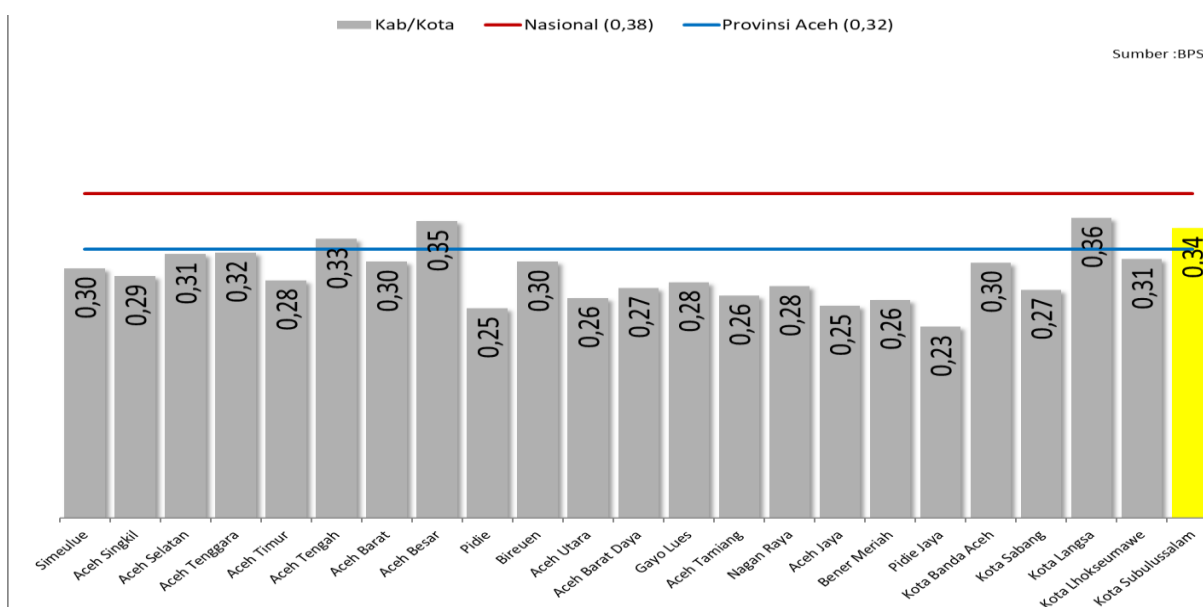
Gambar 3.11 Analisis Relevansi Rasio Gini Kota Subulussalam Tahun 2016-2021



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Sedangkan untuk posisi relatif gini rasio Kota Subulussalam dibandingkan dengan 23 Kab/Kota di Aceh pada tahun 2020 dapat dicermati dalam gambar berikut:

Gambar 3.12 Posisi Relatif Rasio Gini Kota Subulussalam Tahun 2020



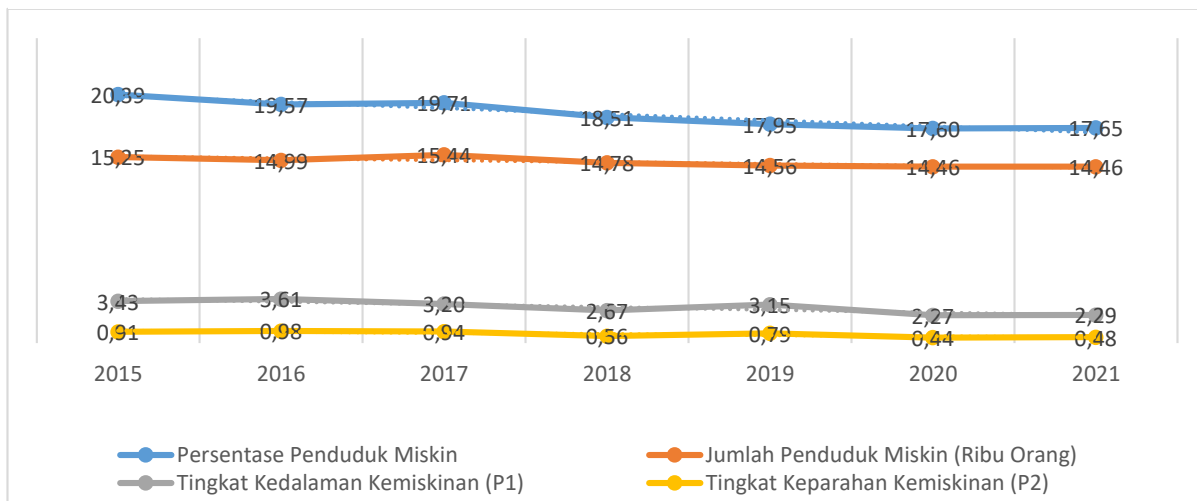
Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar tersebut, diketahui gini rasio Kota Subulussalam sebesar 0,34 berada diatas gini rasio Provinsi Aceh bersama 3 Kab/Kota lainnya dan berada dibawah garis gini rasio Nasional.

2.6. Capaian Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Kota Subulussalam

Kondisi Kemiskinan di Kota Subulussalam dalam kurun waktu tahun 2015-2021, dapat dicermati dalam sajian tabel berikut:

Tabel 2.17 Kondisi Kemiskinan di Kota Subulussalam Tahun 2015-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

BAB III PROFIL KEMISKINAN DAERAH

3.1. Indikator Kemiskinan Ekonomi/Konsumsi

Secara umum kemiskinan dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ke tidak-layakkan hidup menurut standar-standar tertentu, ketidakmampuan atau ke kurang-mampuan fisik manusia, ketiadaan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan. Banyak konsep dan pengukuran yang digunakan untuk mendefinisikan kemiskinan karena kemiskinan bersifat multidimensi dan kompleks. Konsep kemiskinan yang digunakan dalam dokumen RKPD ini adalah konsep kemiskinan menurut BPS.

Konsep kemiskinan menurut BPS adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). BPS mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran dikonseptualisasikan dengan garis kemiskinan). Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (GK).

GK merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. GK yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan garis kemiskinan non makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, di mana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM.

Indikator kemiskinan konsumsi ditunjukkan dengan persentase penduduk di bawah GK terhadap seluruh penduduk atau persentase penduduk miskin, indikator ini disebut head count index (P0), karakteristik penduduk di bawah garis kemiskinan juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan, artinya semakin sulit kemiskinan diturunkan. Nilai agregat dari indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*) menunjukkan biaya mengentaskan kemiskinan dengan membuat target transfer yang sempurna terhadap penduduk miskin dalam hal tidak adanya biaya transaksi dan faktor penghambat. Semakin kecil nilai indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*), semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program (BPS, 2003).

Selain itu kesenjangan antar penduduk miskin juga dapat dilihat dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), semakin tinggi nilai indeks menunjukkan semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin.

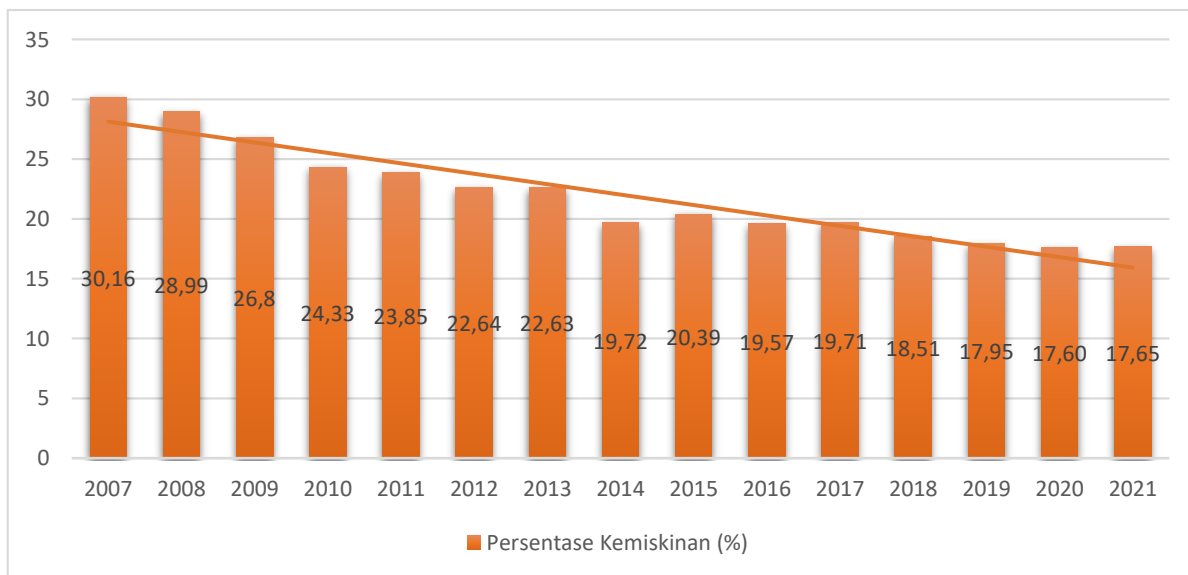
Menurut TNP2K, terdapat 5 kelompok indikator yang harus diperhatikan dalam melakukan analisis kondisi kemiskinan di suatu daerah, yaitu: 1.) Indikator Kemiskinan dan Ketenagakerjaan; 2.) Indikator Sektor Kesehatan; 3.) Indikator Sektor Pendidikan; 4.) Indikator Infrastruktur Dasar; dan 5.) Indikator Ketahanan Pangan. Selain dari kelima aspek/sector tersebut, akan di uraikan juga dalam dokumen RPKD ini aspek sosial atau penanganan perlindungan sosial di Kota Subulussalam.

Untuk memotret gambaran kondisi umum atau profil kemiskinan di Kota Subulussalam, sebagian besar data-data makro yang digunakan dalam dokumen RPKD ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) sedangkan data-data mikro yang digunakan berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam lingkungan Pemerintah Kota Subulussalam.

3.1.1. Persentase Penduduk Miskin (P0)

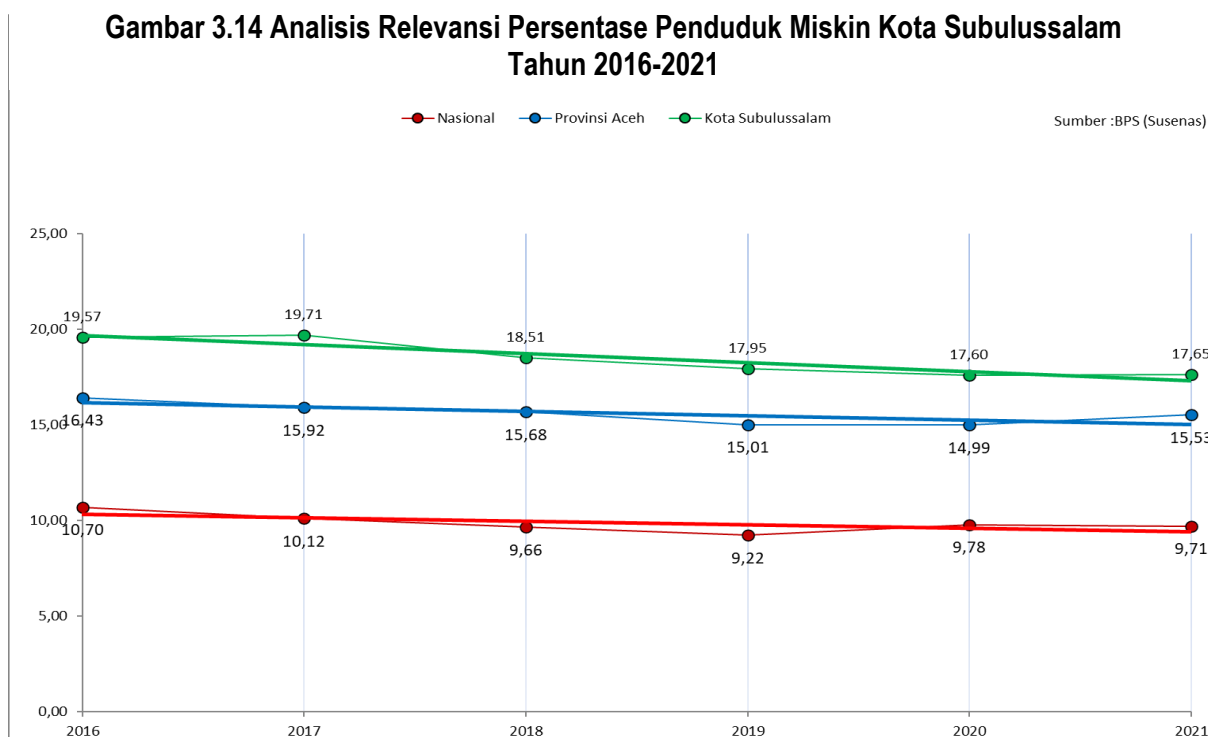
Perkembangan persentase penduduk miskin di Kota Subulussalam dalam 15 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2007 angka persentase kemiskinan Kota Subulussalam berada pada tingkat 30,16% dan cenderung menurun sampai pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 persentase kemiskinan Kota Subulussalam mengalami kenaikan sebesar 0,05%. Kenaikan yang terjadi dipengaruhi oleh efek pandemi Covid-19. Perkembangan persentase penduduk miskin dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 3.13 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Subulussalam Tahun 2007 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin di Kota Subulussalam secara linier mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan relevansi persentase penduduk miskin Kota Subulussalam terhadap persentase penduduk miskin provinsi dan nasional dapat dicermati dalam gambar berikut:

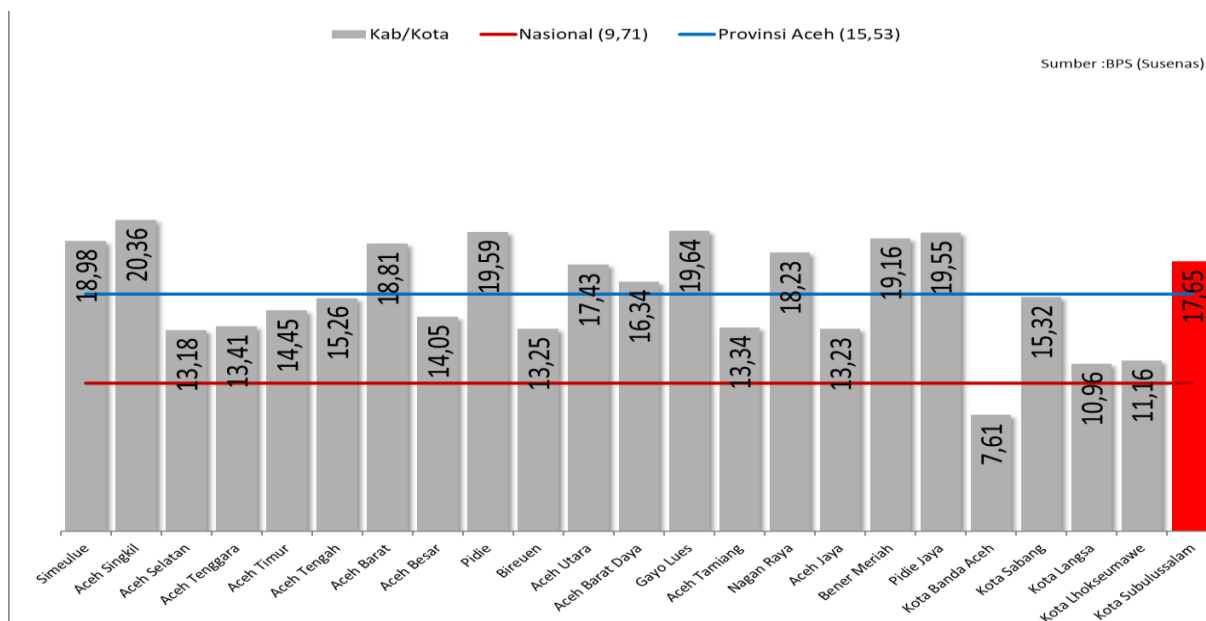


Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, terlihat kurva pergerakan persentase penduduk miskin di Kota Subulussalam cenderung mengalami pergerakan yang sama pada kurva persentase penduduk miskin di Provinsi Aceh dan Nasional. Pada tahun 2017 angka persentase kemiskinan Kota Subulussalam mengalami peningkatan disaat angka kemiskinan Provinsi dan Nasional mengalami penurunan. Sedangkan pada rentang tahun 2018 – 2020 pergerakan angka persentase kemiskinan Kota Subulussalam Bersama-sama dengan persentase kemiskinan Provinsi dan Nasional mengalami penurunan. Namun, pada tahun 2021 pergerakan persentase penduduk miskin Kota Subulussalam dan Provinsi mengalami peningkatan disaat persentase penduduk miskin Nasional mengalami penurunan. Dari gambar diatas juga, dapat diketahui bahwa penurunan persentase penduduk miskin di Kota Subulussalam, mempengaruhi persentase penduduk miskin Provinsi dan Nasional.

Kemudian, perbandingan posisi persentase penduduk miskin antar Kab/Kota di Aceh, dapat dicermati dalam gambar berikut:

Gambar 3.15 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Subulussalam Tahun 2021



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, diketahui posisi persentase penduduk miskin Kota Subulussalam berada diatas garis persentase penduduk miskin Provinsi dan Nasional Bersama dengan 10 Kab/Kota lainnya dari 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh.

3.1.2. Jumlah Penduduk Miskin

Jumlah penduduk ialah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk miskin Kota Subulussalam dapat dilihat sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.16 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Subulussalam Tahun 2007 –



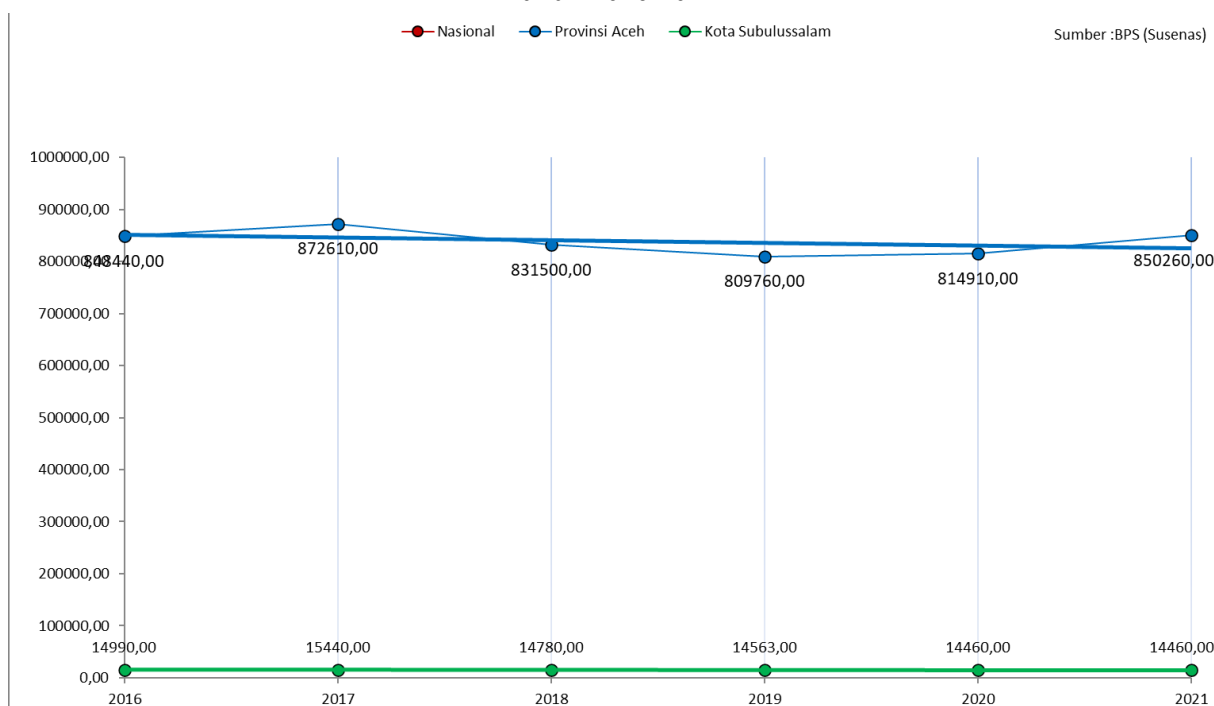
Sumber: Badan Pusat Statistik

Jika dibandingkan kurva pada Gambar 3.1 dan kurva Gambar 3.2 ditemui pergerakan kurva gambar yang sama. Pada rentang tahun 2015-2017 mengalami fluktuasi dan mengalami penurunan

pada rentang tahun 2017 – 2021. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin berjumlah 14,46 ribu penduduk.

Sedangkan perkembangan relevansi jumlah penduduk miskin di Kota Subulussalam terhadap jumlah penduduk miskin Provinsi Aceh rentang tahun 2016 – 2021 dapat dicermati dalam gambar

Gambar 3.17 Analisis Relevansi Jumlah Penduduk Miskin Kota Subulussalam Tahun 2016-2021



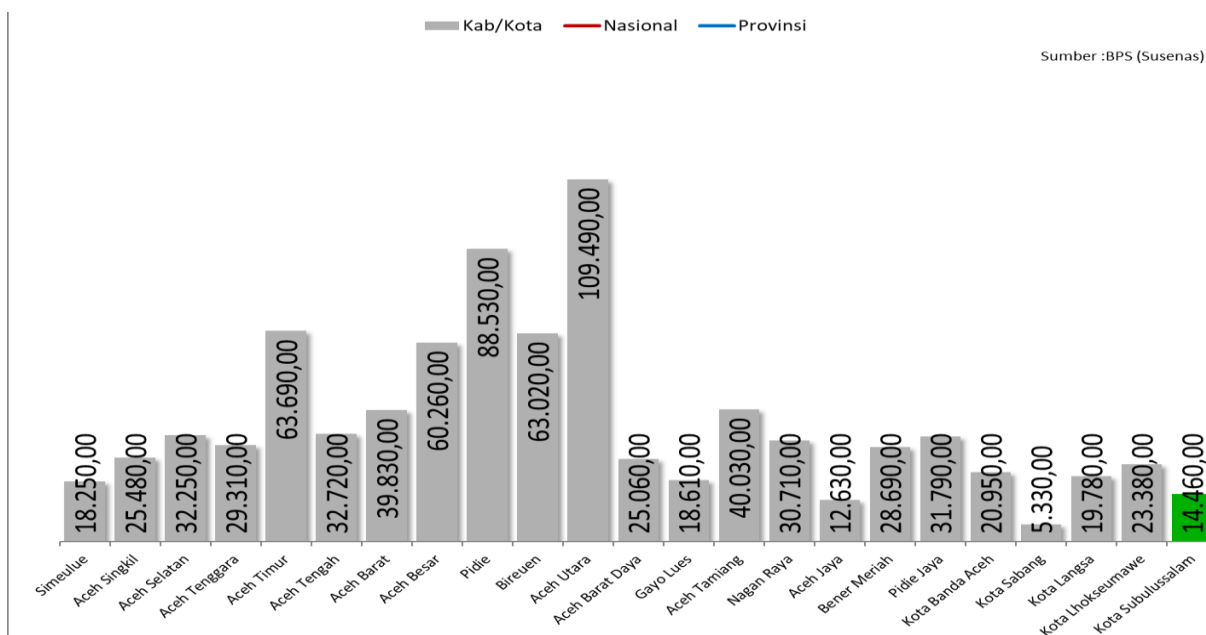
berikut:

Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Sama halnya dengan persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin di Kota Subulussalam juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Aceh. Pada tahun 2018 ke 2019 jumlah penduduk miskin di Kota Subulussalam mengalami penurunan dan jumlah penduduk miskin di Aceh juga mengalami penurunan. Kemudian jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 ke 2020 di Kota Subulussalam mengalami peningkatan, jumlah penduduk miskin di Provinsi Aceh juga mengalami

peningkatan. Sedangkan posisi penduduk miskin di Kota Subulussalam jika di bandingkan dengan 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh, dapat dicermati dalam gambar berikut:

Gambar 3.18 Analisis Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kota Subulussalam Tahun 2021



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa posisi jumlah penduduk miskin di Kota Subulussalam pada tahun 2021, menempati posisi ketiga terendah jumlah penduduk miskin dari 23 Kab/Kota yang ada di Provinsi Aceh.

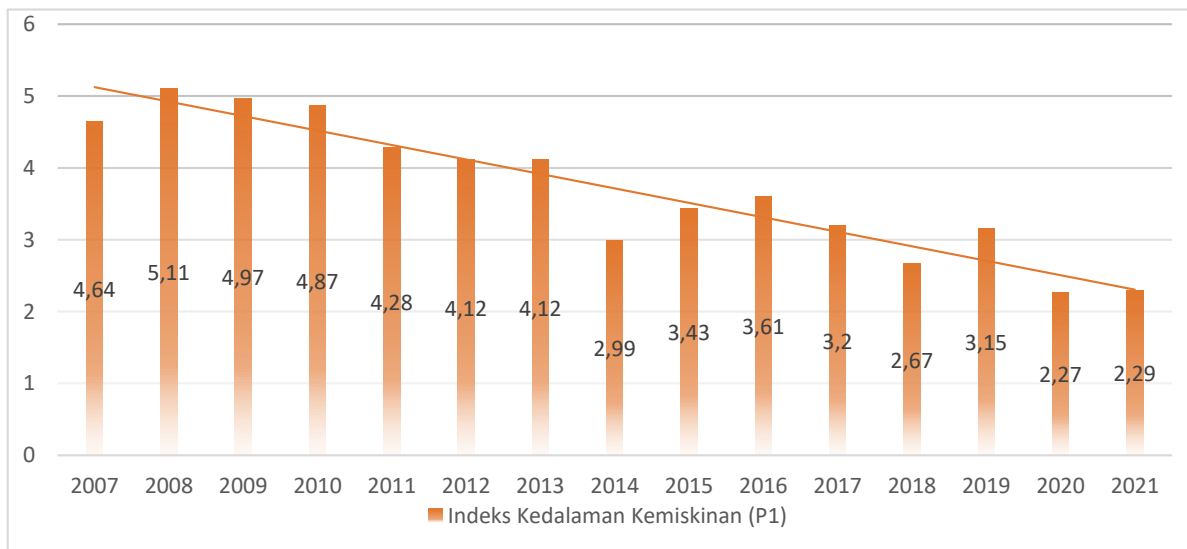
3.1.3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

Tingkat kedalaman kemiskinan di Kota Subulussalam digambarkan oleh angka indeks kedalaman kemiskinan (P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap batas kemiskinan (P1), maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Dalam kurun waktu 2007 – 2021, indeks kedalaman kemiskinan Kota Subulussalam mengalami penurunan. Pada tahun 2007 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 4,46 dan mengalami penurunan sampai pada tahun 2020 menjadi sebesar 2,27. Namun, mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,02 pada tahun 2021.

Adapun indeks kedalaman kemiskinan Kota Subulussalam pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, dapat dilihat dalam gambar berikut:

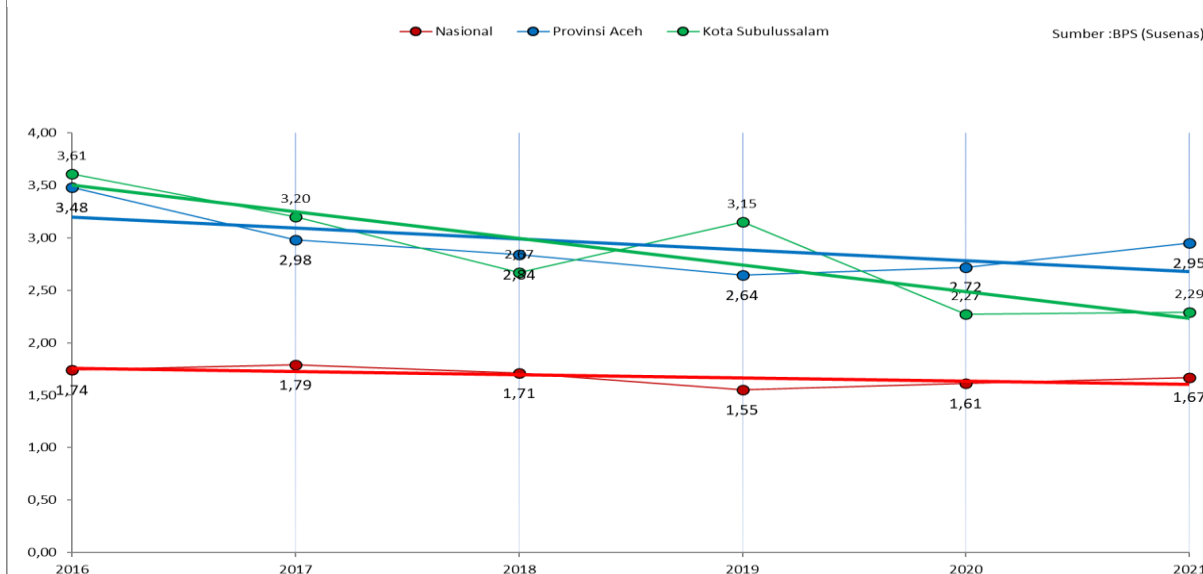
Gambar 3.19 Perkembangan Tingkat Kedalaman Kemiskinan di Kota Subulussalam Tahun 2007 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2021, indeks kedalaman kemiskinan Kota Subulussalam sebesar 2,29. Artinya, terjadi kesenjangan pengeluaran penduduk miskin sebesar 2,29% dengan batas garis kemiskinan di Kota Subulussalam. Terjadinya penurunan Tingkat Kedalaman Kemiskinan dari waktu ke waktu menunjukkan adanya perbaikan penanggulangan kemiskinan di Kota Subulussalam. Sedangkan relevansi perkembangan indeks kedalaman kemiskinan Kota Subulussalam terhadap indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Aceh dan Nasional dapat dicermati dalam gambar berikut:

Gambar 3.20 Analisis Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Subulussalam Tahun 2016-2021

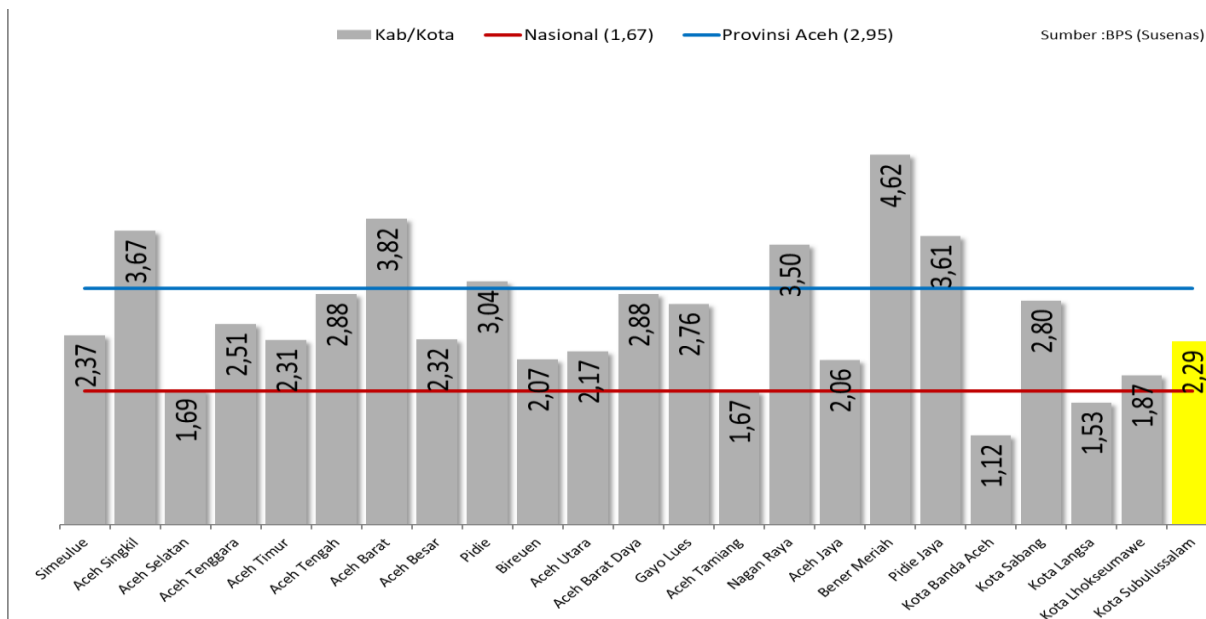


Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Pada tahun 2020 ke 2021, indeks kedalaman kemiskinan Kota Subulussalam, Provinsi Aceh dan Nasional sama-sama mengalami kenaikan yaitu: 2,27 ke 2,29 untuk Kota Subulussalam, 2,72 ke 2,95 untuk Aceh dan 1,61 ke 1,67 untuk nasional.

Sedangkan posisi relatif indeks kedalaman kemiskinan Kota Subulussalam dengan 23 Kab/Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2021, dapat dicermati dalam gambar berikut:

Gambar 3.21 Analisis Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Subulussalam Tahun 2021



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Posisi indeks kedalaman kemiskinan Kota Subulussalam pada tahun 2021 berada diatas posisi indeks kedalaman kemiskinan Nasional bersama 18 Kab/Kota lainnya dan berada dibawah indeks kedalaman kemiskinan Aceh bersama 16 Kab/Kota lainnya.

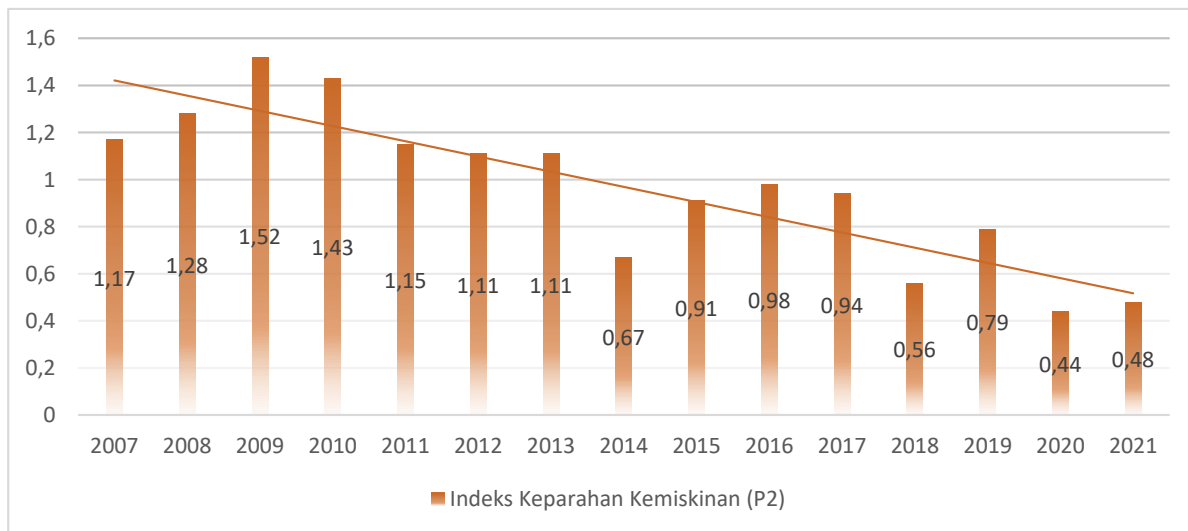
3.1.4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Tingkat Keparahan Kemiskinan adalah jumlah dari kuadrat selisih (dalam persen terhadap garis kemiskinan) rata-rata antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Jumlah seluruh populasi digunakan untuk menghitung rata-rata dengan menganggap selisih sama dengan 0 (nol) bagi penduduk yang berada yang berada di atas garis kemiskinan. Dengan melakukan pengkuadratan, indeks ini memberi bobot yang lebih besar bagi penduduk miskin yang memiliki pengeluaran jauh dibawah garis kemiskinan. Serupa dengan Tingkat Kedalaman Kemiskinan, perkembangan Tingkat Keparahan Kemiskinan yang mengalami penurunan dari waktu ke waktu dan semakin kecil menunjukkan adanya perbaikan dalam penanganan kemiskinan.

Sama halnya dengan pergerakan kurva persentase kemiskinan dan jumlah penduduk miskin di Kota Subulussalam, pada kurva Tingkat Kedalaman Kemiskinan dan Tingkat Keparahan Kemiskinan pun mengalami pergerakan yang sama dan seirama.

Adapun perkembangan tingkat keparahan kemiskinan di Kota Subulussalam di Kota Subulussalam pada tahun 2007 – 2021, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.22 Tingkat Keparahhan Kemiskinan di Kota Subulussalam Tahun 2007 – 2021

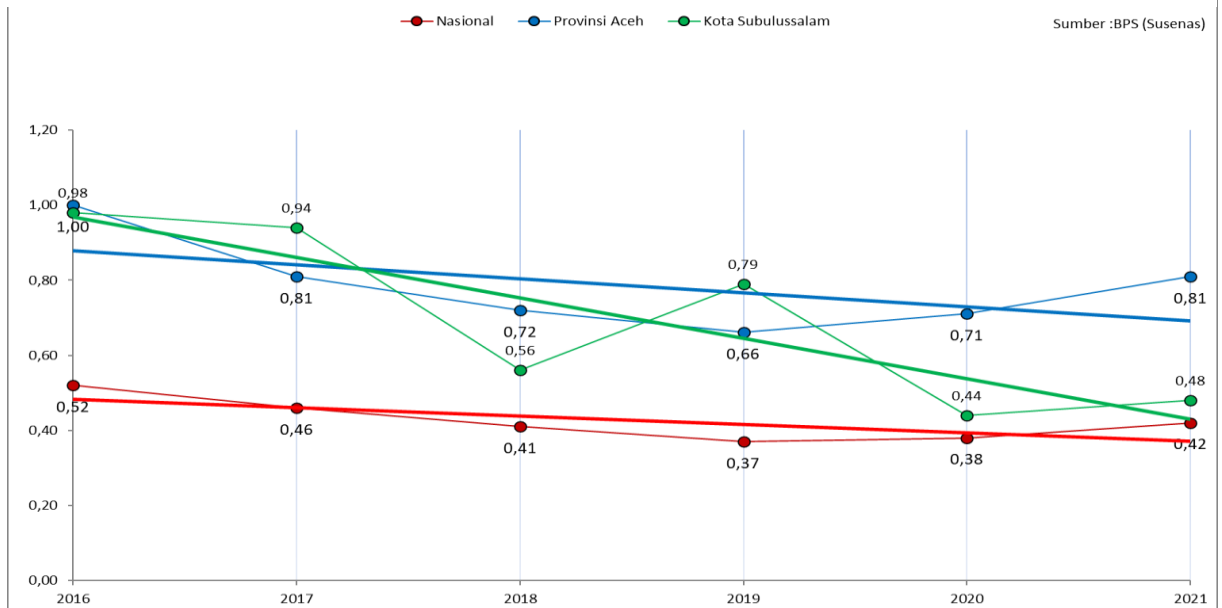


Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Keparahhan Kemiskinan di Kota Subulussalam mengalami fluktuasi dan cenderung menurun dari waktu ke waktu. Pada tahun 2021, Tingkat Keparahhan Kemiskinan menurun sebesar 0,43 dari tahun dasar pada 2015 dengan angka sebesar 0,91. Terjadinya penurunan Tingkat Keparahhan Kemiskinan di Kota Subulussalam menjadi 0,48 pada tahun 2021 menunjukkan adanya perbaikan penanggulangan kemiskinan yang efektif di Kota Subulussalam.

Tingkat keparahan kemiskinan Kota Subulussalam pada tahun 2021 meningkat menjadi 0,48 dari 0,44 dan tingkat keparahan kemiskinan Provinsi Aceh serta Nasional juga sama-sama mengalami peningkatan, masing-masing: 0,71 menjadi 0,81 untuk Aceh dan 0,38 menjadi 0,42 untuk tingkat keparahan kemiskinan Nasional. Hal tersebut dan perkembangan relevansi tingkat keparahan Kota Subulussalam rentang tahun 2016 sampai 2021 dapat dicermati dalam gambar berikut:

Gambar 3.23 Analisis Relevansi Persentase Penduduk Miskin Kota Subulussalam Tahun 2016-2021

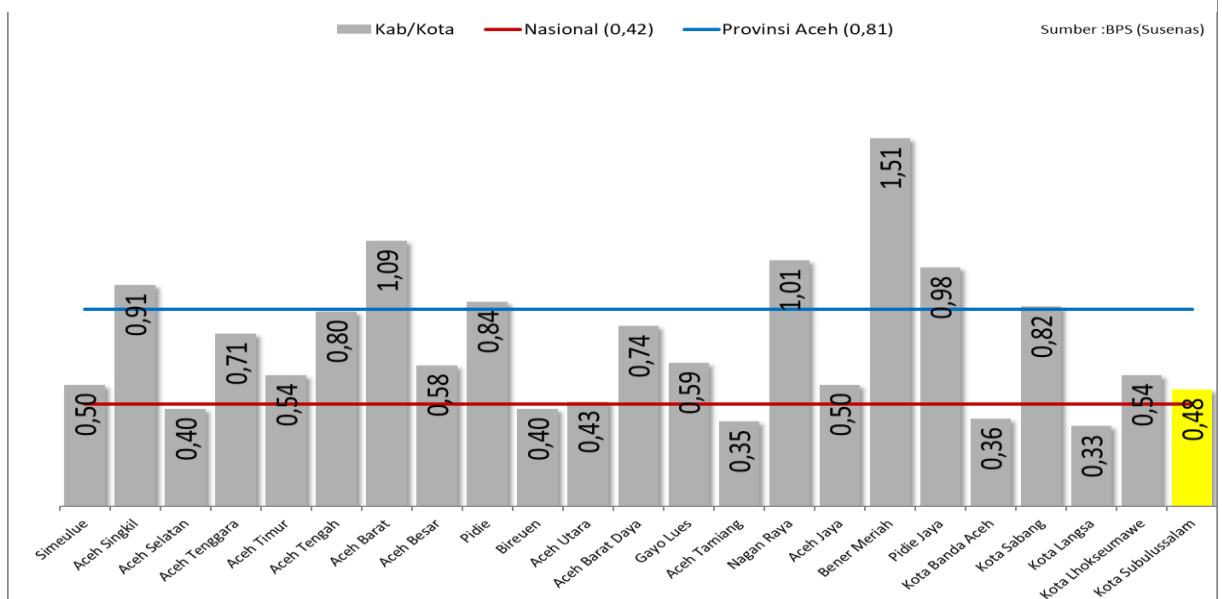


Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Sedangkan untuk posisi relatif indeks keparahan kemiskinan Kota Subulussalam dibandingkan dengan 23 Kab/Kota di Aceh pada tahun 2021, dapat dicermati dalam gambar berikut:

Pada tahun 2021, tingkat keparahan kemiskinan Kota Subulussalam berada diatas tingkat keparahan kemiskinan nasional bersama 17 Kab/Kota lainnya dan berada dibawah tingkat keparahan kemiskinan Aceh bersama 16 kab/Kota lainnya.

Gambar 3.24 Analisis Posisi Relatif Indeks Keparahhan Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2016-2021



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

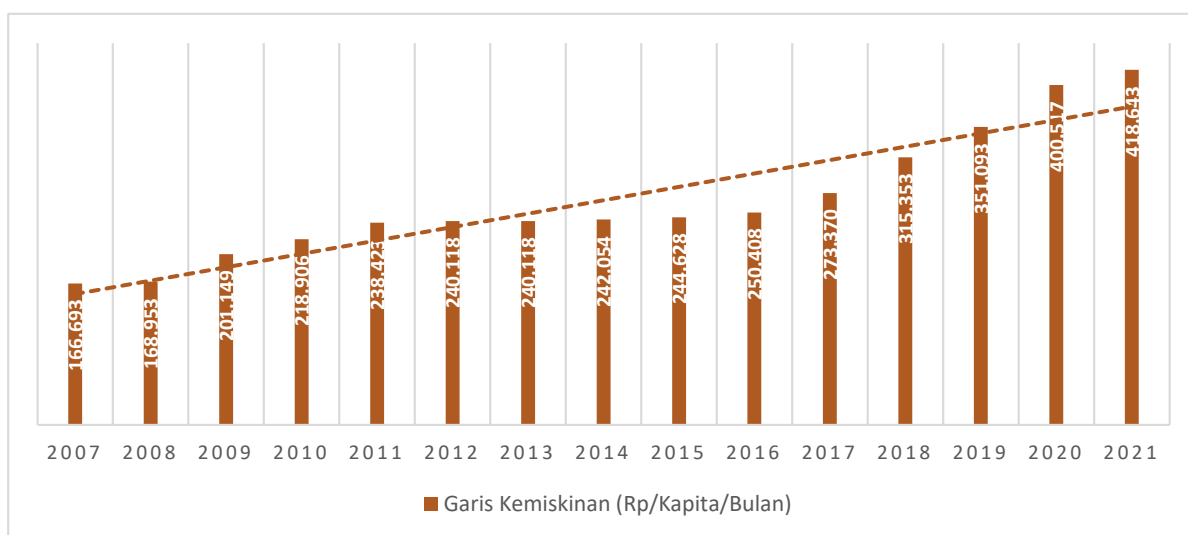
3.1.5. Garis Kemiskinan (GK)

Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah Rupiah minimum yang dibutuhkan per orang untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan non makanan. Dalam kurung waktu 2007 – 2021 terjadi kenaikan atau peningkatan garis kemiskinan di Kota Subulussalam. Peningkatan garis kemiskinan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan harga-harga bahan pokok makanan dan non makanan di Kota Subulussalam.

Dengan tahun dasar 2007, Garis Kemiskinan Kota Subulussalam sebesar Rp. 166.693 per kapita per bulan dan setiap tahunnya terus mengalami kenaikan seiring dengan tingkat inflasi di Kota Subulussalam (acuan perhitungan laju inflasi Kota Subulussalam yaitu Meulaboh) yang terus meningkat sehingga mempengaruhi Garis Kemiskinan di kota Subulussalam. Pada tahun 2021, Garis Kemiskinan Kota Subulussalam yaitu sebesar Rp. 418.643 per kapita per bulan.

Adapun gambaran perkembangan Garis Kemiskinan di Kota Subulussalam tahun 2007 – 2021 dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 3.25 Garis Kemiskinan di Kota Subulussalam Tahun 2007 – 2021

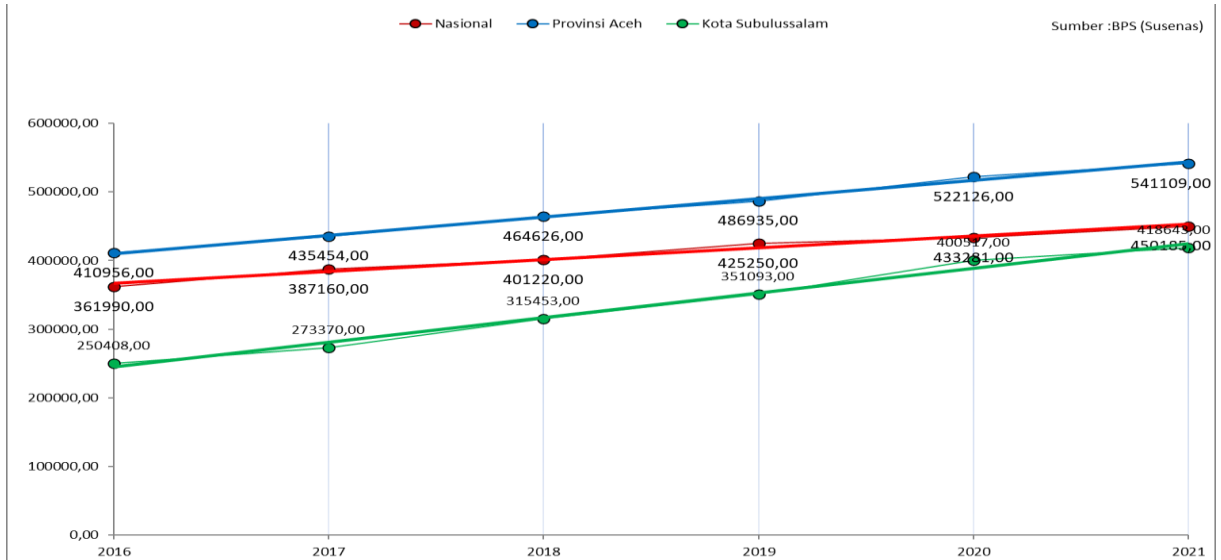


Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2021, Garis Kemiskinan Kota Subulussalam yaitu sebesar Rp. 418.643 per kapita per bulan. Artinya, setiap individu di Kota Subulussalam minimal membutuhkan Rp. 418.643 untuk memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non makanan.

Perkembangan garis kemiskinan Kota Subulussalam yang terus meningkat dari tahun ke tahun, relevan dengan perkembangan garis kemiskinan Aceh dan Nasional yang juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dicermati dalam gambar berikut:

Gambar 3.26 Analisis Relevansi Garis Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2016-2021

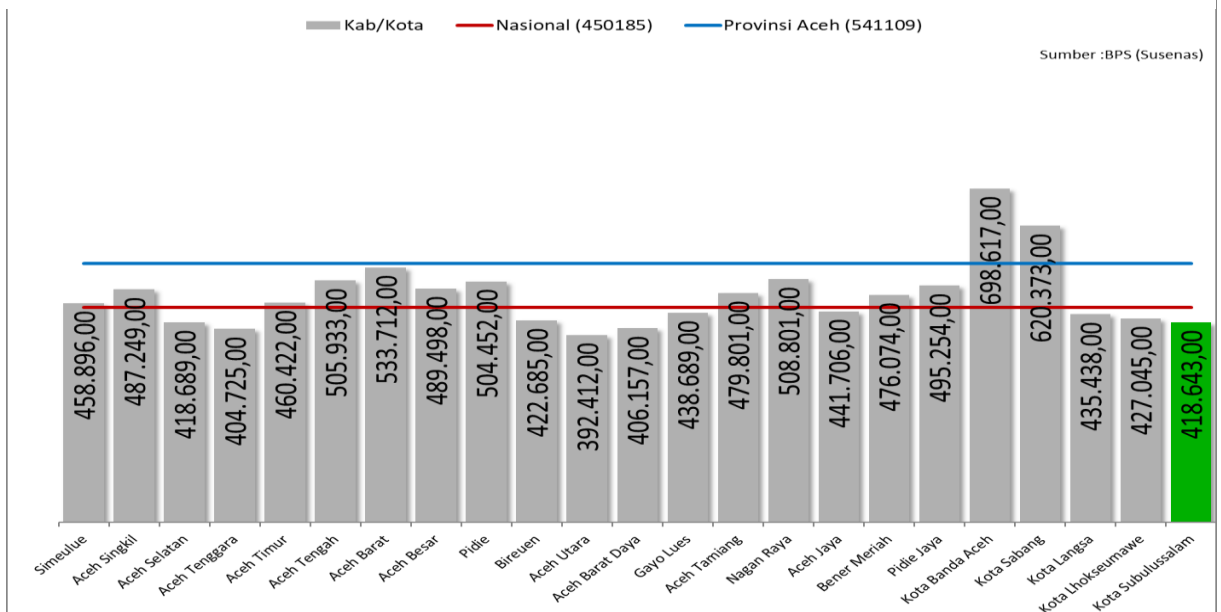


Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, diketahui bahwa terjadi peningkatan garis kemiskinan dari tahun 2016 sampai 2021 baik di Kota Subulussalam maupun ditingkat Provinsi dan Nasional. Sedangkan posisi garis kemiskinan Kota Subulussalam dibandingkan dengan 23 Kab/Kota di Aceh pada tahun 2021 dapat dicermati dalam gambar berikut:

Dari gambar diatas, terlihat bahwa garis kemiskinan Kota Subulussalam berada dibawah garis kemiskinan Provinsi dan Nasional bersama 10 Kab/Kota lainnya pada tahun 2021.

Gambar 3.27 Analisis Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2021



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

3.2. Analisis Karakteristik Masalah Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan gambaran aktivitas masyarakat dalam mencapai kesejahteraan dan kelancaran perekonomian. Ketenagakerjaan merupakan aspek penting, tidak hanya untuk mencapai kepuasan individu, tetapi juga memenuhi kebutuhan perekonomian rumah tangga dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Indikator ketenagakerjaan merupakan indikator penting dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan baik di bidang ekonomi maupun bidang sosial. Indikator ketenagakerjaan misalnya dapat memberikan tentang daya serap ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk dan produktivitas tenaga kerja yang ada. Apabila perekonomian tidak dapat menyerap pertumbuhan tenaga kerja yang ada, maka tentu saja akan terjadi peningkatan pengangguran yang selanjutnya dapat mengakibatkan masalah-masalah sosial seperti kemiskinan.

3.2.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua permasalahan yang berkaitan. Pengangguran dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial lainnya. Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Dari gambar berikut dapat diketahui besaran persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran dan Menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (supply) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak ter manfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi, perubahan siklus bisnis dan teknologi, dan lain-lainnya.

Berikut perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Subulussalam tahun 2015 – 2021:

Gambar 3.28 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Subulussalam Tahun 2015-2021

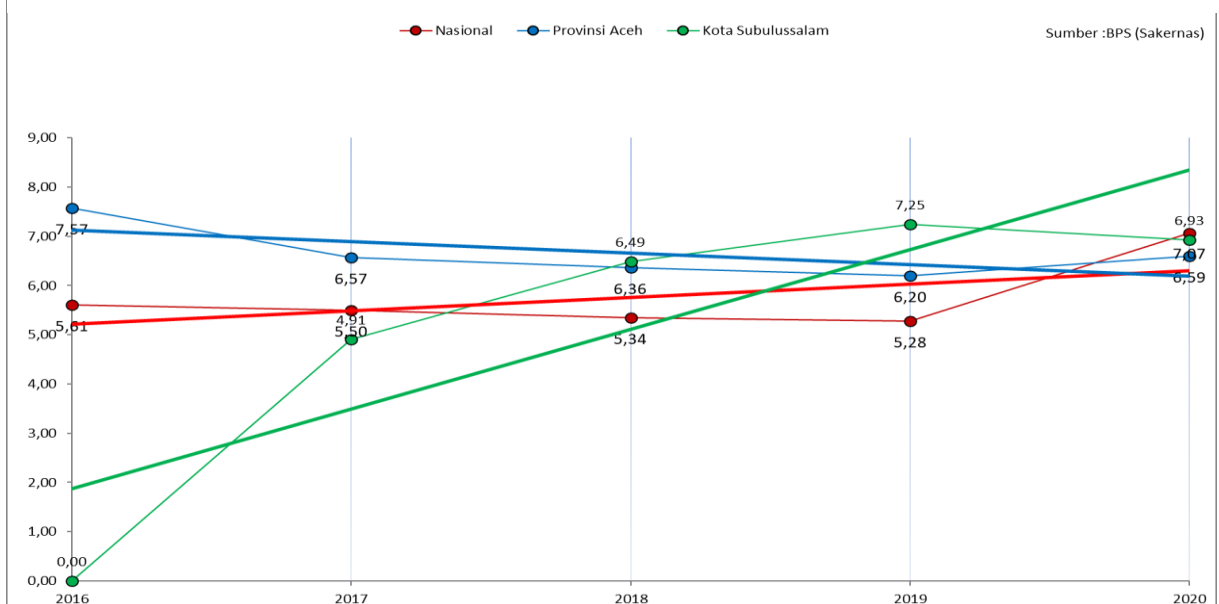


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar di atas, diketahui Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Subulussalam cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015 TPT Kota Subulussalam sebesar 8,24 turun menjadi 4,91 pada tahun 2017 sempat mengalami kenaikan pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing sebesar 4,91 dan 7,25 dan kemudian mampu diturunkan pada tahun 2020 dan 2021 masing-masing sebesar 6,59 dan 6,26.

Adapun relevansi perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kota Subulussalam terhadap perkembangan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Aceh dan Nasional tahun 2016-2020 dapat dicermati dalam sajin gambar berikut:

Gambar 3.29 Analisis Relevansi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Subulussalam Tahun 2016 – 2020



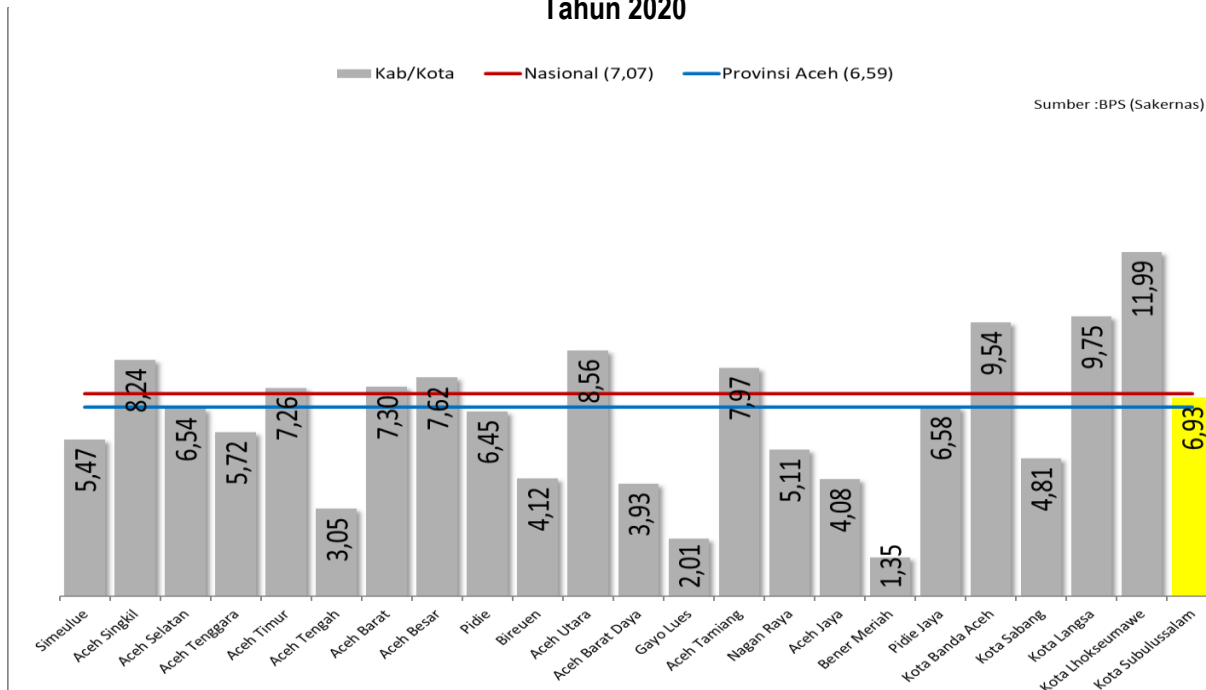
Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Secara trend, perkembangan tingkat pengangguran terbuka Kota Subulussalam meningkat dalam 4 (empat) tahun terakhir berbeda dengan tingkat pengangguran Aceh yang menurun dalam 4

tahun terakhir. Namun trend peningkatan tingkat pengangguran terbuka Kota Subulussalam mengalami kesamaan dengan tingkat pengangguran terbuka Nasional.

Sedangkan posisi tingkat pengangguran terbuka Kota Subulussalam dibandingkan dengan Kab/Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2020, dapat dicermati dalam sajian berikut:

Gambar 3.30 Analisis Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Subulussalam Tahun 2020



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

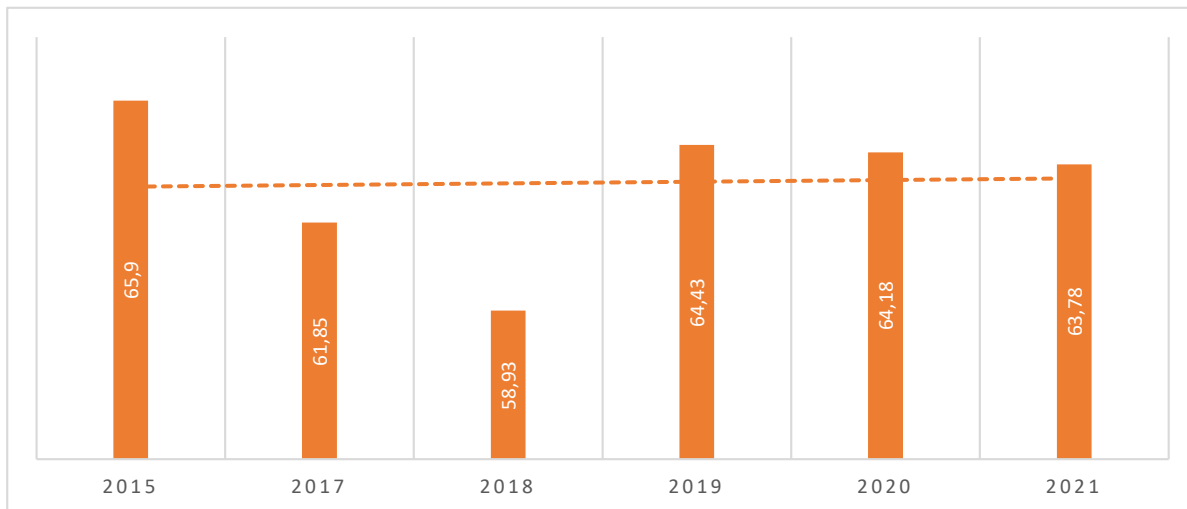
Dari sajian gambar tersebut, diketahui bahwa pada tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka Kota Subulussalam berada diatas tingkat pengangguran terbuka Aceh bersama 9 Kab/Kota lainnya dan berada dibawah tingkat pengangguran terbuka Nasional bersama 14 Kab/Kota lainnya.

3.2.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang merupakan angkatan kerja. Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah. Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Adapun perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari waktu ke waktu dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3.31 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Subulussalam Tahun 2015-2021

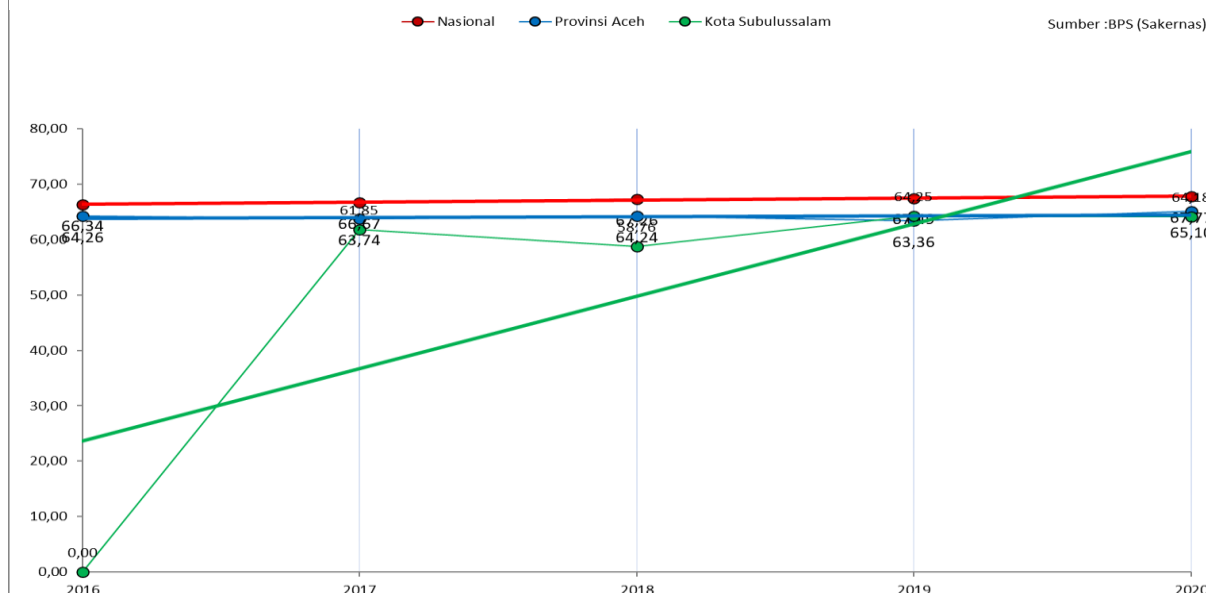


Sumber: Badan Pusat Statistik

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Subulussalam cenderung fluktuatif dan dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan namun tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2021 TPAP Kota Subulussalam sebesar 63,78.

Adapun relevansi perkembangan tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Subulussalam terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja Aceh dan Nasional dapat dicermati dalam gambar berikut:

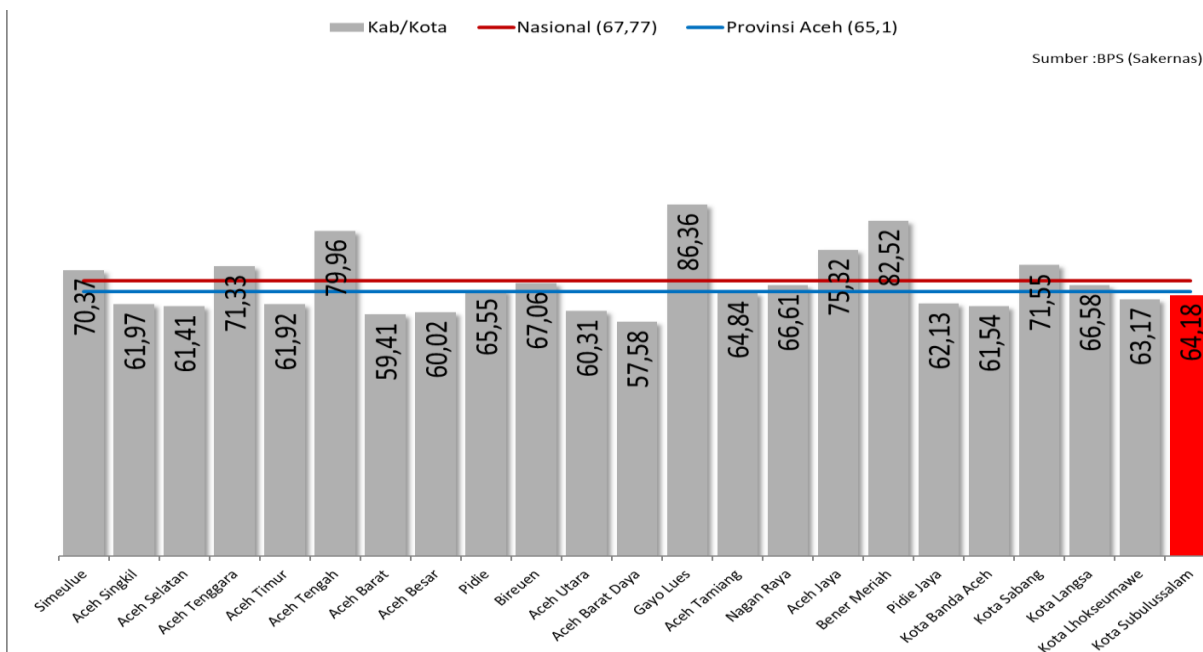
Gambar 3.32 Analisis Relevansi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Subulussalam Tahun 2016 - 2020



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa tren peningkatan tingkat partisipasi angkatan kerja yang terjadi pada level Nasional dan Provinsi juga terjadi di Kota Subulussalam. Sedangkan posisi relatif tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Subulussalam dibandingkan dengan Kab/Kota di Provinsi Aceh pada tahun 2020, sebagai berikut:

Gambar 3.33 Analisis Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Subulussalam Tahun 2020



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, dapat diketahui tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Subulussalam sebesar 64,18% pada tahun 2020 masih berada dibawah partisipasi angkatan kerja Provinsi dan Nasional bersama dengan 12 Kab/Kota lainnya.

3.3. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Kesehatan

Kemiskinan merupakan akar dari setiap persoalan kesehatan. Masyarakat miskin identik dengan lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat, perilaku dan kesadaran hidup sehat yang rendah, serta terbatasnya akses ke layanan kesehatan yang manusiawi. Semakin miskin dan kumuh sebuah komunitas masyarakat, bisa dipastikan derajat kesehatan mereka pun rendah, tak peduli mereka memiliki kartu berobat gratis atau tidak. Hal ini dikarenakan rendahnya kesadaran dan inisiatif hidup sehat mereka akibat kualitas sumber daya manusia rendah.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat miskin adalah dengan memperbaiki tingkat kesejahteraan. Semakin tingkat kesejahteraan masyarakat, akan semakin baik pula derajat kesehatan. Derajat kesehatan masyarakat dapat diketahui dari capaian Umur Harapan Hidup (UHH).

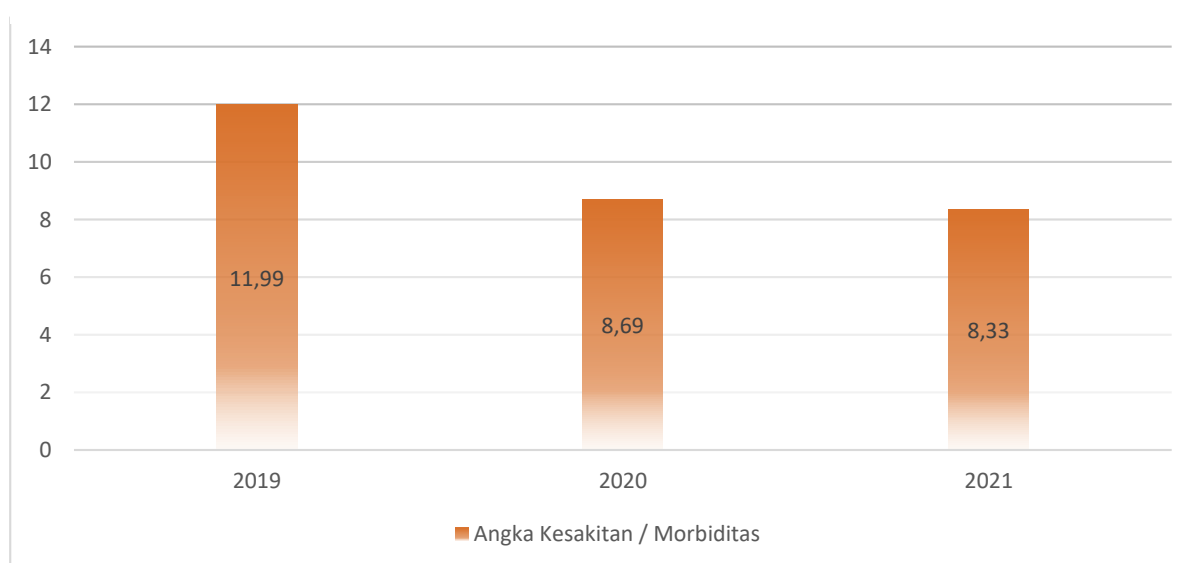
3.3.1. Angka Kesakitan (Morbidity Rate) / Tingkat Kesakitan

Angka Kesakitan/Morbiditas/Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan. Keluhan kesehatan adalah gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari.

Indikator ini dapat dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kesehatan masyarakat secara umum yang dilihat dari adanya keluhan yang mengindikasikan terkena suatu penyakit tertentu. Pengetahuan mengenai derajat kesehatan suatu masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan, yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah dan merata. Melalui upaya tersebut, diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik. Semakin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berarti semakin rendah derajat kesehatan dari masyarakat bersangkutan.

Adapun tingkat kesakitan di Kota Subulussalam dalam 3 (tiga) tahun terakhir dapat dilihat dalam gambar berikut:

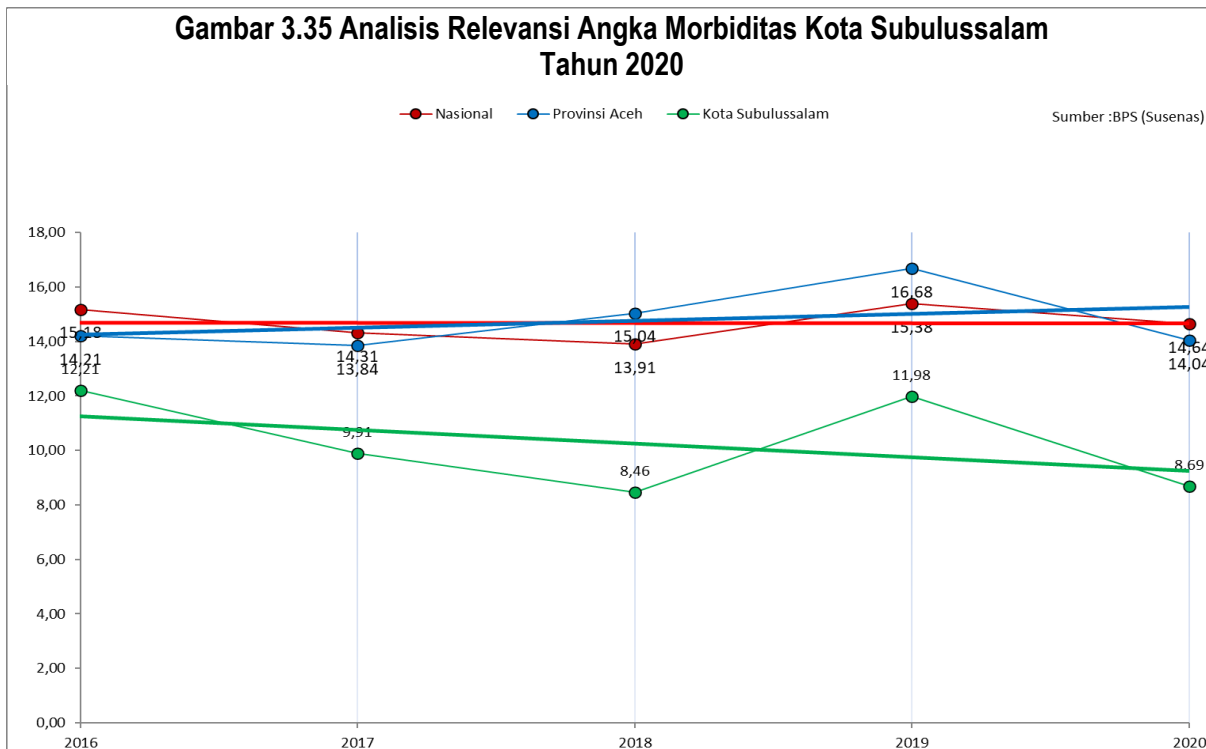
Gambar 3.34 Angka Kesakitan (Morbidity Rate) Kota Subulussalam 2019 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

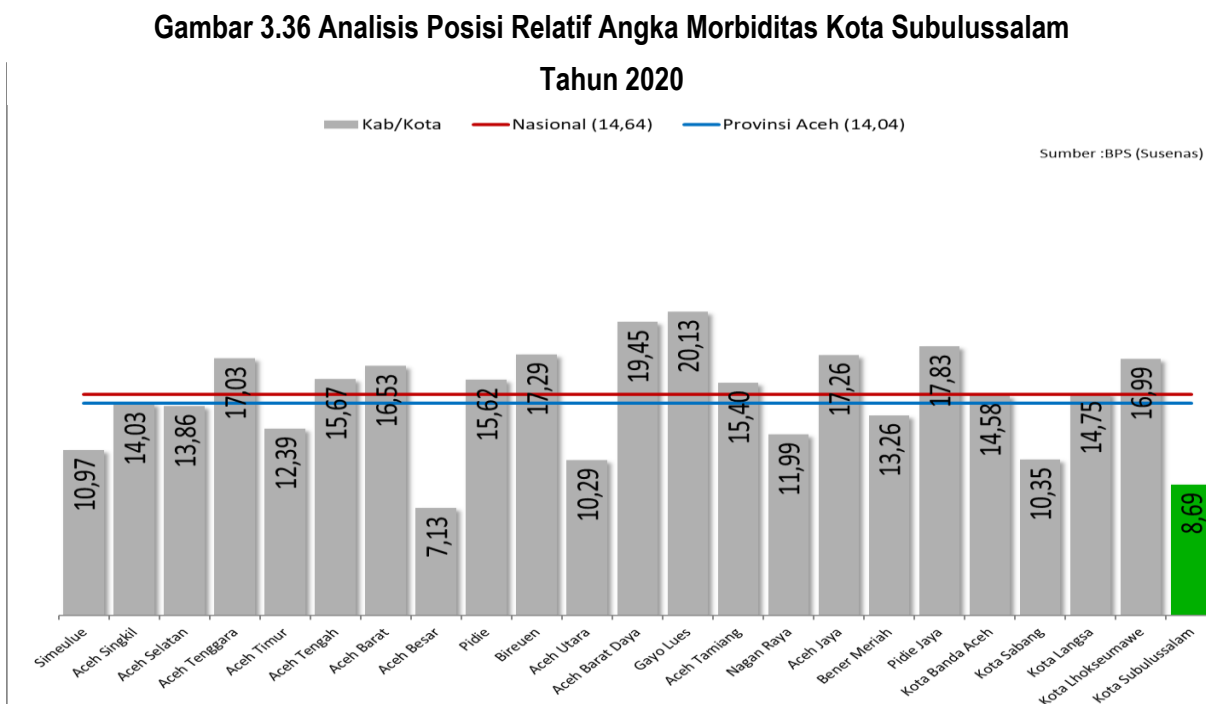
Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, angka kesakitan Angka Kesakitan (Morbidity Rate) mengalami penurunan. Pada tahun 2019 angka kesakitan sebesar 11,99 dan turun menjadi 8,69 pada tahun 2020 kemudian mengalami penurunan kembali pada tahun 2021 menjadi 8,33. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan dan kualitas kesehatan masyarakat di Kota Subulussalam.

Sedangkan relevansi perkembangan angka morbiditas di Kota Subulussalam terhadap perkembangan angka morbiditas Aceh dan Nasional dalam kurun tahun 2016 sampai 2020, dapat dicermati dalam sajian gambar berikut ini:



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Sedangkan posisi relatif angka morbiditas Kota Subulussalam dibandingkan dengan Kab/Kota di Aceh pada tahun 2020, sebagai berikut:



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

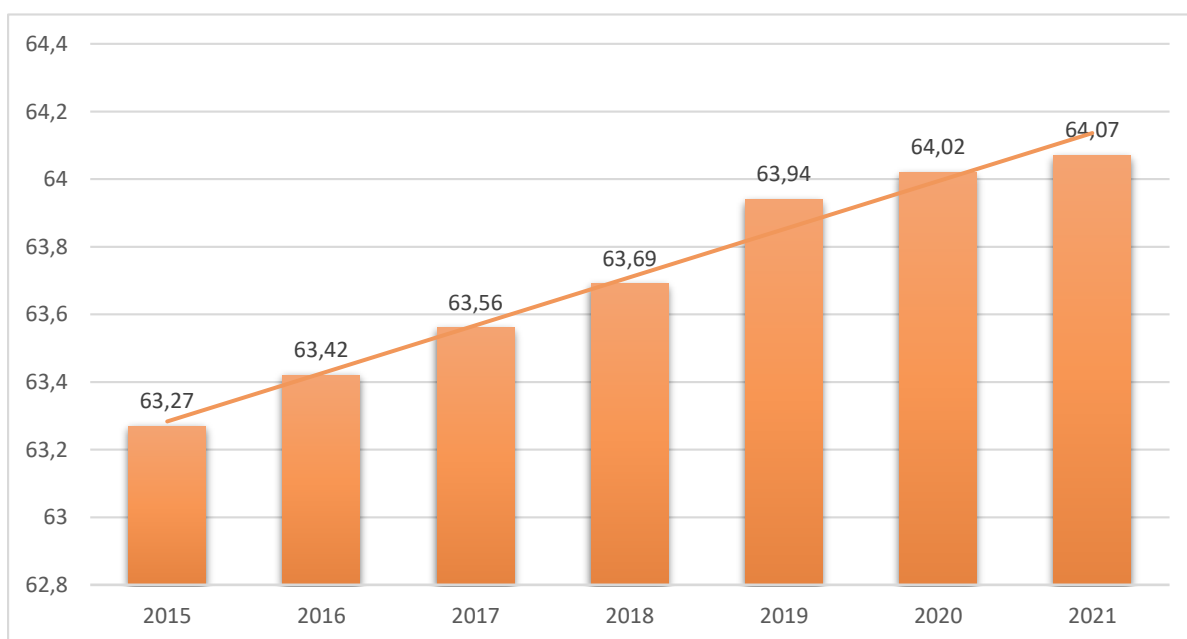
Dari sajian gambar diatas, dapat diketahui angka morbiditas Kota Subulussalam sebesar 8,69 pada tahun 2020, berada dibawah angka morbiditas Provinsi dan Nasional bersama dengan 10 Kab/Kota lainnya di Provinsi Aceh.

3.3.2. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup yang terhitung untuk Indonesia dari Sensus Penduduk tahun 1971 adalah 47,7 tahun, artinya bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1971 (periode 1967-1969) akan dapat hidup sampai 47 atau 48 tahun. Tetapi bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1980 mempunyai usia harapan hidup lebih panjang yakni 52,2 tahun, meningkat lagi menjadi 59,8 tahun untuk bayi yang dilahirkan menjelang tahun 1990, dan bayi yang dilahirkan tahun 2000 usia harapan hidupnya mencapai 65,5 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan bangsa Indonesia selama 30 tahun terakhir dari tahun 1970-an sampai tahun 2000.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Gambar 3.37 Angka Harapan Hidup Kota Subulussalam 2015 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Adapun perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Subulussalam dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Dari sajian gambar diatas, diketahui bahwa adanya tren peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Subulussalam yang ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Kota Subulussalam dalam rentang tahun 2015 – 2021.

Gambar 3.39 Analisis Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kota Subulussalam 2016– 2021



Adapun relevansi perkembangan angka harapan hidup Kota Subulussalam terhadap angka harapan hidup Provinsi Aceh dan Nasional dalam kurun waktu 2016-2021, sebagai berikut:

Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, diketahui bahwa sama-sama terjadi peningkatan angka harapan hidup baik di Kota Subulussalam maupun Provinsi Aceh dan Nasional dalam kurun tahun 2016 – 2021. Sedangkan posisi relatif angka harapan hidup Kota Subulussalam dibandingkan dengan Kab/Kota di Aceh pada tahun 2021 sebagai berikut:

Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, diketahui bahwa angka harapan hidup Kota Subulussalam pada tahun 2021 sebesar 64,07 tahun berada dibawah angka harapan hidup Aceh dan Nasional bersama 18 Kab/Kota lainnya di Provinsi Aceh.

3.3.3. Stunting

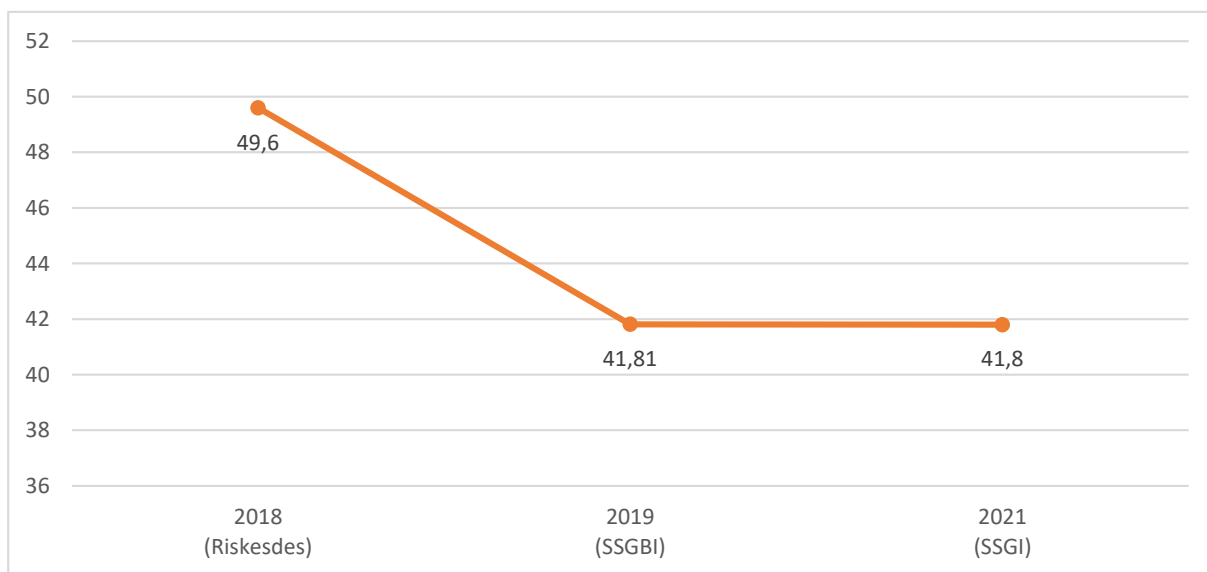
Kondisi tubuh anak yang pendek sering kali dikatakan sebagai faktor keturunan (genetik) dari kedua orang tuanya, sehingga masyarakat banyak yang hanya menerima tanpa berbuat apa-apa untuk

mencegahnya. Padahal seperti kita ketahui, genetika merupakan faktor determinan kesehatan yang paling kecil pengaruhnya bila dibandingkan dengan faktor perilaku, lingkungan (sosial, ekonomi, budaya, politik), dan pelayanan kesehatan. Dengan kata lain, stunting merupakan masalah yang sebenarnya bisa dicegah.

Indikator ini mengukur persentase anak balita yang tingginya dibawah ketinggian rata-rata penduduk acuan. Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat.

Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting. Dan perkembangan pencegahan Stunting di Kota Subulussalam dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3.40 Prevalensi Stunting Kota Subulussalam Tahun 2018-2021

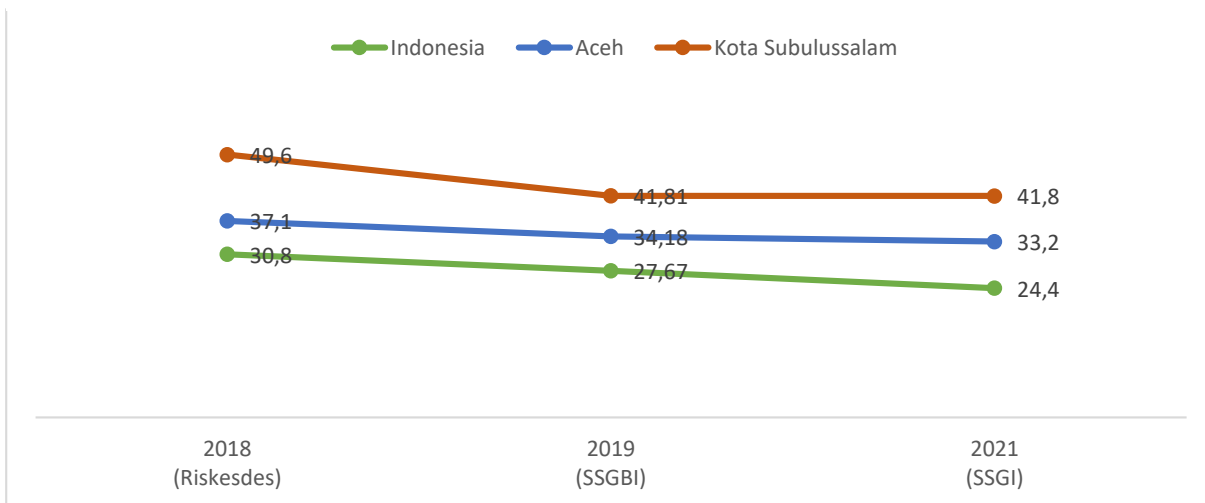


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar diatas, terlihat bahwa angka prevalensi stunting di Kota Subulussalam masih cukup tinggi. Namun demikian, ada penurunan angka prevalensi stunting yang terjadi di Kota Subulussalam. Pada tahun 2019 angka prevalensi stunting sebesar 41,81 dan terjadi penurunan sebesar 0,01 pada tahun 2021 menjadi 41,80.

Adapun relevansi perkembangan angka stunting di Kota Subulussalam terhadap angka Stunting Aceh dan Nasional dalam kurun tahun 2018 – 2021, sebagai berikut:

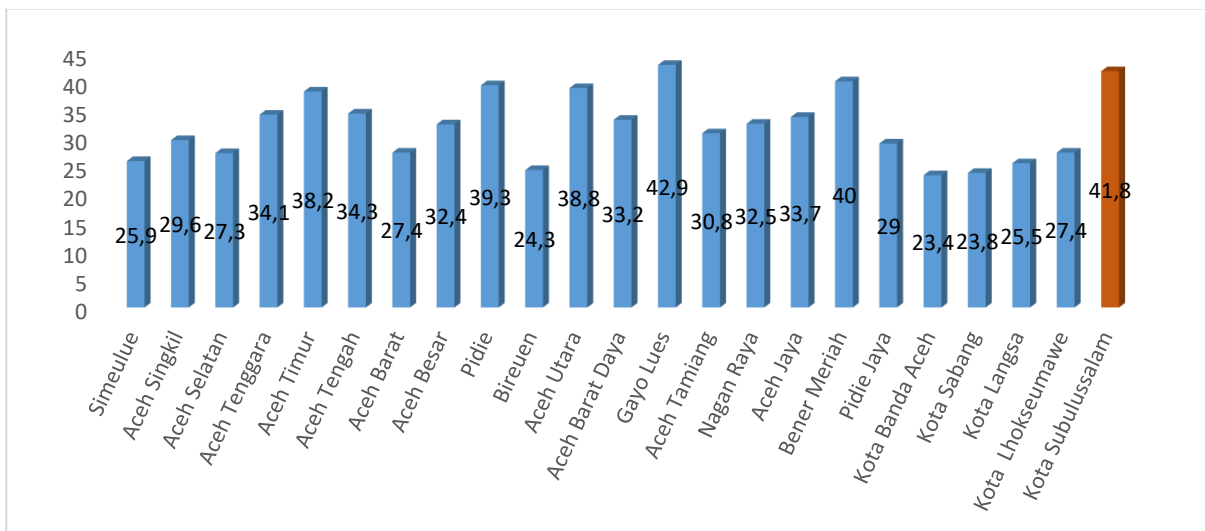
Gambar 3.41 Analisis Relevansi Prevalensi Stunting Kota Subulussalam Tahun 2018-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar diatas, diketahui bahwa sama-sama terjadi penurunan angka stunting baik di Kota Subulussalam maupun di Aceh dan Nasional. Sedangkan posisi relatif angka stunting Kota Subulussalam dibandingkan dengan Kab/Kota lainnya di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

Gambar 3.42 Analisis Posisi Relatif Prevalensi Stunting Kota Subulussalam Tahun 2018-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar diatas, diketahui bahwa angka stunting di Kota Subulussalam pada tahun 2021 adalah sebesar 41,8 dan merupakan yang tertinggi kedua di Provinsi Aceh. Kondisi ini menempatkan permasalahan stunting menjadi perhatian bersama untuk melakukan perbaikan.

3.4. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Pendidikan

Kemiskinan berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan muncul karena sumber daya manusia yang tidak berkualitas. Untuk itu menjadi penting pendidikan yang baik yang diperuntukkan bagi setiap orang sehingga diharapkan setiap orang memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan,

mempunyai pilihan untuk mendapat pekerjaan, dan menjadi lebih produktif sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas, menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan yang dimasuki, serta membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

Pemenuhan pendidikan sebagai hak warga negara harus segera dilakukan oleh pemberi layanan (negara), hal ini merupakan sasaran jangka pendek, yaitu agar setiap warga negara dipastikan mendapatkan pendidikan yang layak. Sejalan dengan itu, perbaikan akses pendidikan juga perlu dibarengi dengan perbaikan kualitas pendidikan, sehingga pada akhirnya dalam jangka panjang pendidikan menjadi salah satu pilar perbaikan sumber daya manusia dan perbaikan kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator yang digunakan untuk menggambarkan kondisi keterkaitan kemiskinan dan pendidikan di Kota Subulussalam, yaitu rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, serta angka partisipasi baik angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar.

3.4.1. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi anak sekolah pada suatu kelompok tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. APM selalu lebih rendah dibanding APK karena pembilangnya lebih kecil sementara penyebutnya sama.

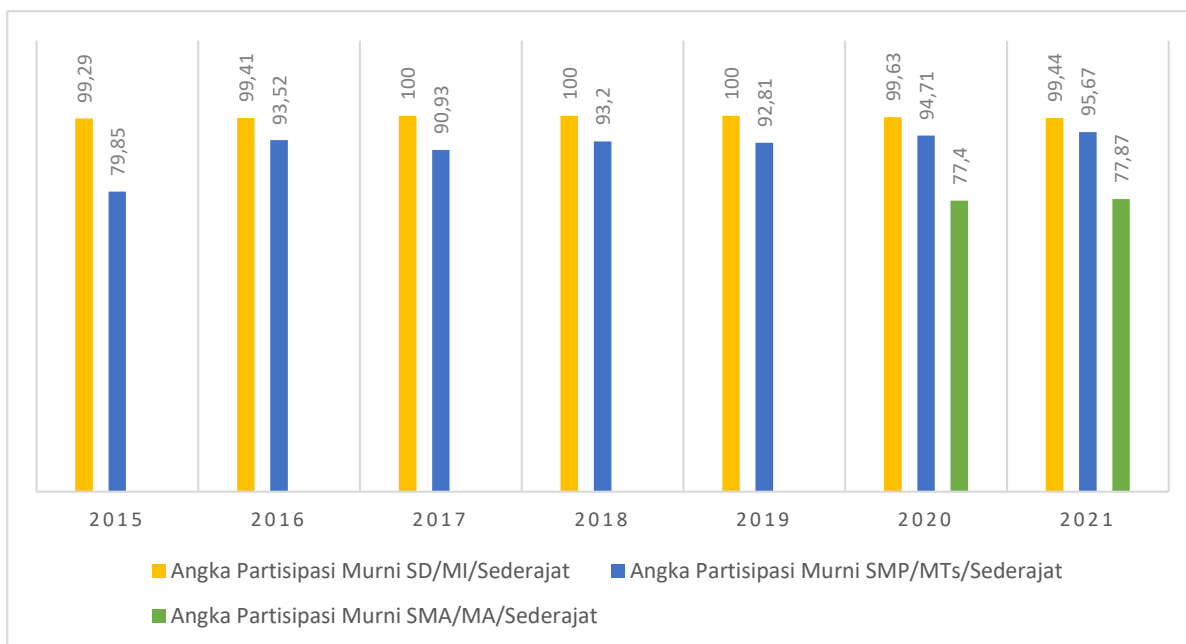
Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian.

Angka Partisipasi Murni (APM) bertujuan Untuk menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah tepat waktu, atau menunjukkan seberapa besar penduduk yang bersekolah dengan umur yang sesuai dengan ketentuan kelompok usia sekolah di jenjang pendidikan yang sedang ditempuh.

Nilai APM berkisar antara 0-100. APM menunjukkan seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen. Secara umum, APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk di luar usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan.

Adapun Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Kota Subulussalam, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Gambar 3.43 Angka Partisipasi Murni Kota Subulussalam 2015 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar di atas, diketahui Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Kota Subulussalam tahun 2015 – 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 APM SD/MI sebesar 99,44 sedangkan APM SMP/MTs sebesar 95,67 dan APM SMA/MA sebesar 77,87

3.4.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Angka Partisipasi Kasar (APK) membandingkan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

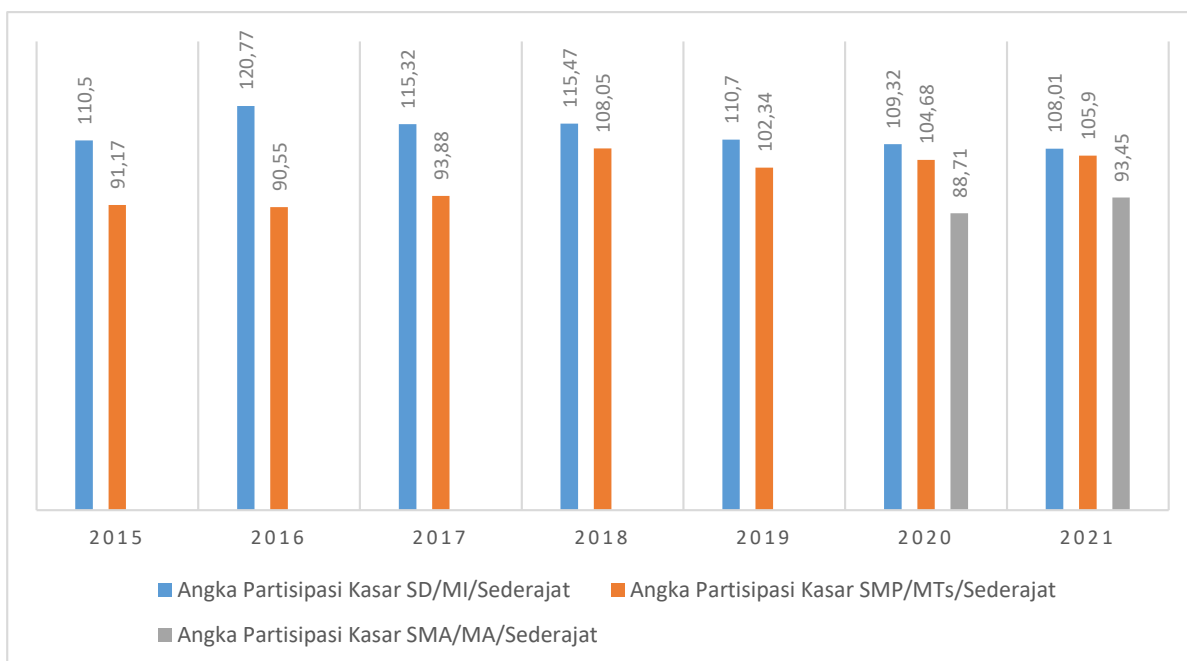
Angka Partisipasi Kasar (APK) bertujuan Untuk menunjukkan berapa besar umumnya tingkat partisipasi penduduk pada suatu tingkat pendidikan dan untuk menunjukkan berapa besar kapasitas sistem pendidikan dapat menampung siswa dari kelompok usia sekolah tertentu. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sebagai indikator pelengkap dari indikator Angka Partisipasi Murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya

Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan tersebut. Penyebabnya adalah adanya pendaftaran siswa usia dini, pendaftaran siswa yang telat bersekolah, atau pengulangan kelas. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa wilayah tersebut mampu menampung

penduduk usia sekolah lebih dari target yang sesungguhnya. APK yang tinggi menunjukkan tingginya tingkat partisipasi sekolah, tanpa memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya.

Adapun Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Kota Subulussalam, dapat dilihat dalam tabel berikut:

Gambar 3.44 Angka Partisipasi Kasar Kota Subulussalam 2015 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar di atas, diketahui Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA Kota Subulussalam tahun 2015 – 2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021 APK SD/MI sebesar 108,01 sedangkan APM SMP/MTs sebesar 105,9 dan APM SMA/MA sebesar 93,45.

3.4.3. Angka Partisipasi Sekolah

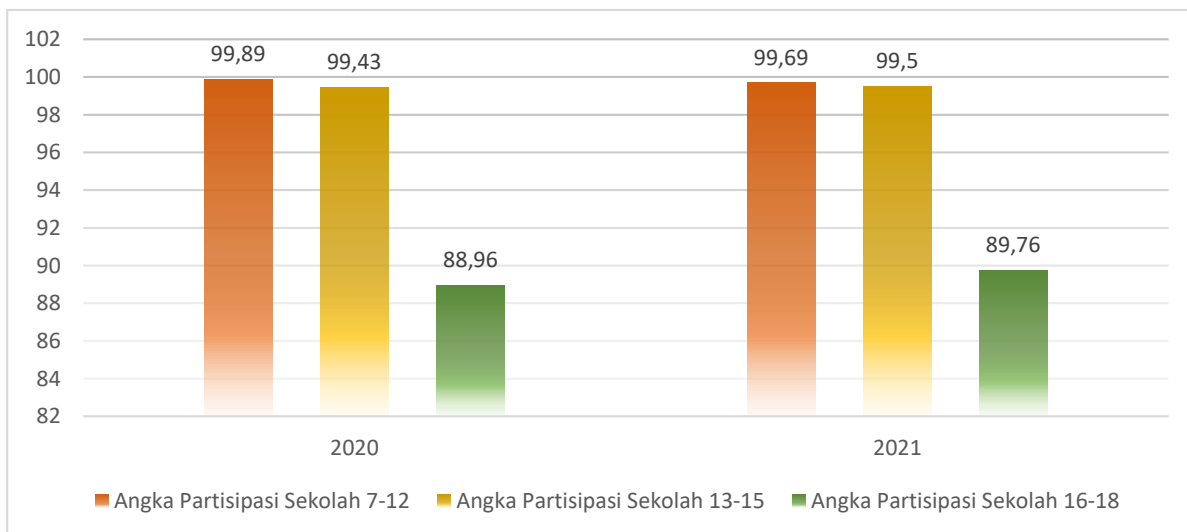
Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) membandingkan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah dan bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan.

Nilai APS berkisar antara 0-100. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Pada kelompok umur mana peluang tersebut terjadi dapat dilihat dari besarnya APS pada setiap kelompok umur.

Adapun Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota Subulussalam pada tahun 2020 dan 2021 sebagaimana tabel berikut:

Gambar 3.45 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Subulussalam Tahun 2020 – 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar di atas, diketahui Angka Partisipasi Sekolah umur 7-12, umur 13-15 dan umur 16-18 di Kota Subulussalam tahun 2020-2021 mengalami peningkatan kecuali APS umur 7-12 tahun. Pada tahun 2021 APS umur 7-12 tahun sebesar 0,23 dari tahun 2020 menjadi sebesar 99,69. Sedangkan APS umur 13-15 dan 16-18 tahun mengalami peningkatan masing-masing sebesar 0,07 dan 0,8 menjadi 99,5 dan 89,76 pada tahun 2021.

3.4.4. Angka Melek Huruf

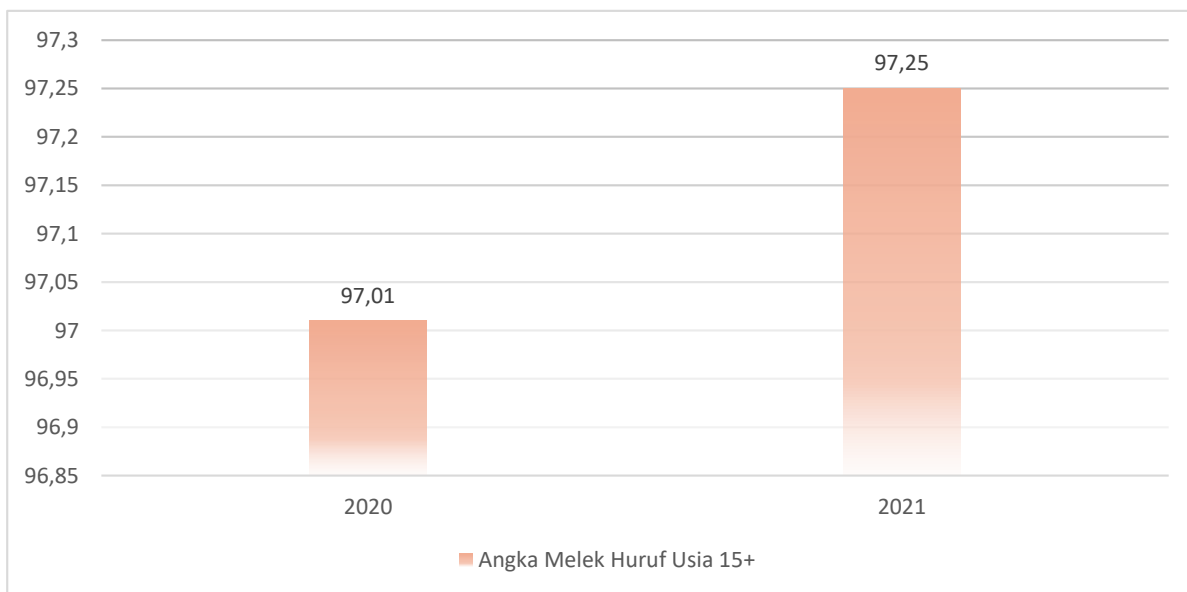
Angka melek huruf adalah Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf Jawa, kanji, dll.) terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas.

Angka melek huruf bertujuan untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.

Adapun Angka Melek Huruf Usia 15+ di Kota Subulussalam pada tahun 2020-2021 sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.46 Angka Melek Huruf Usia 15+ Kota Subulussalam Tahun 2020-2021



Sumber: BPS Kota Subulussalam

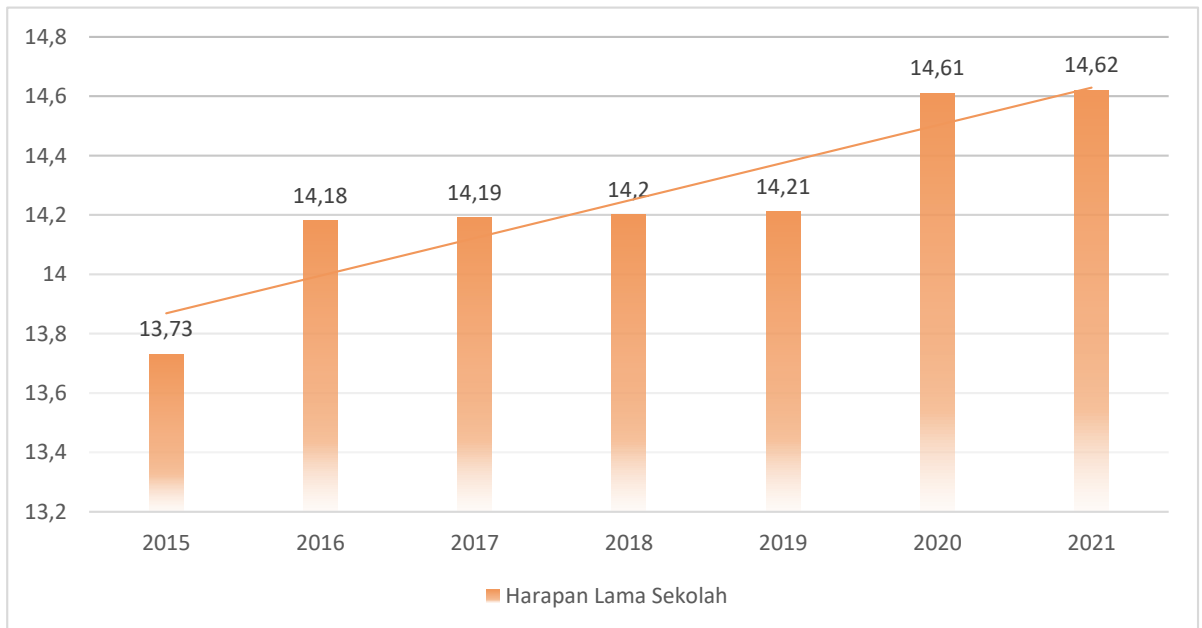
Dari gambar di atas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Angka Melek Huruf (AMH) di Kota Subulussalam. Pada tahun 2020 AMH Subulussalam sebesar 97,01 dan mengalami kenaikan sebesar 0,24 menjadi 97,25 pada tahun 2021.

3.4.5. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk mengenyam pendidikan formal pada waktu tertentu.

Adapun Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Subulussalam tahun 2015-2021, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.47 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Subulussalam Tahun 2015-2021

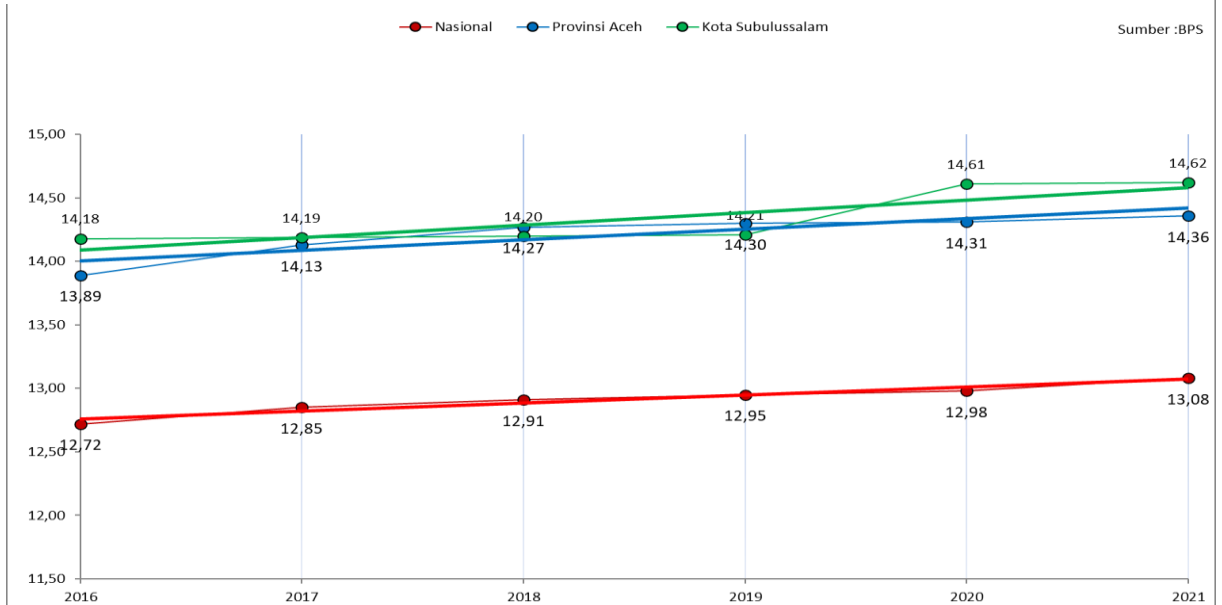


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Subulussalam dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 HLS Subulussalam sebesar 13,37 dan terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2021. Pada tahun 2021 HLS Kota Subulussalam sebesar 14,62. Artinya setiap anak di Kota Subulussalam memiliki harapan mengenyam pendidikan sampai jenjang Diploma II atau Diploma III.

Adapun relevansi perkembangan angka harapan lama sekolah Kota Subulussalam terhadap angka lama sekolah Aceh dan Nasional dalam kurun waktu 2016 sampai 2021, dapat dicermati dalam sajian gambar berikut ini:

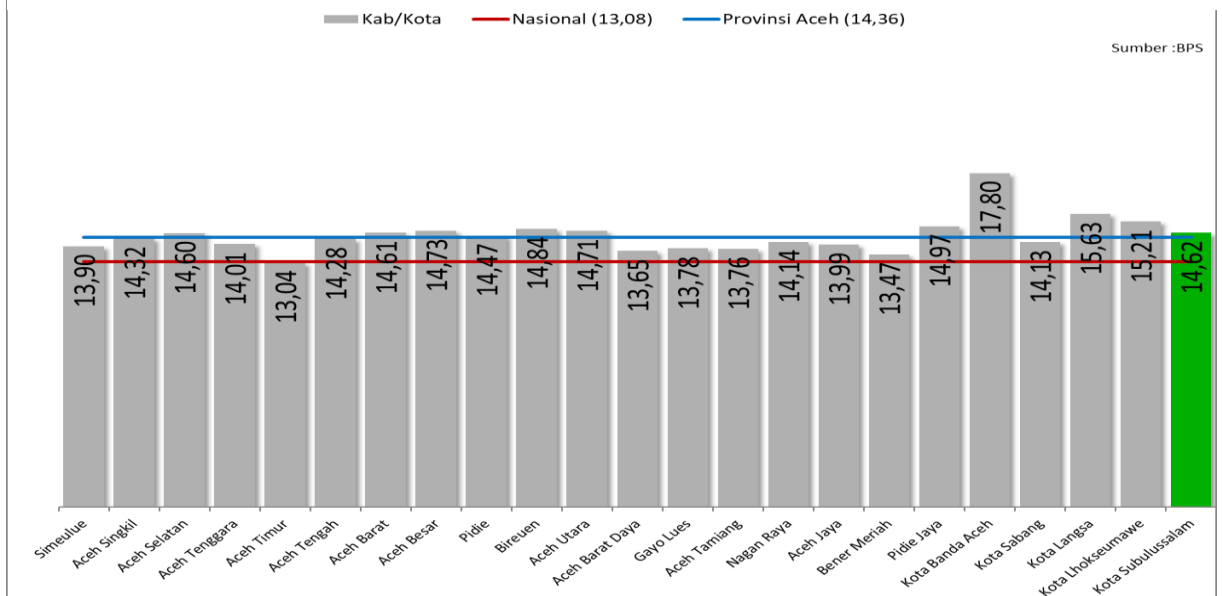
Gambar 3.48 Analisis Relevansi Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Subulussalam Tahun 2016-2021



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, bahwa tren peningkatan angka harapan lama sekolah yang terjadi di Provinsi dan Nasional juga terjadi Kota Subulussalam. Sedangkan posisi relatif angka harapan lama sekolah antara Kota Subulussalam dengan 23 Kab/Kota di Aceh pada tahun 2021, sebagai berikut:

Gambar 3.49 Analisis Posisi Relatif Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Subulussalam Tahun 2021



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa angka harapan lama sekolah Kota Subulussalam tahun 2021 berada diatas angka harapan lama sekolah Aceh dan Nasional bersama dengan 11 Kab/Kota lainnya.

3.4.6. Rata-rata Lama Sekolah

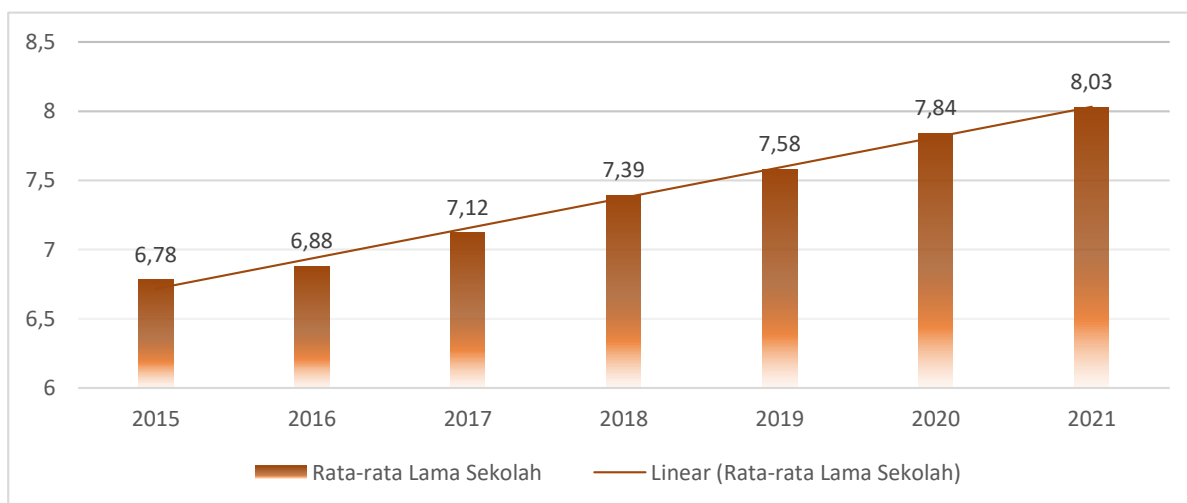
Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Rata-rata Lama Sekolah bertujuan untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya serta bertujuan Untuk perencanaan dan evaluasi capaian program wajib belajar.

Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Adapun Angka Rata-rata Lama Sekolah (HLS) Kota Subulussalam tahun 2015-2021, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.50 Angka Rata-rata Lama Sekolah (HLS) Kota Subulussalam tahun 2015-2021

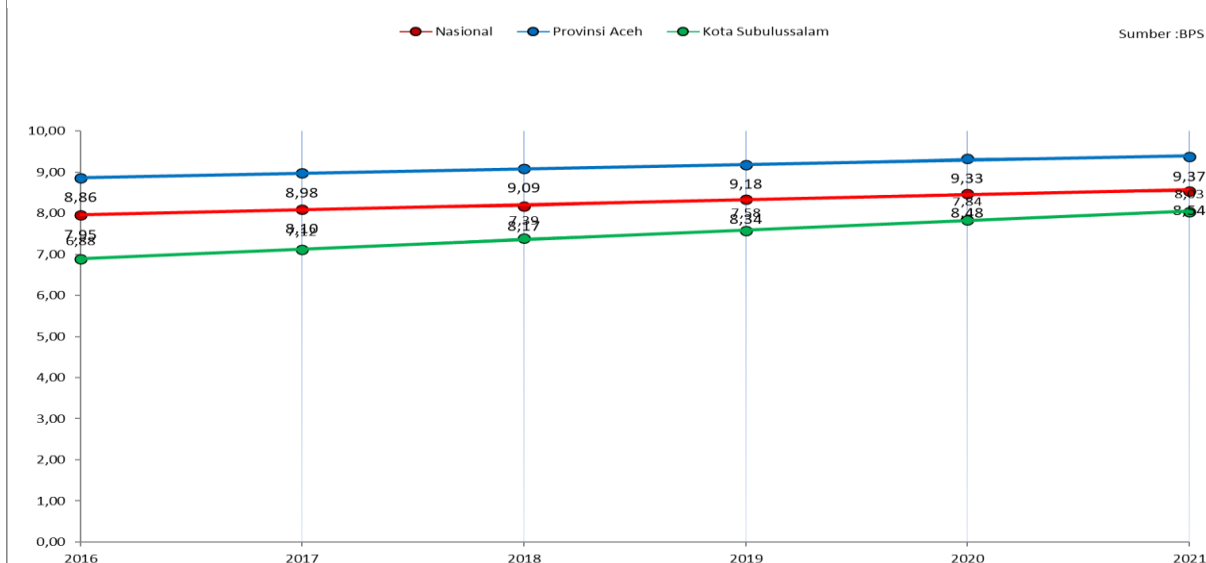


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kota Subulussalam dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 Rata-rata Lama Sekolah Subulussalam sebesar 6,78 dan terus mengalami kenaikan sampai pada tahun 2021. Pada tahun 2021 Rata-rata Lama Sekolah Kota Subulussalam sebesar 8,03.

Dan adapun relevansi perkembangan angka rata-rata lama sekolah Kota Subulussalam dalam kurun waktu 2016 sampai 2021 terhadap angka rata-rata lama sekolah Aceh dan Nasional, sebagai berikut:

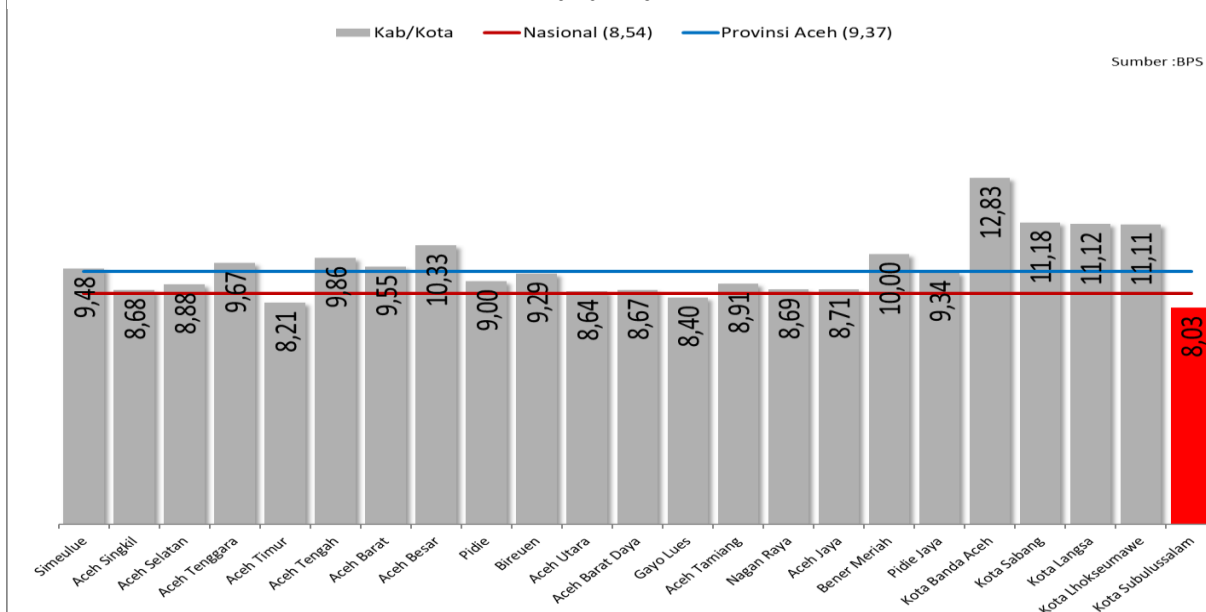
Gambar 3.51 Analisis Relevansi Angka Rata-rata Lama Sekolah (HLS) Kota Subulussalam Tahun 2016-2021



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, dapat cermati bahwa sama-sama terjadi peningkatan angka rata-rata lama sekolah baik di Kota Subulussalam maupun Provinsi Aceh dan Nasional. Sedangkan posisi relatif rata-rata lama sekolah Kota Subulussalam dengan Kab/Kota lainnya di Provinsi Aceh, sebagai berikut:

Gambar 3.52 Analisis Posisi Relatif Angka Rata-rata Lama Sekolah Kota Subulussalam Tahun 2021



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, diketahui bahwa angka rata-rata lama sekolah Kota Subulussalam masih berada di bawah angka rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh dan Nasional bersama dengan 3 Kab/Kota lainnya.

3.5. Analisis Karakteristik Masalah Bidang Infrastruktur Dasar

Peningkatan akses layanan infrastruktur dasar (air minum layak, sanitasi layak dan elektrifikasi) masih menjadi perhatian Pemerintah sejalan dengan upaya pemenuhan akses untuk semua lapisan masyarakat. Peningkatan akses layanan infrastruktur dasar menunjukkan masyarakat yang semakin sejahtera. Secara umum dalam jangka panjang, tantangan utama pemenuhan akses infrastruktur dasar di Kota Subulussalam berada pada akses air minum dan sanitasi layak karena berkaitan langsung dengan pola hidup bersih dan sehat.

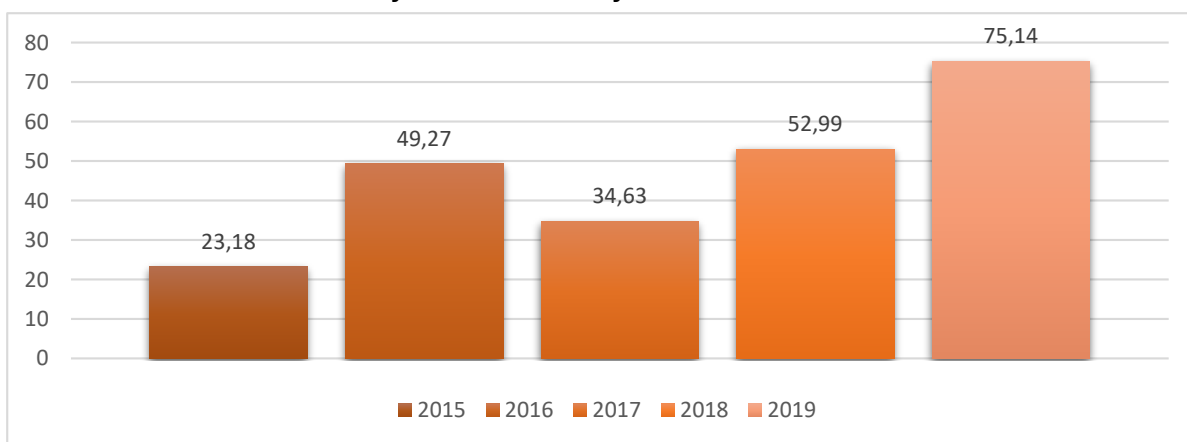
3.5.1. Persentase Rumah Tangga Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak

Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga, dinyatakan dalam persen (%). Fasilitas sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu, dilengkapi dengan kloset jenis leher angsa, serta tempat pembuangan akhir tinja berupa tangki septik atau Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Indikator ini digunakan untuk mengukur rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak baik di perkotaan maupun perdesaan. Indikator ini menggambarkan tingkat kesejahteraan rakyat dari aspek kesehatan.

Adapun Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kota Subulussalam tahun 2015-2019 sebagai berikut:

Gambar 3.53 Persentase Layanan Sanitasi Layak di Kota Subulussalam Tahun 2015-2019

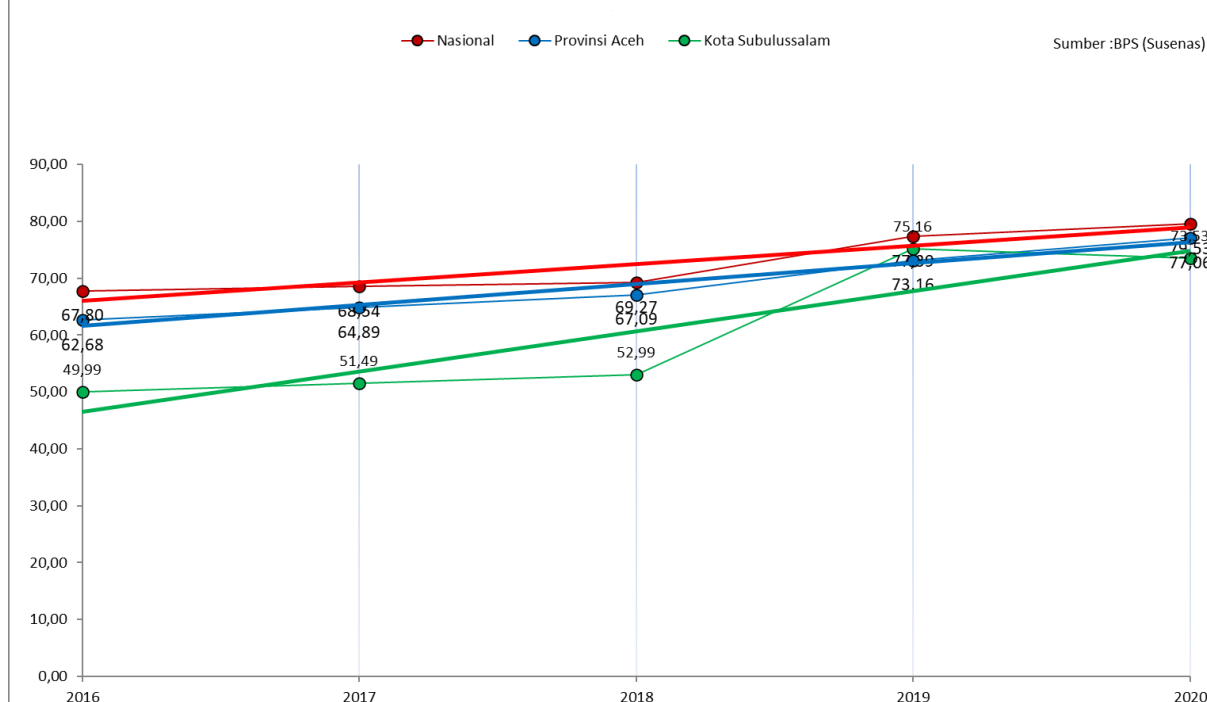


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar di atas diketahui Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak di Kota Subulussalam cenderung terus meningkat. Pada tahun 2021 Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak sebesar 75,14.

Adapun relevansi perkembangan akses sanitasi layak di Kota Subulussalam terhadap 23 Kab/Kota di Aceh, dapat diketahui dalam sajian gambar berikut:

Gambar 3.54 Analisis Relevansi Persentase Layanan Sanitasi Layak di Kota Subulussalam Tahun 2016-2020

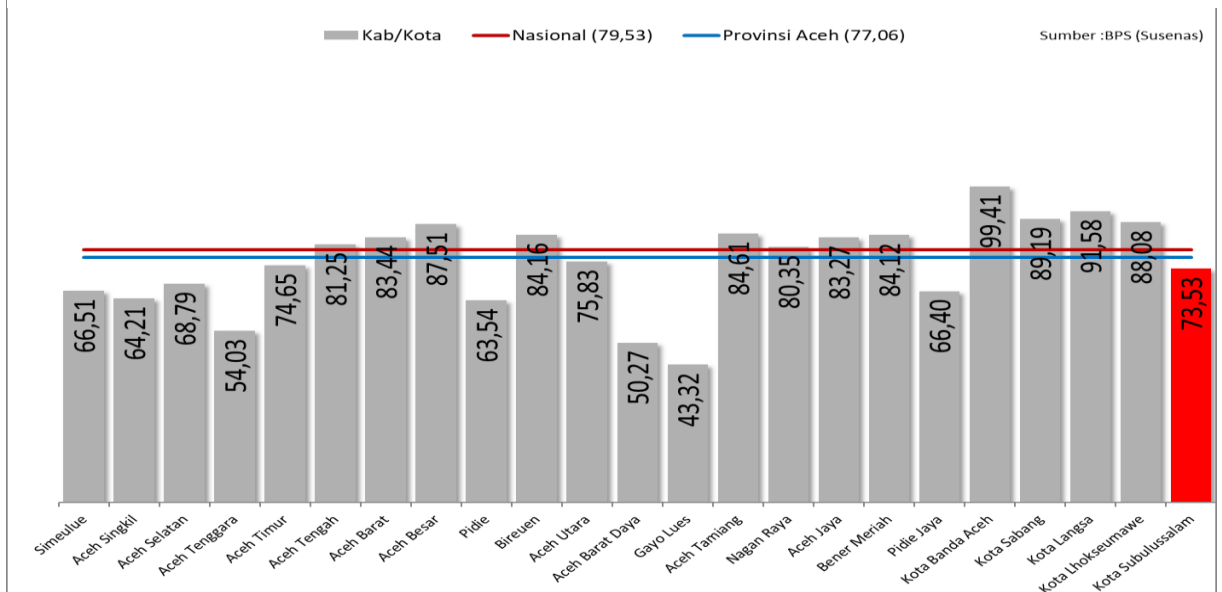


Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, diketahui bahwa dalam kurun waktu 2016-2020 ada tren positif dengan peningkatan proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak baik di Kota Subulussalam maupun di Aceh dan Nasional.

Sedangkan secara posisi relatif proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Kota Subulussalam dengan Kab/Kota lainnya di Provinsi Aceh pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 73,53 masih berada dibawah proporsi rumah tangga dengan sanitasi layak di Provinsi dan Aceh bersama dengan 10 (sepuluh) Kab/Kota lainnya yang ada di Provinsi Aceh. Posisi relatif tersebut dapat dicermati dalam gambar berikut:

Gambar 3.55 Analisis Posisi Relatif Persentase Layanan Sanitasi Layak di Kota Subulussalam Tahun 2020

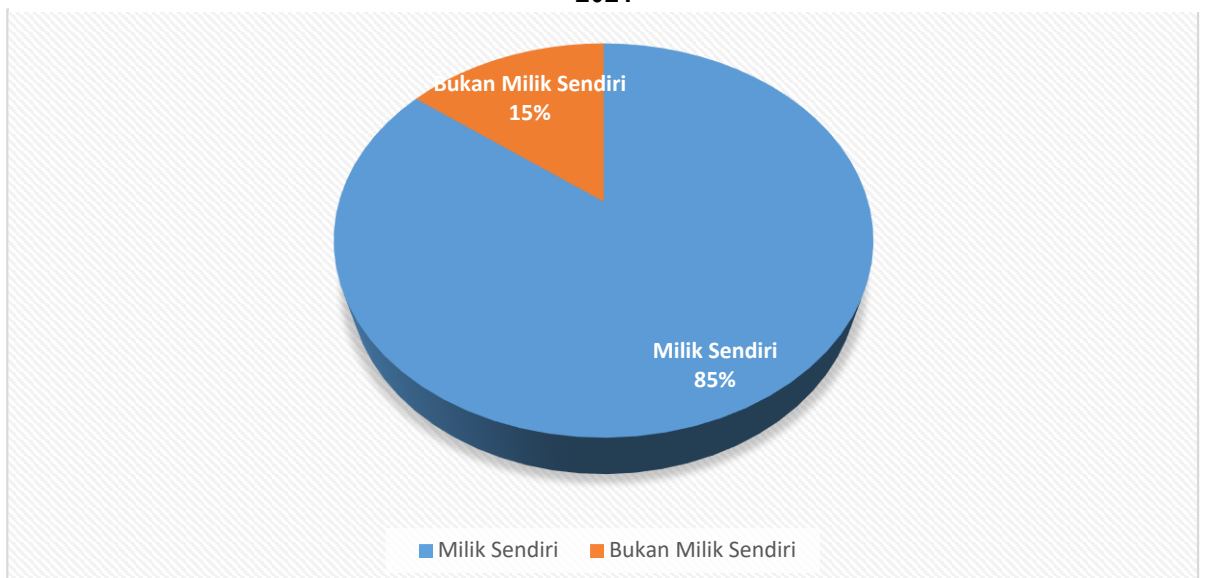


Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Adapun persentase status kepemilikan fasilitas buang air besar pada tahun 2021 di Kota Subulussalam sebagai berikut:

Sebagaimana gambar diatas, pada tahun 2021 persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri sebesar 85% dan sisinya sebesar 15% bukan milik sendiri atau fasilitas bersama dan lainnya.

Gambar 3.56 Persentase Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar Kota Subulussalam Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

3.5.2. Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Air Minum Layak

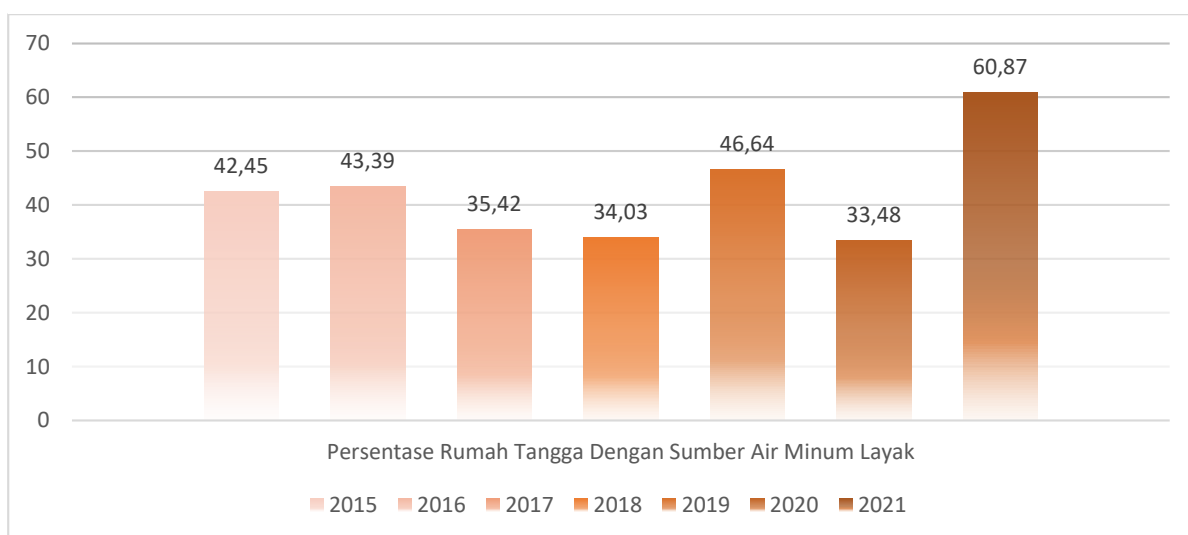
Air minum yang berkualitas (layak) adalah air minum yang terlindung meliputi air ledeng (keran), keran umum, hydrant umum, terminal air, penampungan air hujan (PAH) atau mata air dan sumur terlindung, sumur bor atau sumur pompa, yang jaraknya minimal 10 m dari pembuangan kotoran,

penampungan limbah dan pembuangan sampah. Tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindung. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak adalah perbandingan antara rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum berkualitas (layak) dengan rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase.

Indikator ini digunakan untuk memantau akses penduduk terhadap sumber air berkualitas berdasarkan asumsi bahwa sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah.

Adapun Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak di Kota Subulussalam Tahun 2015 – 2021, sebagaimana berikut:

Gambar 3.57 Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Tahun 2015 – 2021

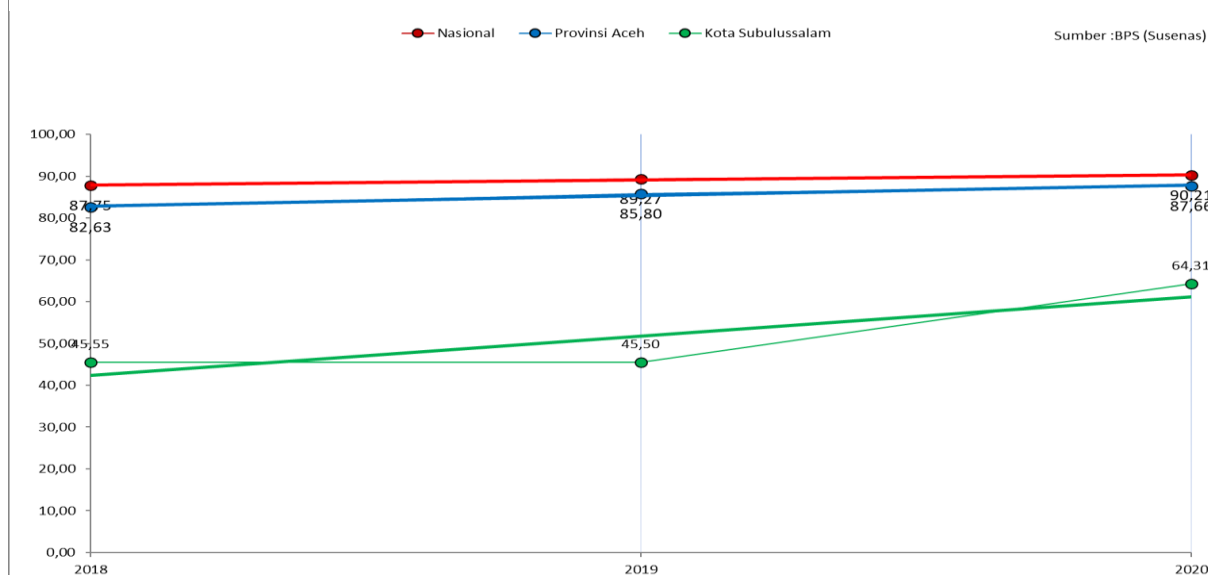


Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar di atas, dapat diketahui Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Kota Subulussalam cenderung meningkat. Pada tahun 2021, Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Kota Subulussalam sebesar 60,87.

Adapun relevansi perkembangan proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kota Subulussalam tahun 2018 – 2020, adalah sebagai berikut:

Gambar 3.58 Analisis Relevansi Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Tahun 2018 – 2020

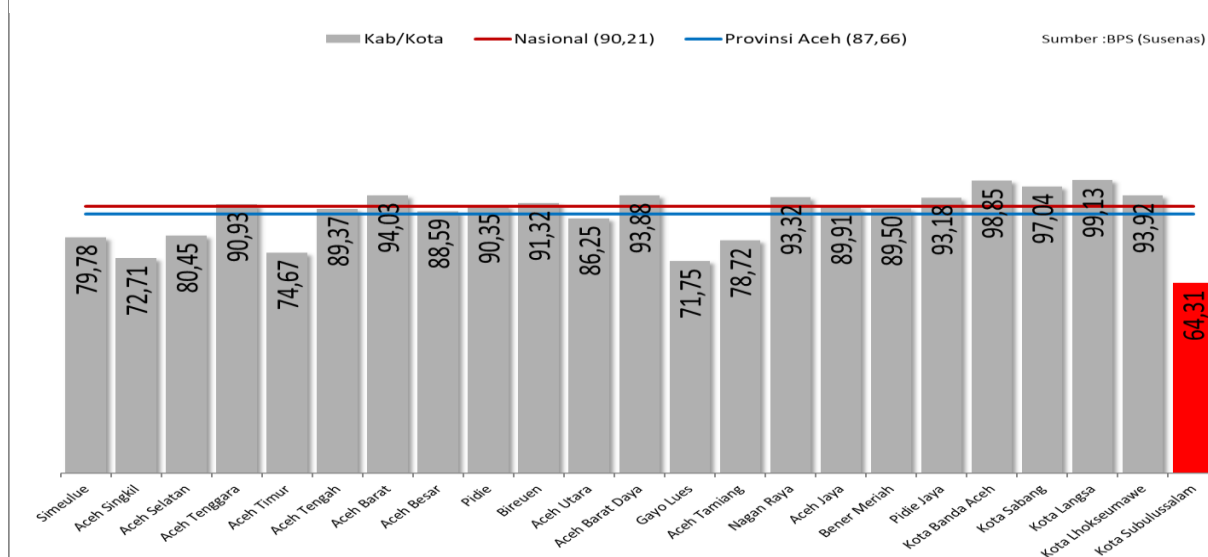


Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kota Subulussalam dalam 3 (tiga) tahun terakhir menunjukkan tren perkembangan yang positif dan tren perkembangan yang positif juga terjadi pada proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Aceh dan Nasional.

Sedangkan secara posisi relatif proporsi rumah tangga dengan air minum layak antara Kota Subulussalam pada tahun 2020 dengan 23 Kab/Kota lainnya, sebagai berikut:

Gambar 3.59 Analisis Posisi Relatif Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak Tahun 2020



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, diketahui proporsi rumah tangga dengan air minum layak di Kota Subulussalam sebesar 64,31 berada dibawah capaian Provinsi dan Nasional bersama dengan 8 Kab/Kota lainnya di Provinsi Aceh.

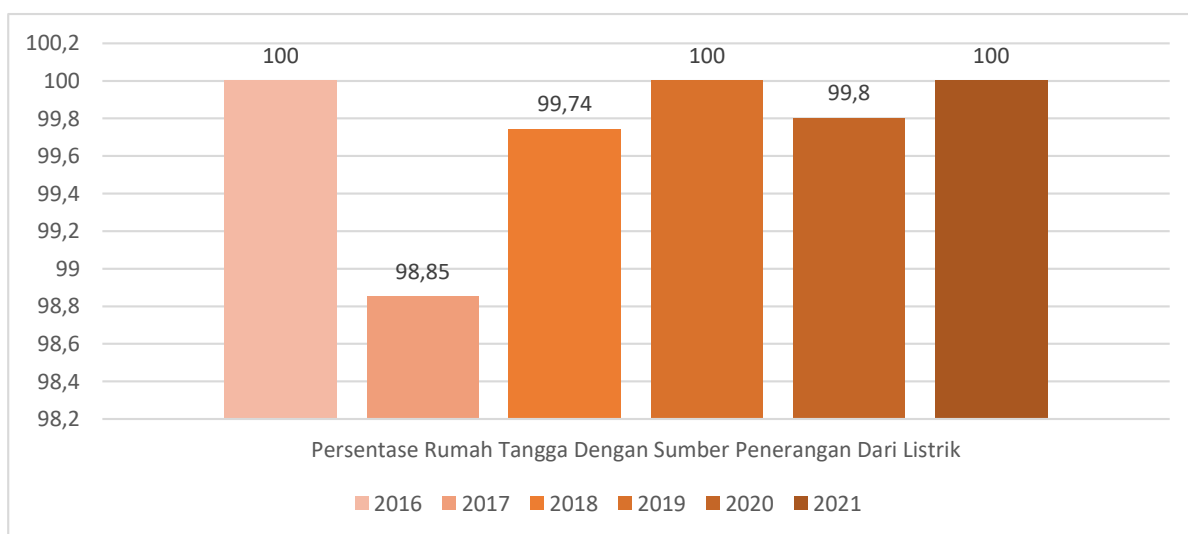
3.5.3. Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan Dari Listrik (Rasio Elektrifikasi)

Rasio elektrifikasi adalah Perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga total. Listrik PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Listrik non-PLN adalah rumah tangga yang menggunakan sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN seperti Pemda, Koperasi, CSR Badan Usaha, ataupun Swadaya Masyarakat.

Mengetahui jumlah rumah tangga yang telah dan belum memiliki akses listrik sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan dari Listrik di Kota Subulussalam pada tahun 2021 mencapai angka 100%. Artinya, setiap rumah tangga di Kota Subulussalam seluruhnya sudah mendapatkan sumber penerangan dari listrik. Tidak ada lagi rumah tangga atau daerah yang tidak ter aliri listrik di Kota Subulussalam.

Adapun perkembangan dari waktu ke waktu Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan dari Listrik di Kota Subulussalam tahun 2016 – 2021 dapat dilihat dalam sajian gambar berikut ini:

Gambar 3.60 Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan dari Listrik Tahun 2016 - 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

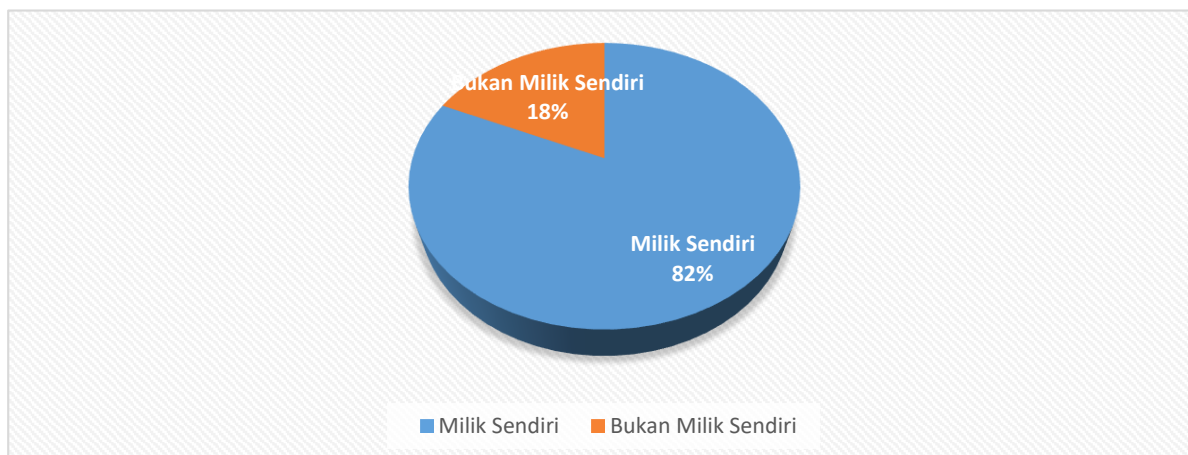
Dari gambar Persentase Rumah Tangga Dengan Sumber Penerangan dari Listrik di Kota Subulussalam tahun 2016 – 2021 di atas, menunjukkan adanya perbaikan yang dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar masyarakat Kota Subulussalam.

3.5.4. Persentase Kepemilikan Rumah

Persentase Kepemilikan Rumah ialah status kepemilikan rumah. Status rumah yang dimaksud disini adalah rumah dengan status penguasaan bangunan milik sendiri, kontrak, dan sewa. Untuk melihat status dari sebuah rumah tinggal. Semakin besar nilai status kepemilikan rumah maka semakin besar pula banyaknya rumah tangga yang memiliki rumah berstatus milik sendiri, kontrak, dan sewa.

Adapun Persentase Kepemilikan Rumah di Kota Subulussalam pada tahun 2021, sebagaimana gambar berikut:

Gambar 3.61 Persentase Kepemilikan Rumah di Kota Subulussalam Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

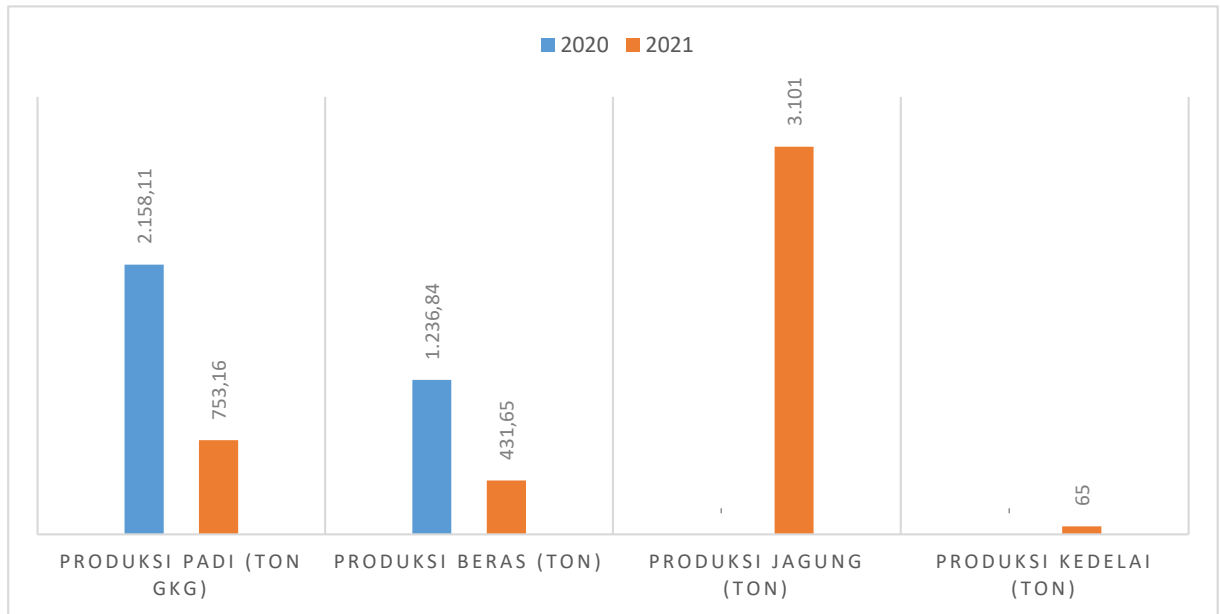
Dari sajian data di atas, diketahui bahwa pada tahun 2021 jumlah Persentase Kepemilikan Rumah Kota Subulussalam Tahun 2021 adalah sebesar 82% dengan status milik sendiri dan sisanya sebesar 18% dengan bukan milik sendiri baik berupa sewa, kontrak, pinjam dan sebagainya.

3.6. Analisis Karakteristik Masalah Ketahanan Pangan

Sejalan dengan penambahan jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi beras, di sisi lain akan terjadi konversi lahan pertanian menjadi pemukiman dan industri maupun infrastruktur yang lain, sehingga menyebabkan luas lahan pertanian akan menjadi berkurang. Dalam jangka panjang banyaknya konversi lahan pertanian berdampak pada menurunnya produksi beras di Kota Subulussalam. Produksi beras yang berkurang akan berakibat stok beras Kota Subulussalam menjadi menurun, dan dapat berakibat buruk terhadap ketahanan pangan di Kota Subulussalam. Selain padi/beras, komoditas pangan Kota Subulussalam lainnya yaitu Jagung dan Kedelai.

Adapun perkembangan produksi padi dan beras Kota Subulussalam dalam 2 tahun terakhir dan produksi jagung dan kedelai pada tahun 2021, dapat dicermati dalam sajian gambar berikut ini:

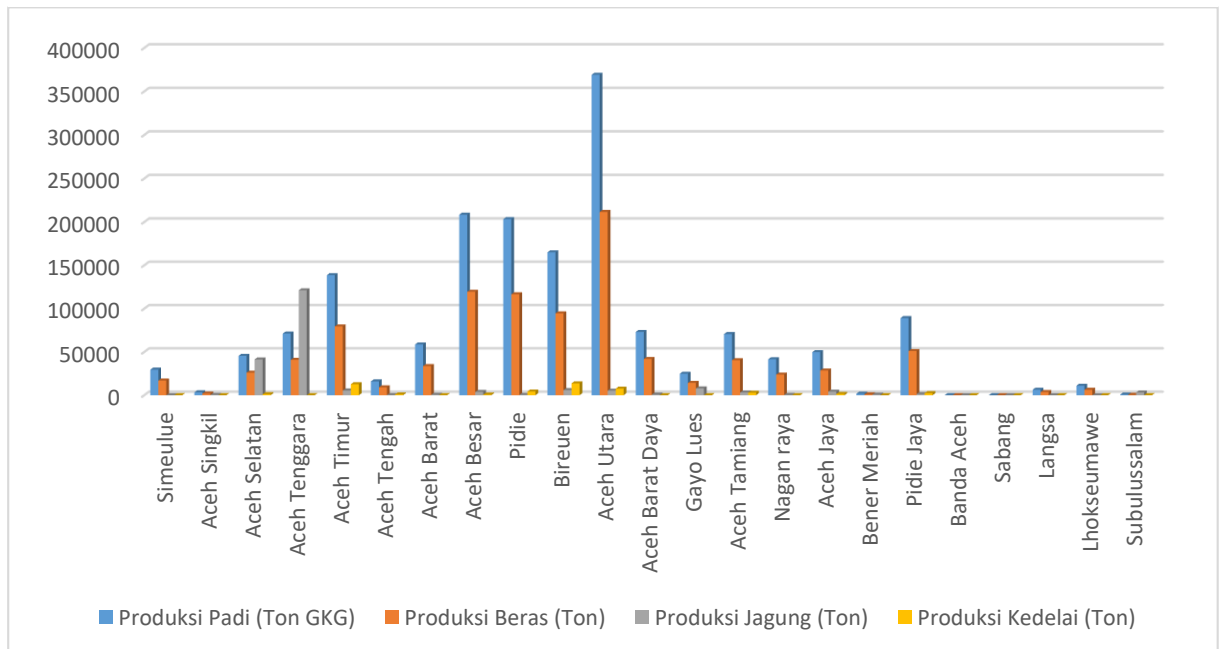
Gambar 3.62 Produksi Komoditas Pangan Kota Subulussalam Tahun 2020-2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar diatas, terlihat bahwa ada terjadinya penurunan produksi padi dan beras di Kota Subulussalam pada tahun 2021. Sedangkan posisi relatif ketahanan pangan Kota Subulussalam dibandingkan dengan 23 Kab/Kota di Aceh pada tahun 2021, sebagai berikut:

Gambar 3.63 Posisi Relatif Produksi Komoditas Pangan Kota Subulussalam Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari gambar diatas, terlihat capaian 4 komoditas pangan di Kota Subulussalam masih rendah dibawah rata-rata capaian Kab/Kota lainnya di Aceh.

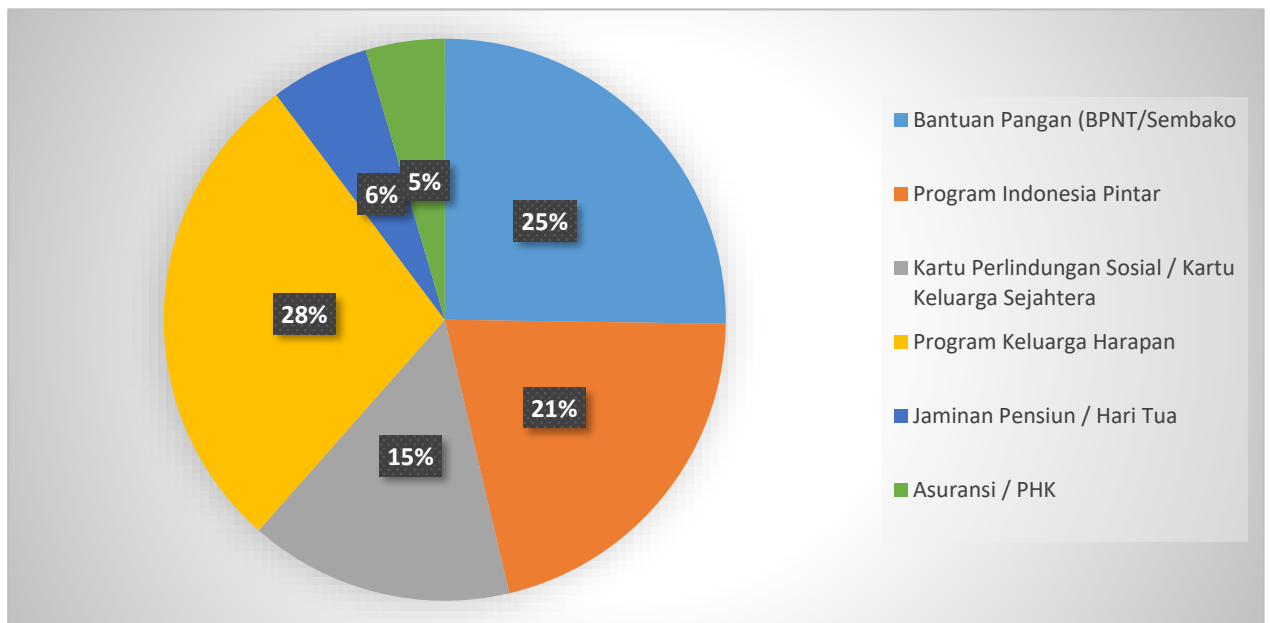
3.7. Analisis Karakteristik Masalah Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial dapat membantu menangani kemiskinan, dengan mengurangi ke tidak-setaraan dan membangun ketahanan rumah tangga dalam menghadapi hal tak terduga seperti penyakit maupun kecelakaan, yang dapat mendorong masyarakat miskin lebih jauh ke dalam kemiskinan.

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Perlindungan sosial adalah segala bentuk kebijakan dan intervensi publik yang dilakukan untuk merespons beragam risiko dan kerentanan baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial terutama yang dialami oleh mereka yang hidup dalam kemiskinan. Perlindungan sosial terdiri dari bantuan sosial dan jaminan sosial. Program bantuan sosial memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam rangka pelaksanaan penanggulangan kemiskinan. Bantuan yang diberikan dalam program bantuan sosial tidak bergantung kepada iuran dari penerima manfaat, dan dapat berupa uang (in-cash transfer) atau pelayanan (in-kind transfer). Jaminan sosial merupakan bentuk pengurangan risiko melalui pemberian tunjangan pendapatan (income support) dan/atau penanggung biaya ketika sakit, kelahiran, kecelakaan saat bekerja, usia lanjut serta kematian.

Adapun persentase rumah tangga menurut jenis program perlindungan sosial di Kota Subulussalam tahun 2021, sebagai berikut:

Gambar 3.64 Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Program Perlindungan Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik

3.8. Analisis Karakteristik Masalah Pertanian dan Perkebunan

Dalam bidang pertanian dan perkebunan di Kota Subulussalam, terdapat 5 komoditas dengan luas lahan tanaman terbesar, yaitu: Kelapa Sawit, Kelapa, Karet, Kopi dan Kakao. Adapun luas lahan tanaman tersebut pada tahun 2019 dan 2020, sebagai berikut:

Tabel 3.18 Luas Lahan Tanaman (Ha) Komoditas Perkebunan Berdasarkan Kecamatan di Kota Subulussalam

Kecamatan	Kelapa Sawit		Kelapa		Karet		Kopi		Kakao	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Simpang Kiri	3104	2984	113	113	810	805	1	1	20	20
Penanggalan	1697	1634	24	24	425	420	-	-	34	34
Rundeng	2516	2440	89	89	165	157	2	2	76	76
Sultan Daultat	1809	1809	58	58	650	645	2	2	230	230
Longkib	2752	2662	154	154	812	801	-	-	28	28
Subulussalam	11878	11529	438	438	2862	2828	5	5	388	388

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa Komoditas Perkebunan dengan luas lahan terbesar ialah Kelapa Sawit dan diikuti oleh Karet, Kelapa, Kakao dan Kopi.

Sedangkan produksi komoditas perkebunan di Kota Subulussalam dapat dicermati dalam sajian tabel berikut ini:

Tabel 3.19 Produksi (Ton) Komoditas Perkebunan Berdasarkan Kecamatan di Kota Subulussalam

Kecamatan	Kelapa Sawit (Ton)		Kelapa		Karet		Kopi		Kakao	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Simpang Kiri	9450	9450	69	69	630	630	1	1	15	15
Penanggalan	5401	5400	14	14	213	213	-	-	18	18
Rundeng	7172	7320	51	51	125	125	1	1	45	45
Sultan Daultat	6255	5706	32	32	520	520	1,3	1,3	155	155
Longkib	6850	7853	99	99	140	140	-	-	20	20
Subulussalam	35128	35729	265	265	1628	1628	3,3	3,3	253	253

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sajian tabel diatas, diketahui bahwa Komoditas dengan produksi terbesar juga diduduki oleh Kelapa Sawit kemudian di susul oleh Karet, Kelapa, Kakao dan Kopi

3.9. Analisis Karakteristik Masalah Kelautan dan Perikanan

Dalam bidang perikanan produksi dan nilai terbesar diperoleh dari perikanan tangkap, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.20 Volume (ton) dan Nilai (Rp.000) Perikanan di Kota Subulussalam

Kecamatan	Perikanan Perairan Umum Daratan		Perikanan Tangkap		Kolam Air Tenang	
	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)	Volume (Ton)	Nilai (000 Rp)
Simpang Kiri	5	155.500	5	155.500	11,35	381.360
Penanggalan	2,5	77.750	2,5	77.750	7,91	265.776

Rundeng	97,1	3.019.810	97,1	3.019.810	-	-
Sultan Daultat	21,5	668.650	21,5	668.650	12,64	424.704
Longkib	2,5	77.750	2,5	77.750	1,6	53.760
Subulussalam	128,6	3.999.460	128,6	3.999.460	33,5	1.125.600

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari data yang tersaji dalam tabel diatas, diketahui bahwa nilai dan produksi perikanan terbesar berasal dari perikanan tangkap atau perikanan perairan umum daratan dengan volume sebesar 128,6 Ton pada tahun 2020.

3.10. Analisis Karakteristik Masalah Strategis lainnya

Salah satu permasalahan tahun yang terjadi di Kota Subulussalam, ialah banjir. Bencana banjir, selain menimbulkan kerugian juga sangat berdampak terhadap aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kota Subulussalam. Adapun kejadian bencana banjir yang terjadi di Kota Subulussalam pada tahun 2020, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.21 Kejadian Bencana Berdasarkan Kecamatan di Kota Subulussalam, 2020

Kecamatan	Tanah Longsor	Banjir
Simpang Kiri	-	-
Penanggalan	3	-
Rundeng	-	2
Sultan Daultat	-	2
Longkib	-	2
Subulussalam	3	6

Sumber: Badan Pusat Statistik

Pada tahun 2020, sebagai tabel diatas dapat diketahui bahwa terjadi bencana banjir sebanyak 2 kali pada masing-masing kecamatan Sultan Daulat, Rundeng dan Longkib. Ketiga Kecamatan tersebut merupakan kecamatan yang berada di sepanjang aliran sungai Soeraya.

Adapun desa yang terdampak bencana banjir berdasarkan kecamatan, dapat dicermati dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.22 Jumlah Desa Terdampak Banjir Berdasarkan Kecamatan di Kota Subulussalam, 2020

Kecamatan	2018	2019	2020
Simpang Kiri	4	2	8
Penanggalan	8	-	2
Rundeng	8	5	6
Sultan Daultat	9	3	2
Longkib	4	3	2
Subulussalam	33	13	20

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dari sajian tabel diatas, jumlah desa yang terdampak banjir terdapat di Kecamatan Rundeng, Sultan Daulat dan Rundeng.

Adapun dampak kerugian yang dialami masyarakat berupa terendam berdasarkan kecamatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.23 Jumlah Rumah Yang Terendam Akibat Bencana Banjir di Kota Subulussalam, 2020

Kecamatan	Terendam	
	2020	2021
Simpang Kiri	-	-
Penanggalan	-	-
Rundeng	125	136
Sultan Daulat	342	358
Longkib	84	90
Subulussalam	551	584

Sumber: Badan Pusat Statistik

Jumlah rumah yang terendam dampak dari bencana banjir, terbanyak di Kecamatan Sultan Daulat dan disusul oleh Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Longkib.

3.11. Analisis Karakteristik Masalah Pembangunan Desa

Kota Subulussalam memiliki 5 Kecamatan dan 82 Desa. Dari 82 Desa tersebut ada yang berbentuk Perkotaan (*Urban*) dan banyak yang berbentuk Perdesaan (*Rural*). Adapun karekteristik Desa di Kota Subulussalam pada tahun 2021, sebagai berikut:

Tabel 3.24 Karekteristik Desa Menurut Kecamatan di Kota Subulussalam, 2021

Kode	Nama	Perkotaan	Perdesaan	Total
1175010	Simpang Kiri	5	12	17
1175020	Penanggalan	0	13	13
1175030	Rundeng	1	22	23
1175040	Sultan Daulat	0	19	19
1175050	Longkib	0	10	10
	Total	6	76	82

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan tabel diatas, Desa dengan karekteristik Perkotaan yang terdapat di Kota Subulussalam sebanyak 6 desa dan sisanya sebanyak 76 desa berkarakteristik Perdesaan.

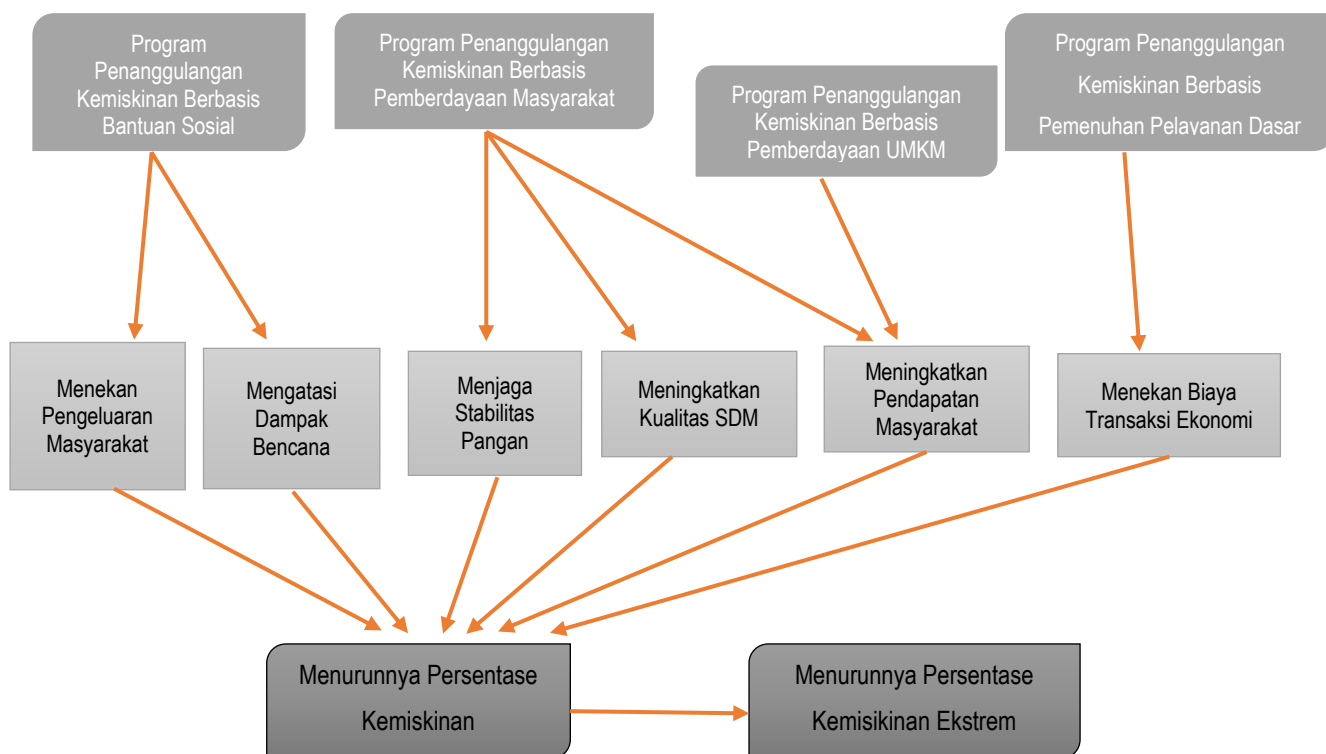
BAB IV PRIORITAS PROGRAM

4.1. Prioritas Program atau Teori Perubahan

4.1.1. Teori Perubahan

Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan diperlukan teori perubahan agar mencapai tujuan dengan tepat sasaran. Adapun rumusan teori perubahan dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Subulussalam, sebagaimana gambar berikut ini:

Tabel 4.25 Teori Perubahan (ToC) Penanggulangan Kemiskinan

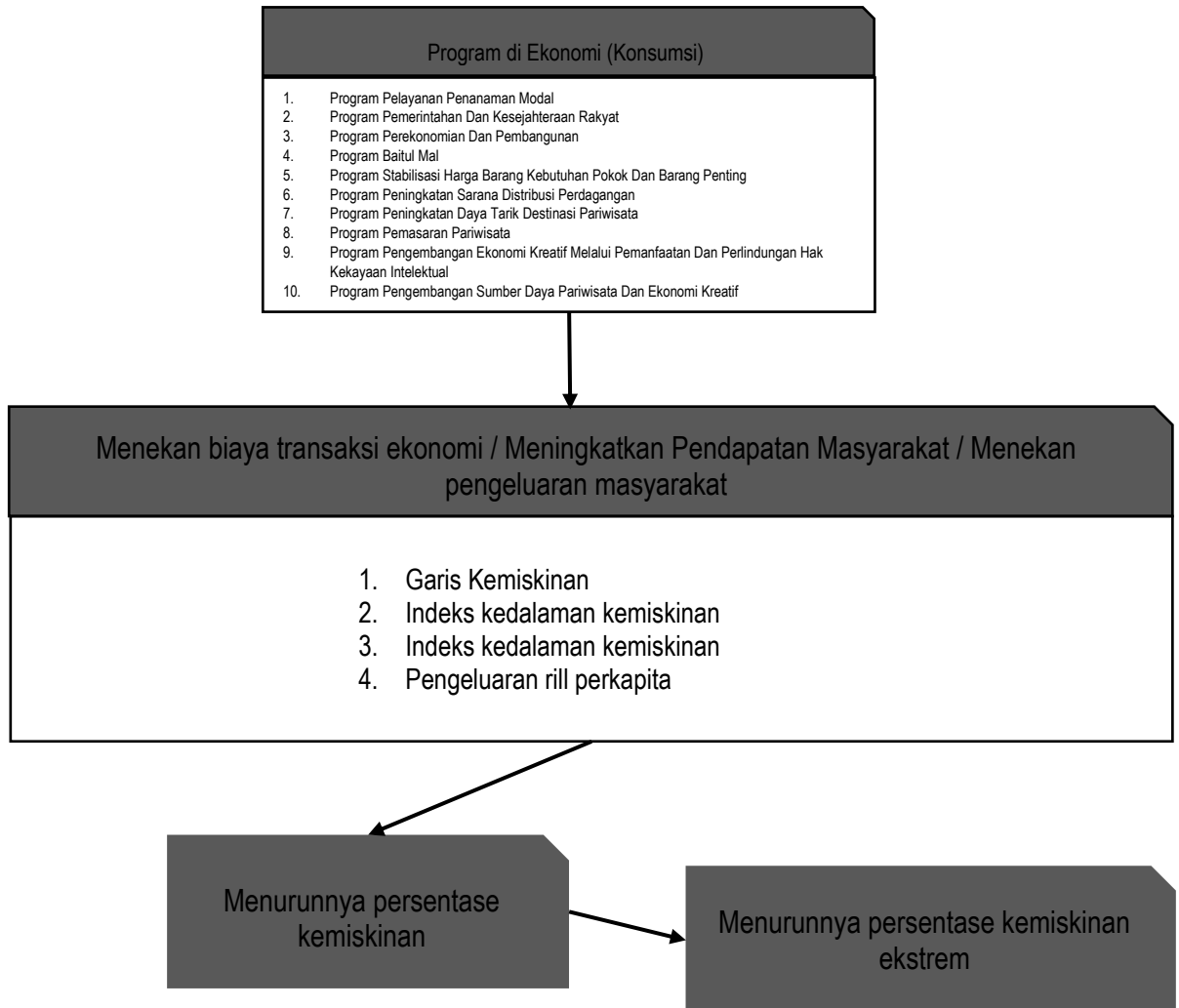


Dengan keterpaduan program dalam mengatasi permasalahan kemiskinan melalui upaya-upaya: mengurangi pengeluaran, meningkatkan pendapatan dan upaya lainnya dapat mengatasi dan menurunkan angka kemiskinan di Kota Subulussalam.

a. Teori Perubahan Bidang Ekonomi (Konsumsi)

Dalam bidang pendidikan, adapun rumusan teori perubahan yang akan dilakukan dalam penanggulangan kemiskinan, sebagaimana berikut:

Tabel 4.26 Teori Perubahan bidang Ekonomi (Konsumsi)

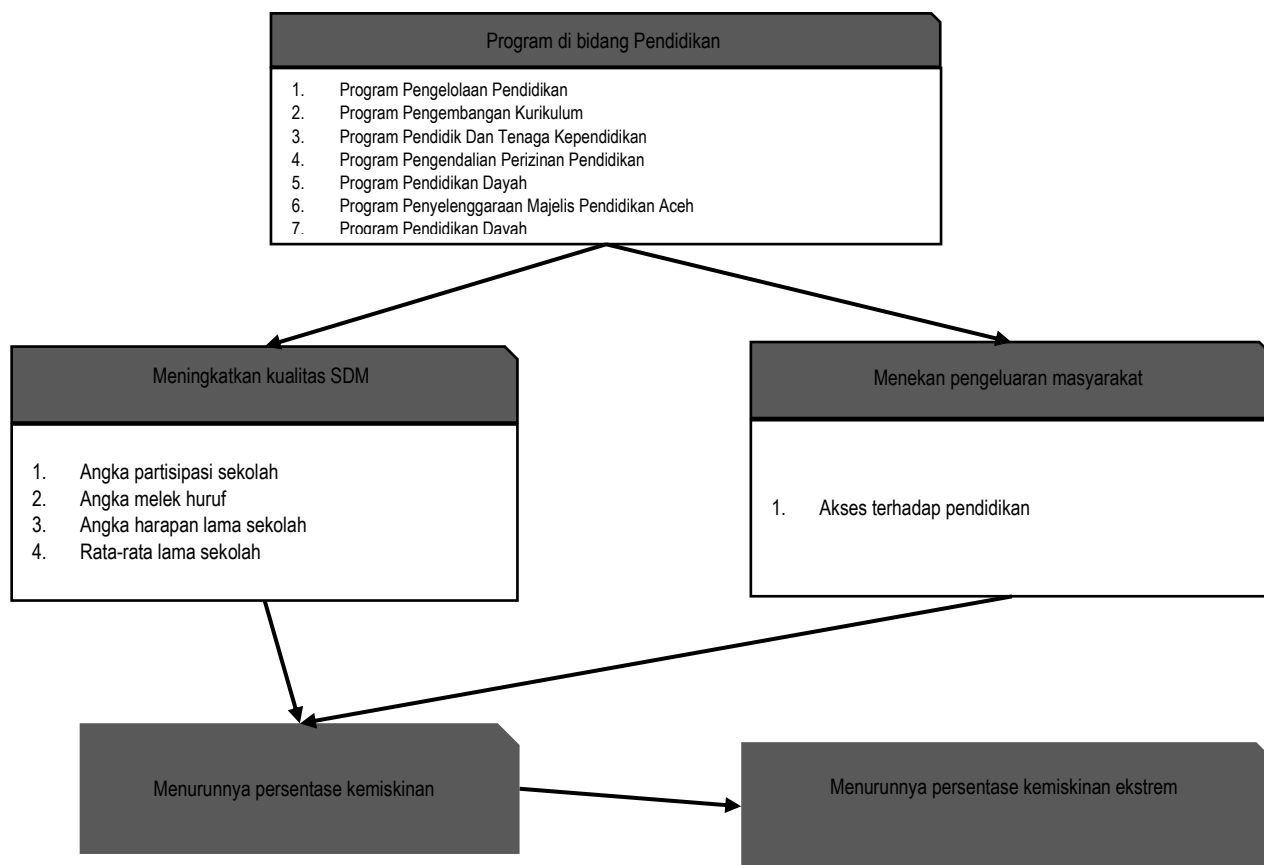


Dalam penanggulangan kemiskinan dibidang Ekonomi (konsumsi) terdapat 10 program yang diharapkan memberikan dampak berupa: 1. Menekan biaya transaksi ekonomi 2. Meningkatkan Pendapatan Masyarakat 3. Menekan pengeluaran masyarakat. Dampak tersebut diharapkan berimplikasi terhadap penurunan persentase kemiskinan dan penurunan persentase kemiskinan ekstrem.

b. Teori Perubahan Bidang Pendidikan

Rumusan teori perubahan dalam penanggulangan kemiskinan di Bidang, dapat dicermati dalam sajian tabel berikut:

Tabel 4.27 Teori Perubahan di Bidang Pendidikan

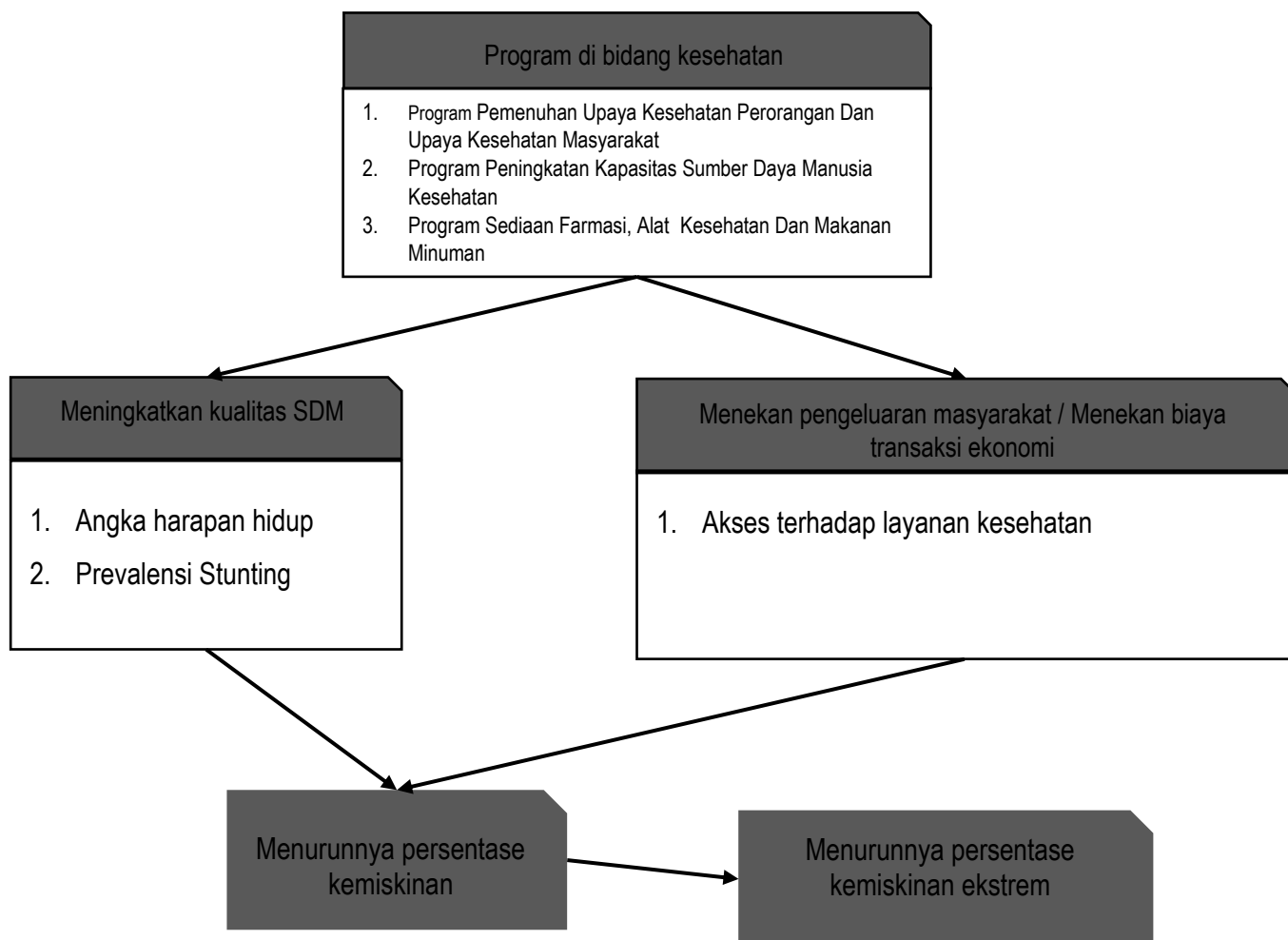


Dalam penanggulangan kemiskinan di Bidang Pendidikan terdapat 7 program yang diharapkan berdampak dalam meningkatkan kualitas SDM dan menekan pengeluaran masyarakat sehingga dampak tersebut dapat menurunkan persentase kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di Kota Subulussalam

c. Teori perubahan bidang kesehatan

Dalam penanggulangan kemiskinan di Bidang kesehatan, diperlukan teori perubahan yang menjadi strategi dalam penanganannya. Adapun rumusan teori perubahan di Bidang Kesehatan, sebagai berikut:

Tabel 4.28 Teori Perubahan di Bidang Kesehatan

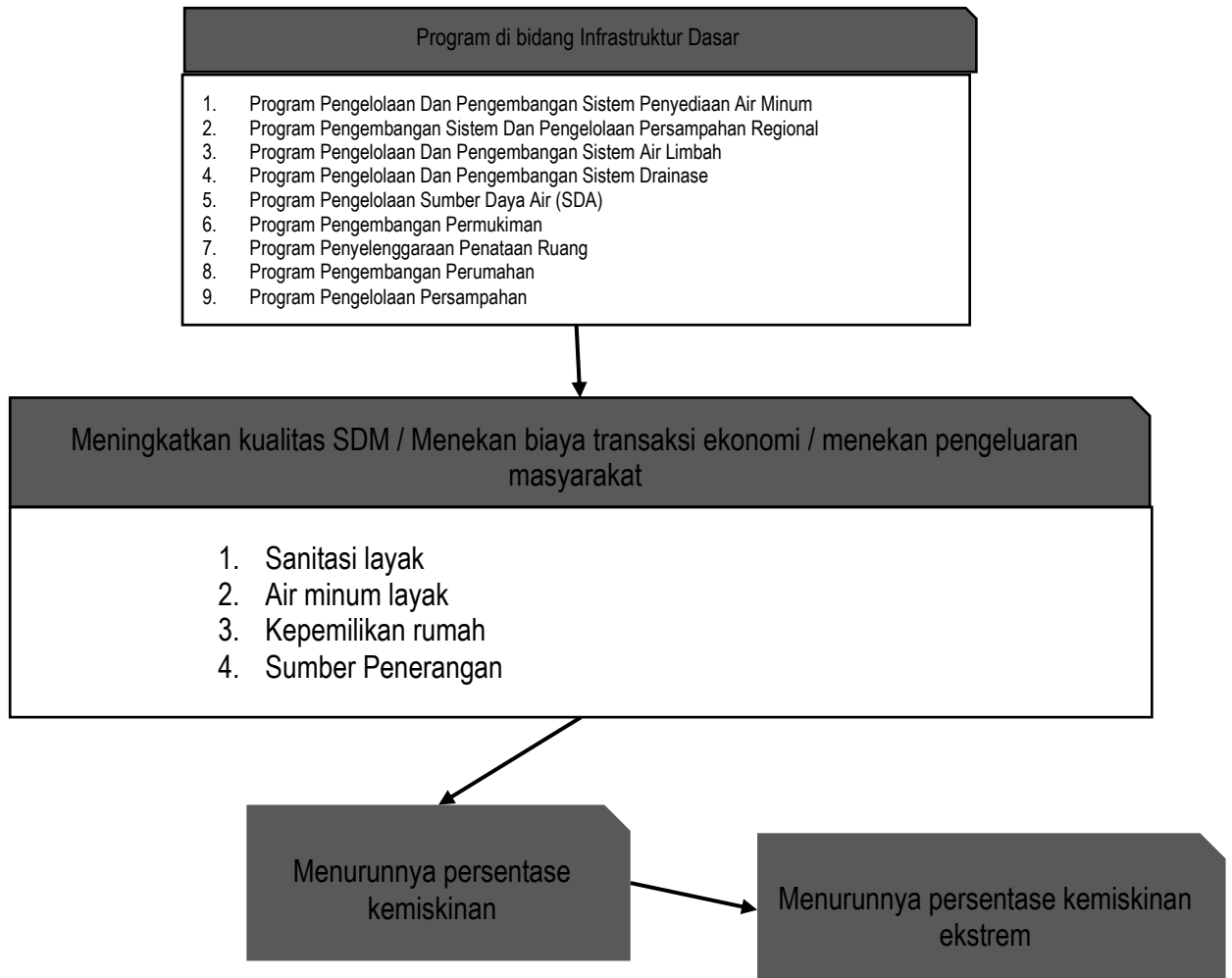


Dalam penanggulangan kemiskinan di Bidang Kesehatan terdapat 3 program yang diharapkan mampu berkontribusi dalam penurunan persentase kemiskinan dan kemiskinan ekstrem melalui peningkatan SDM, menekan pengeluaran masyarakat dan menekan biaya transaksi ekonomi.

d. Teori Perubahan Bidang Infrastruktur Dasar

Dalam penanggulangan kemiskinan di Bidang Infrastruktur Dasar, diperlukan teori perubahan agar program mampu terlaksana dengan berhasil dan berdaya guna.

Tabel 4.29 Teori Perubahan di Bidang Infrastruktur Dasar

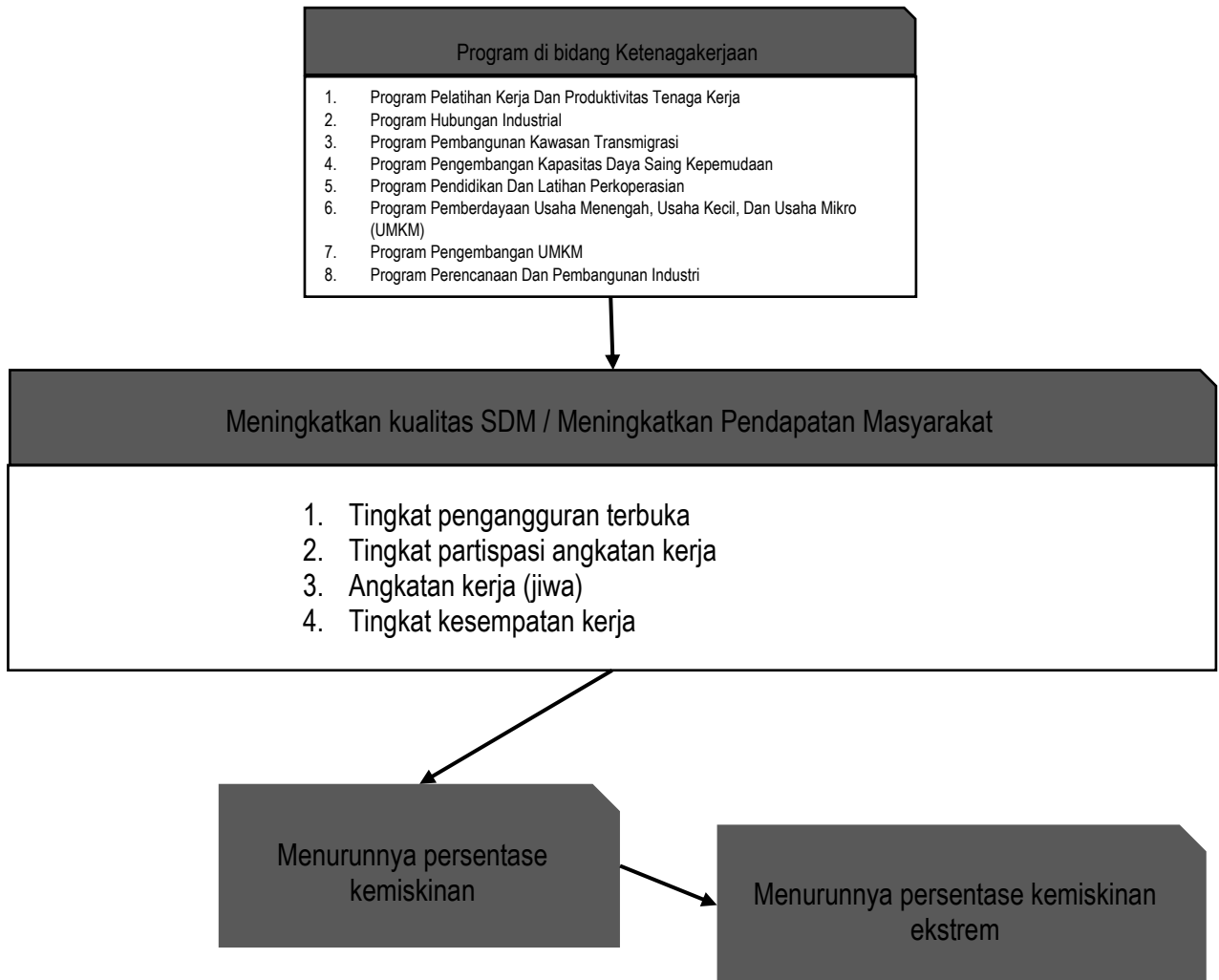


Dalam penanggulang kemiskinan di Bidang Infrastruktur Dasar terdapat 9 Program yang diharapkan mampu menurunkan persentase kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan Meningkatkan kualitas SDM / Menekan biaya transaksi ekonomi / menekan pengeluaran masyarakat

e. Teori Perubahan di Bidang Ketenagakerjaan

Penanggulangan kemiskinan di Bidang Ketenagakerjaan diperlukan teori perubahan agar mampu menghasilkan program yang berhasil dan berdaya guna. Adapun teori perubahan di Bidang Ketenagakerjaan sebagai berikut:

Tabel 4.30 Teori Perubahan Bidang Ketenagakerjaan

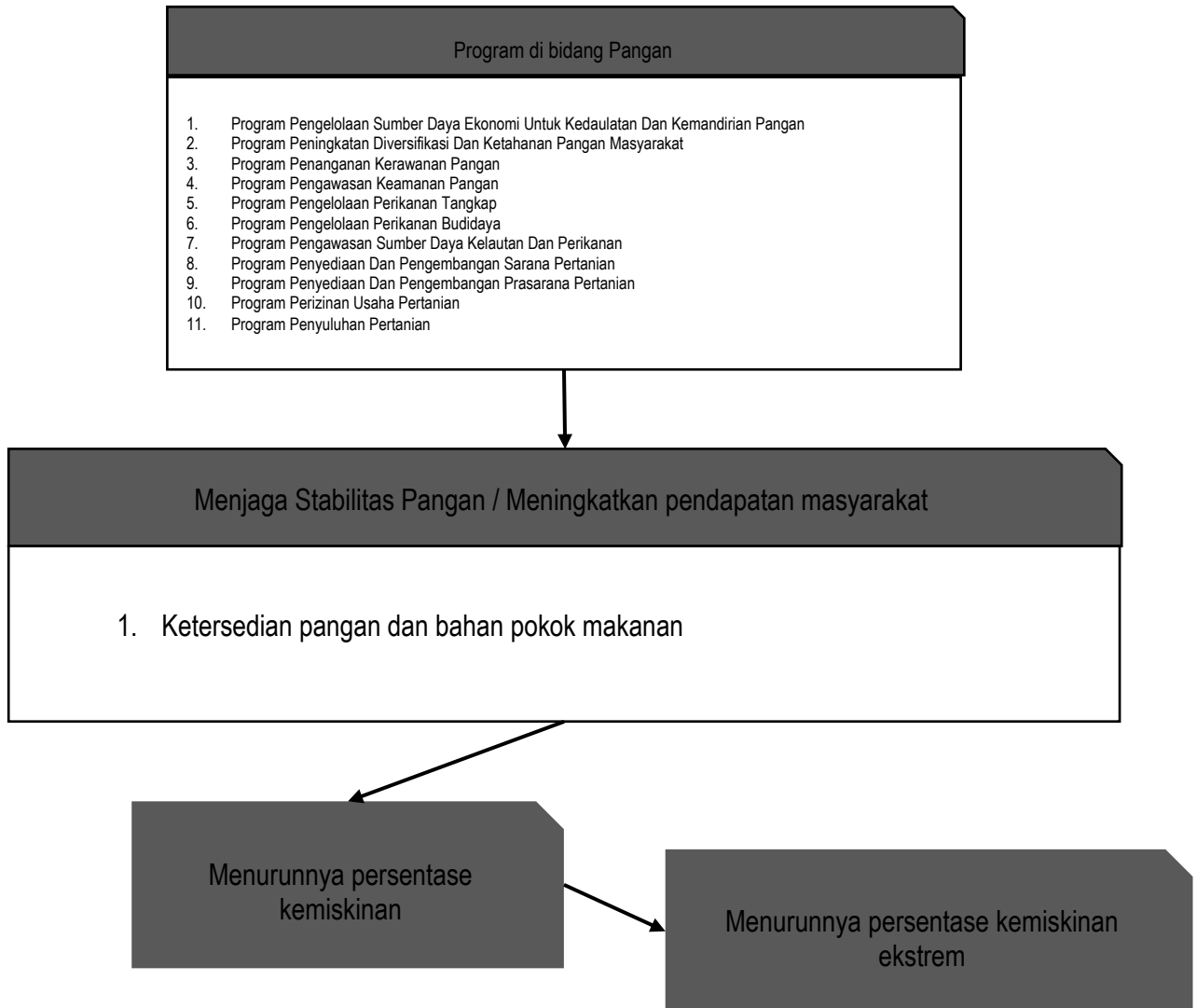


Dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Bidang Ketenagakerjaan terdapat 8 program yang berdampak dalam Meningkatkan kualitas SDM dan Meningkatkan Pendapatan Masyarakat, sehingga diharapkan mampu menurunkan persentase kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.

f. Teori Perubahan di Bidang pangan

Dalam upaya merubah suatu kondisi tertentu ke kondisi yang lainnya, diperlukan upaya yang terukur dan terpadu termasuk dalam penanggulangan kemiskinan Bidang Pangan di Kota Subulussalam diperlukan upaya yang terukur dan terpadu dalam rumusan teori perubahan. Adapun rumusan teori perubahan Bidang Pangan, sebagai berikut:

Tabel 4.31 Teori Perubahan Bidang Pangan

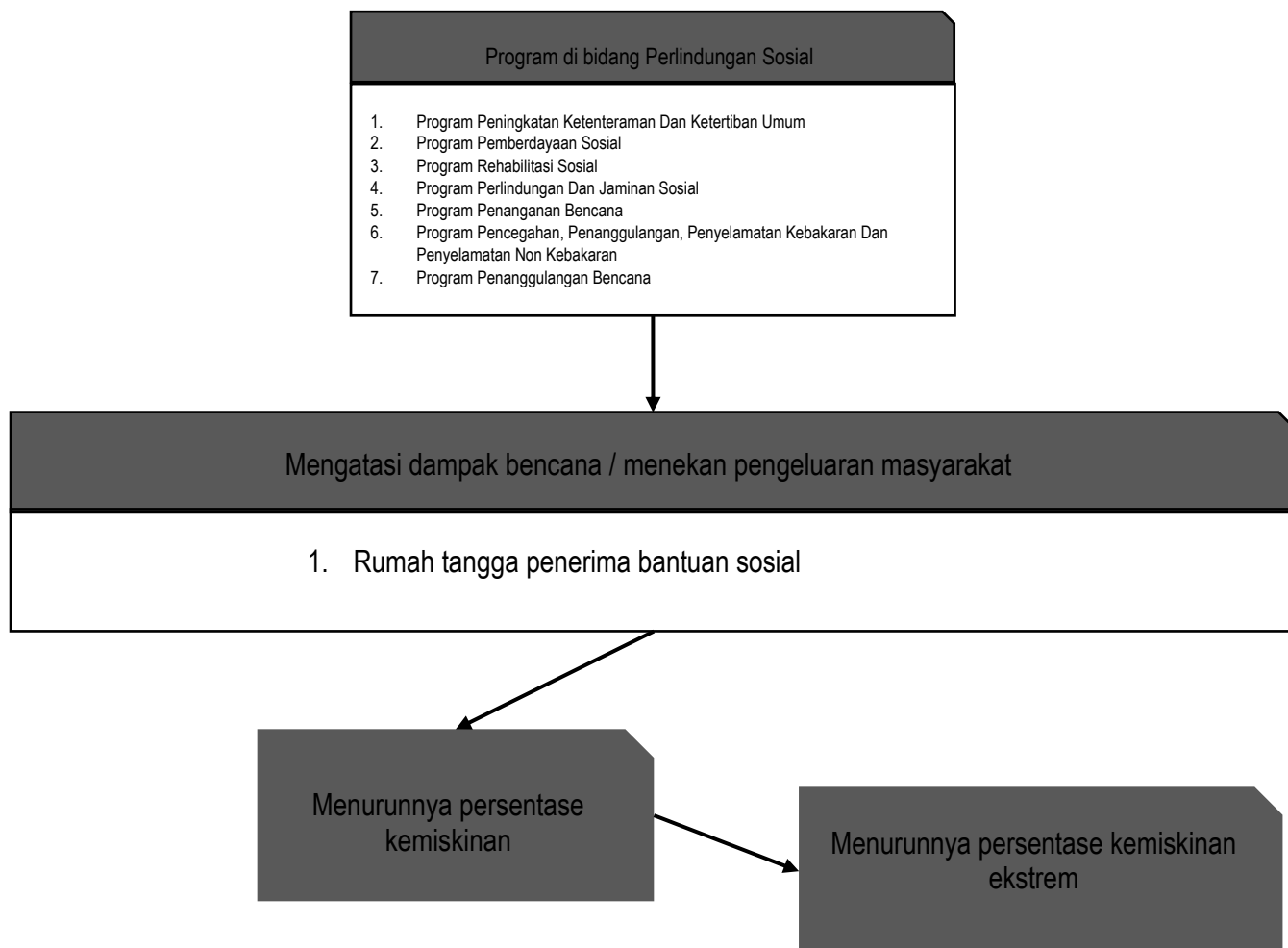


Terdapat 11 program dari beberapa perangkat daerah yang diharapkan mampu memberikan dampak dalam penurunan persentase kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan Menjaga Stabilitas Pangan dan Meningkatkan pendapatan masyarakat.

g. Teori Perubahan di Bidang Perlindungan Sosial

Dalam penanggulangan kemiskinan di Bidang Perlindungan Sosial, diperlukan teori perubahan sebagai dasar strategi pelaksanaannya. Adapun rumusan teori perubahan Bidang Perlindungan Sosial, sebagai berikut:

Tabel 4.32 Teori Perubahan di Bidang Perlindungan Sosial



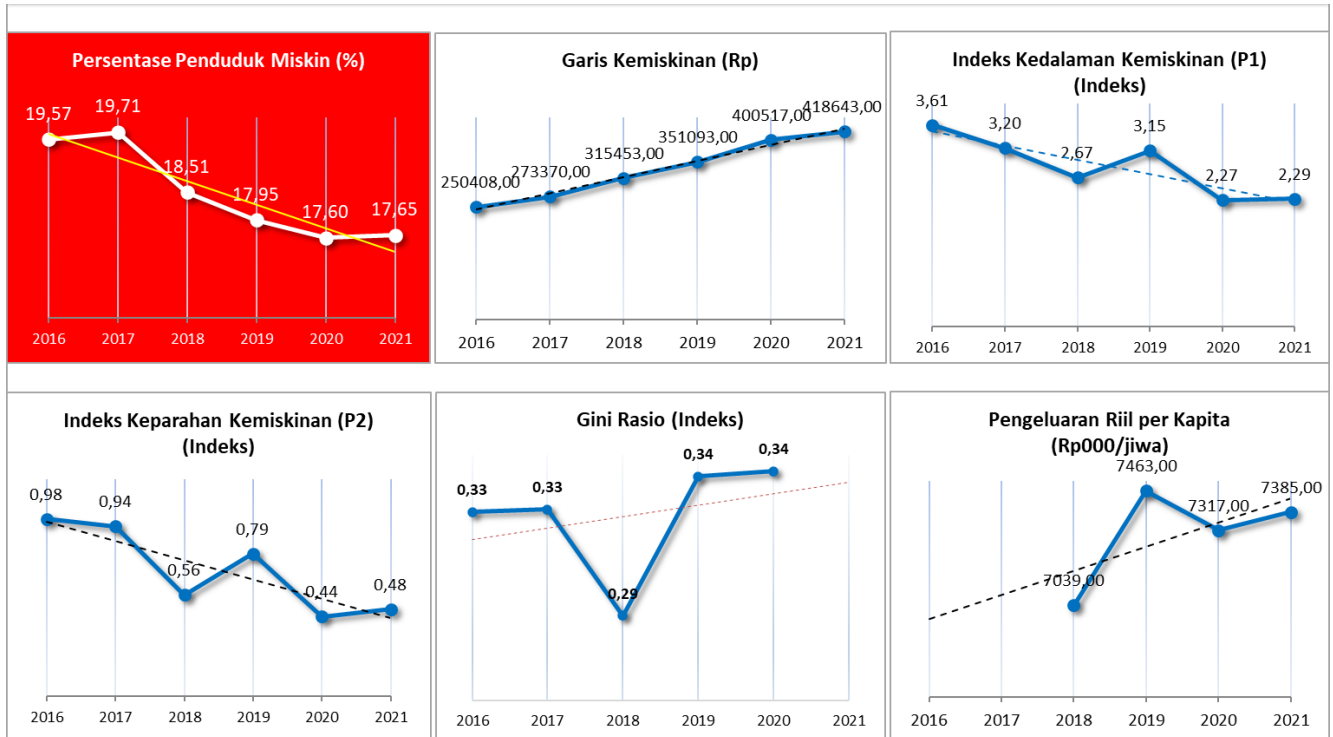
Terdapat 7 program penanggulangan kemiskinan di Bidang Perlindungan Sosial yang diharapkan mampu memberikan dampak dalam menurunkan persentase kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dengan Mengatasi dampak bencana dan menekan pengeluaran masyarakat.

4.1.2. Analisis Keterkaitan (Causal Relationship)

A. Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan

Untuk mengetahui prioritas intervensi di Kota Subulussalam, dilakukan analisis prioritas intervensi bidang kemiskinan dan dihasilkan sebagai berikut:

Gambar 4.65 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2016-2021



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari gambar diatas, pengendalian garis kemiskinan dan penurunan gini rasio menjadi dua hal yang harus menjadi perhatian. Selain itu permasalahan lain seperti peluang ekonomi perempuan dibatasi oleh akses yang tidak setara terhadap kepemilikan aset ekonomi, pendidikan, dan pekerjaan yang dibayar juga harus menjadi perhatian. Di lain pihak, perempuan memiliki tanggung jawab lebih besar untuk merawat keluarga, upah lebih sedikit dibanding laki-laki, menabung lebih sedikit, dan memiliki pekerjaan yang jauh lebih tidak aman.

Adapun Kepala Rumah Tangga Perempuan per Kecamatan di Kota Subulussalam, dapat dicermati sebagai berikut:

Tabel 4.33 Jumlah Kepala Rumah Tangga Perempuan Per Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2021

No.	Kecamatan	Usia < 45	Usia 45-59	Usia ≥ 60	Jumlah
1	Simpang Kiri	96	178	76	350
2	Penanggalan	60	77	29	166
3	Rundeng	57	92	68	217
4	Sultan Daulat	70	98	55	223

5	Longkib	20	25	16	61
Total (5)		303	470	244	1.017

Sumber: P3KE, Kemenko PMK.

Dari tabel diatas, dapat diketahui jumlah rumah tangga dengan kepala keluarga perempuan di Kota Subulussalam dengan klasifikasi umur yang beragam. Selain itu, jumlah Lansia dan Penyandang Disabilitas: Penduduk lanjut usia dan penyandang disabilitas, terlebih yang tinggal sendiri, sangat rentan menjadi miskin ekstrem karena tidak mempunyai pekerjaan dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan layak.

Adapun jumlah penduduk yang tergolong lanjut usia (lansia) di Kota Subulussalam, dapat dicermati sebagai berikut:

Tabel 4.34 Jumlah Lansia per Kecamatan di Kota Subulussalam Tahun 2021

No.	Kecamatan	60-69 tahun			70-79 tahun			≥ 80 tahun		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Simpang Kiri	180	136	316	48	41	89	12	21	33
2	Penanggalan	64	50	114	17	16	33	8	6	14
3	Rundeng	122	83	205	25	28	53	13	11	24
4	Sultan Daulat	101	73	174	26	18	44	13	5	18
5	Longkib	37	32	69	15	7	22	3	1	4
Jumlah		504	374	878	131	110	241	49	44	93

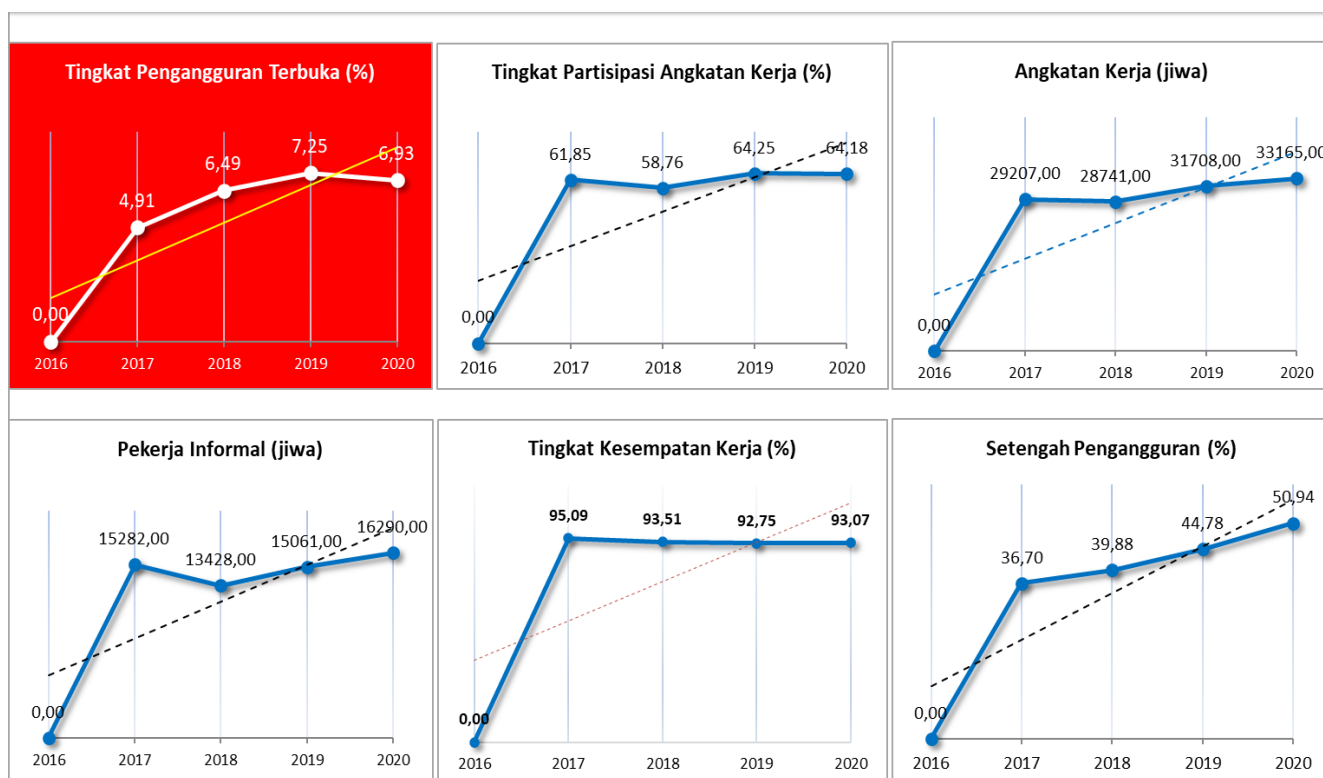
Sumber: P3KE, Kemenko PMK.

Dari tabel diatas, dapat diketahui jumlah lansia di Kota Subulussalam berdasarkan klasifikasi usai dan jenis kelamin.

B. Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan

Demikian halnya dengan bidang kemiskinan, dalam bidang ketenagakerjaan pun juga dilakukan analisis prioritas dan setelah dilakukan analisis prioritas intervensi dihasilkan sebagai berikut ini:

Gambar 4.66 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan Kota Subulussalam Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari hasil analisis diatas, ada beberapa permasalahan yang harus menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan. 1) tren tingkat pengangguran yang positif dalam 4 (empat) tahun terakhir; 2) tren positif dari jumlah pekerja informal dalam 4 (empat) tahun terakhir; serta 3) tren peningkatan persentase setengah pengangguran dalam 4 (empat) tahun terakhir.

Selain itu, untuk menjadi perhatian ialah: Akses terhadap sumber ekonomi yaitu hambatan struktural terhadap sumber mata pencaharian merupakan penyebab utama kemiskinan ekstrem sulit untuk dihapuskan. Adapun, struktur dan lapangan pekerjaan penduduk miskin ekstrem di Kota Subulussalam sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.35 Struktur dan Lapangan Pekerjaan Penduduk Miskin Ekstrem Per Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Tidak Bekerja	Petani	Nelayan	Pedagang	Pegawai Swasta	Wiraswasta	Pensiunan	Pekerja Lepas	Lainnya
1	Simpang Kiri	238	1.401	10	163	54	948	10	317	72
2	Penanggalan	82	779	6	43	66	350	2	174	33
3	Rundeng	94	978	39	77	31	152	17	550	33
4	Sultan Daulat	54	955	12	60	24	262	3	464	13

5	Longkib	27	594	2	7	9	89	1	43	8
Jumlah		495	4.707	69	350	184	1.801	33	1.548	159

Sumber: P3KE, Kemenko PMK.

Dari tabel diatas, dapat dicermati bahwa penduduk miskin ekstrem di Kota Subulussalam sebagian besar bekerja di sektor informal, yaitu sebanyak 4.707 penduduk bekerja sebagai petani, 1.801 penduduk bekerja sebagai wiraswasta dan 1.548 bekerja sebagai pekerja lepas. Dan adapun status penduduk miskin ekstrem yang bekerja dan tidak bekerja di Kota Subulussalam, sebagai berikut:

Tabel 4.36 Status Pekerjaan Penduduk Miskin Ekstrem per Kecamatan Tahun 2021

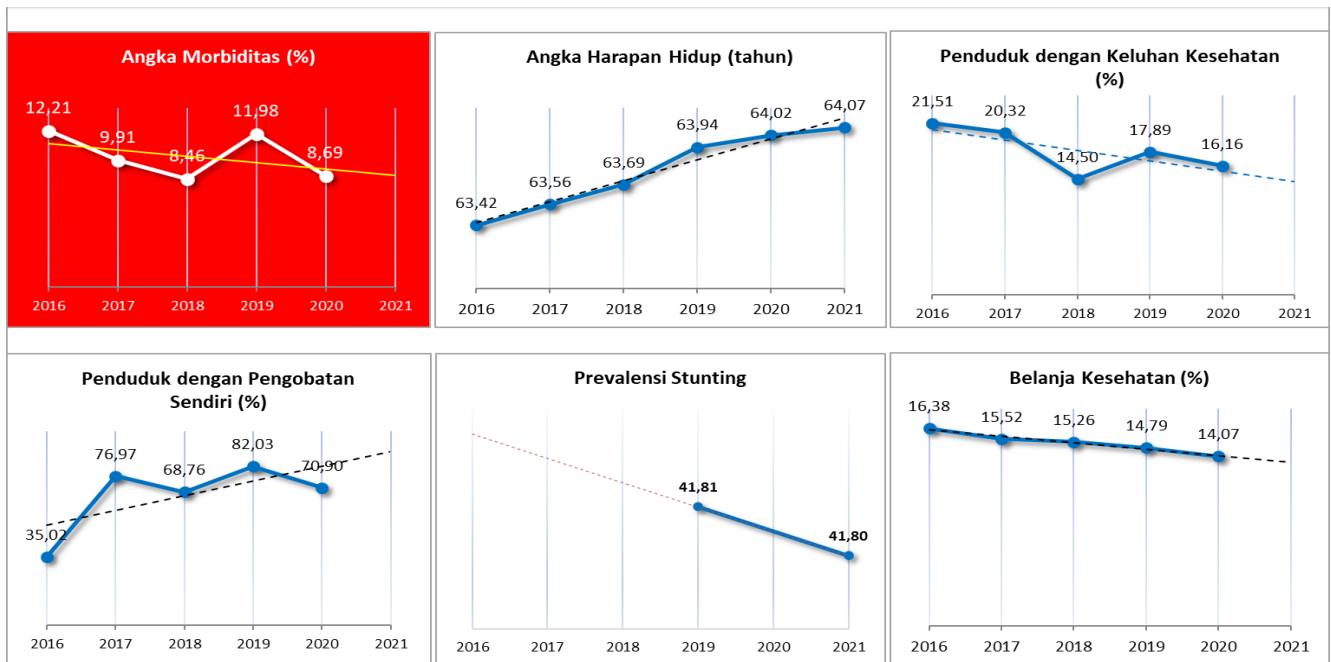
No.	Kecamatan	Umur 15 - ≥ 60 Tahun		
		Bekerja	Tidak Bekerja	Jumlah
1	Simpang Kiri	4.254	6.441	10.695
2	Penanggalan	2.477	2.560	5.037
3	Rundeng	3.177	3.399	6.576
4	Sultan Daulat	3.525	2.369	5.894
5	Longkib	1.115	1.272	2.387
Jumlah		14.548	16.041	30.589

Sumber: P3KE, Kemenko PMK.

Sebagian besar penduduk miskin ekstrem yang berumur 15 - ≥ 60 Tahun di 5 Kecamatan di Kota Subulussalam tidak bekerja atau tidak memiliki lapangan pekerjaan.

Untuk mengetahui prioritas intervensi dalam bidang kesehatan, dilakukan analisis prioritas intervensi dengan hasil sebagaimana sajian gambar berikut ini:

Gambar 4.67 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Ketenagakerjaan Kota Subulussalam Tahun 2016-2020



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari analisis prioritas intervensi diatas, yang menjadi perhatian untuk dilakukan perbaikan ialah tingginya angka prevalensi di Kota Subulussalam, walaupun pada tahun 2021 mengalami penurunan namun masih kurang signifikan.

Pemenuhan kebutuhan gizi seimbang dan hidup sehat: Kurang gizi membuat kondisi penduduk miskin ekstrem mengalami pertumbuhan intelektual yang lambat dan menjadi kurang produktif. Selain itu, kurangnya pemahaman pentingnya hidup sehat dan ketiadaan jaminan kesehatan membuat mereka rentan terhadap guncangan ekonomi akibat kondisi kesehatan.

Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, diperlukan sumber air minum dan sanitasi yang layak. Adapun sumber air minum rumah tangga penduduk miskin ekstrem per kecamatan di Kota Subulussalam, sebagai berikut:

Tabel 4.37 Sumber Air Minum Rumah Tangga Penduduk Miskin Ekstrem per Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Air Kemasan / Isi Ulang	Leding / PAM	Sumber Terlindung	Sumber Tidak Terlindung	Lainnya
1	Simpang Kiri	182	2	2.669	333	27
2	Penanggalan	18	369	838	265	45
3	Rundeng	84	5	1.161	720	1
4	Sultan Daulat	216	127	1.253	246	5
5	Longkib	14	5	503	257	1

Jumlah	514	508	6424	1821	79
---------------	------------	------------	-------------	-------------	-----------

Sumber: P3KE, Kemenko PMK.

Dari tabel diatas, dapat diketahui masih banyaknya rumah tangga miskin ekstrem yang belum memiliki sumber air minum yang terlindungi. Dan adapun akses sanitasi layak bagi rumah tangga penduduk miskin ekstrem per kecamatan di Kota Subulussalam, sebagai berikut:

Tabel 4.38 Akses Sanitasi Layak Rumah Tangga Penduduk Miskin Ekstrem per Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Dengan Septik Tank	Tanpa Septik Tank	Jamban Umum/ Bersama	Lainnya
1	Simpang Kiri	2.839	186	150	38
2	Penanggalan	1.344	114	28	49
3	Rundeng	1.488	102	362	19
4	Sultan Daulat	1.459	91	264	33
5	Longkib	494	77	160	49
Jumlah		7.624	570	964	188

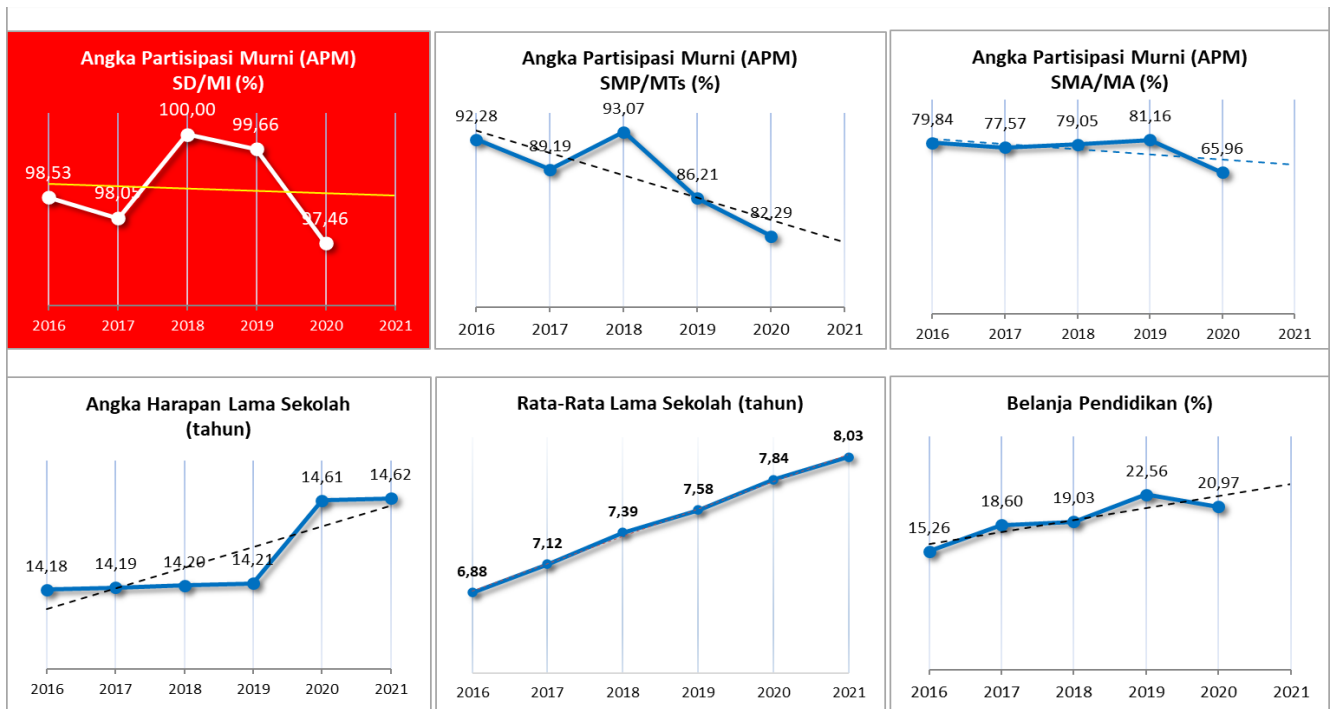
Sumber: P3KE, Kemenko PMK.

Dari tabel diatas, dapat diketahui masih banyak penduduk miskin ekstrem yang belum memiliki atau mendapatkan akses sanitasi yang layak.

D. Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan

Dalam bidang pendidikan di Kota Subulussalam, setelah dilakukan analisis prioritas intervensi dengan hasil berikut:

Gambar 4.68 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Pendidikan Kota Subulussalam Tahun 2016-2021



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari sajian hasil analisis diatas, dapat diketahui tren angka partisipasi murni baik tingkat SD/MI maupun SMP/MTs dan SMA/MA, ketiganya mengalami penurunan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal tersebut menjadi perhatian bersama untuk dilakukan perbaikan di bidang pendidikan.

Selain itu, akses dan informasi tentang pendidikan yaitu keterbatasan akses dan informasi pentingnya pendidikan menghambat individu untuk memperoleh pendidikan formal maupun informal. Hal ini menyebabkan mereka kurang mempunyai keterampilan dan kemampuan berkompetisi di pasar kerja harus juga menjadi perhatian. Karena Pendidikan merupakan salah satu jalan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.

Adapun jumlah penduduk miskin ekstrem yang dapat dan tidak dapat mengakses pendidikan sebagai berikut:

Tabel 4.39 Status Pendidikan Anak Usia Sekolah Penduduk Miskin Ekstrem Per Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Bersekolah				Tidak Bersekolah			
		7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun	Jumlah	7-12 tahun	13-15 tahun	16-18 tahun	Jumlah
1	Simpang Kiri	1.657	1.157	1.137	3.951	852	71	66	989
2	Penanggalan	881	627	561	2.069	398	26	20	444
3	Rundeng	1.122	799	829	2.750	437	11	8	456
4	Sultan Daulat	983	668	669	2.320	461	20	26	507

5	Longkib	415	277	286	978	162	6	1	169
Jumlah		5.058	3.528	3.482	12.068	2.310	134	121	2.565

Sumber: P3KE, Kemenko PMK.

Dari tabel diatas, dapat dicermati masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat mengakses atau mengenyam pendidikan. Sedangkan, tingkat pendidikan penduduk miskin ekstrem dapat dicermati dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.40 Jenjang Pendidikan Penduduk Miskin Ekstrem per Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Jenjang Pendidikan			
		SD/Sederajat	SMP/Sederajat	SMA/Sederajat	Perguruan Tinggi
1	Simpang Kiri	2.598	1.250	1.160	72
2	Penanggalan	1.364	626	598	34
3	Rundeng	1.797	854	825	63
4	Sultan Daulat	1.545	735	635	47
5	Longkib	665	313	217	21
Jumlah		7.969	3.778	3.435	237

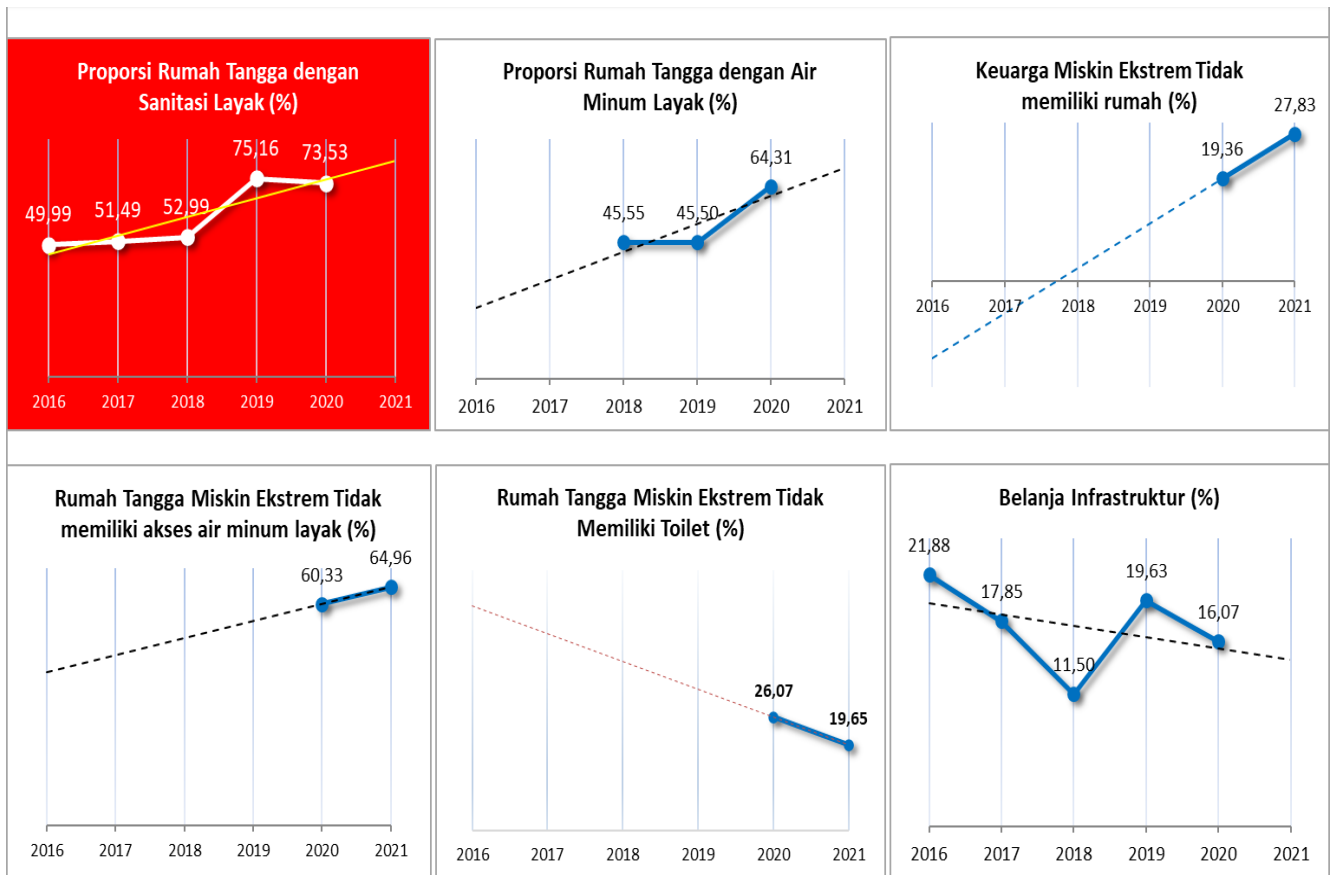
Sumber: P3KE, Kemenko PMK.

Dari tabel diatas, dapat dicermati masih rendahnya capaian pendidikan penduduk miskin ekstrem dan akses untuk mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi.

E. Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar

Untuk mengetahui prioritas intervensi bidang infrastruktur dasar, dilakukan analisis prioritas intervensi dan menghasilkan sajian gambar berikut:

Gambar 4.69 Analisis Prioritas Intervensi Bidang Infrastruktur Dasar Kota Subulussalam Tahun 2016-2021



Sumber: BPS, diolah Aplikasi Analisis Situasi Kemiskinan dan Anggaran Daerah 2021, TNP2K

Dari sajian gambar prioritas intervensi di atas, ditemukan permasalahan yaitu: meningkatnya keluarga miskin ekstrem yang tidak memiliki air minum layak dan rumah tangga miskin yang tidak memiliki rumah dalam 2 tahun terakhir. Hal tersebut haruslah menjadi perhatian bersama untuk melakukan perbaikan-perbaikan kemiskinan di bidang infrastruktur dasar.

Walaupun demikian, akses penerangan juga menjadi salah satu permasalahan kemiskinan bidang infrastruktur di Kota Subulussalam.

Adapun status kepemilikan rumah bagi rumah tangga penduduk miskin ekstrem per kecamatan di Kota Subulussalam, sebagai berikut:

Tabel 4.41 Status Hunian Rumah Tangga Penduduk Miskin Ekstrem per Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Milik Sendiri	Sewa/Kontrak	Bebas Sewa	Lainnya
-----	-----------	---------------	--------------	------------	---------

1	Simpang Kiri	2.444	404	71	294
2	Penanggalan	1.153	147	60	175
3	Rundeng	1.673	22	54	222
4	Sultan Daulat	1.517	64	77	189
5	Longkib	607	25	22	126
Jumlah		7.394	662	284	1.006

Sumber: P3KE, Kemenko PMK.

Dari tabel diatas, dapat dicermati masih banyaknya rumah tangga yang belum memiliki hunian sendiri. Adapun sumber penerangan bagi rumah tangga penduduk miskin ekstrem per kecamatan di Kota Subulussalam, sebagai berikut

Tabel 4.42 Sumber Penerangan Rumah Tangga Penduduk Miskin Ekstrem Per Kecamatan Tahun 2021

No.	Kecamatan	Listrik PLN	Listrik Non PLN	Bukan Listrik
1	Simpang Kiri	3.022	186	5
2	Penanggalan	1.469	54	12
3	Rundeng	1.865	88	18
4	Sultan Daulat	1.713	127	7
5	Longkib	550	224	6
Jumlah		8.619	679	48

Sumber: P3KE, Kemenko PMK.

Dari tabel diatas, dapat dicermati masih banyaknya penduduk atau rumah tangga miskin yang tidak dapat menggunakan sumber penerangan dari PLN atau bahkan tidak mengakses listrik sama sekali.

4.1.3. Analisis Kondisi Fiskal

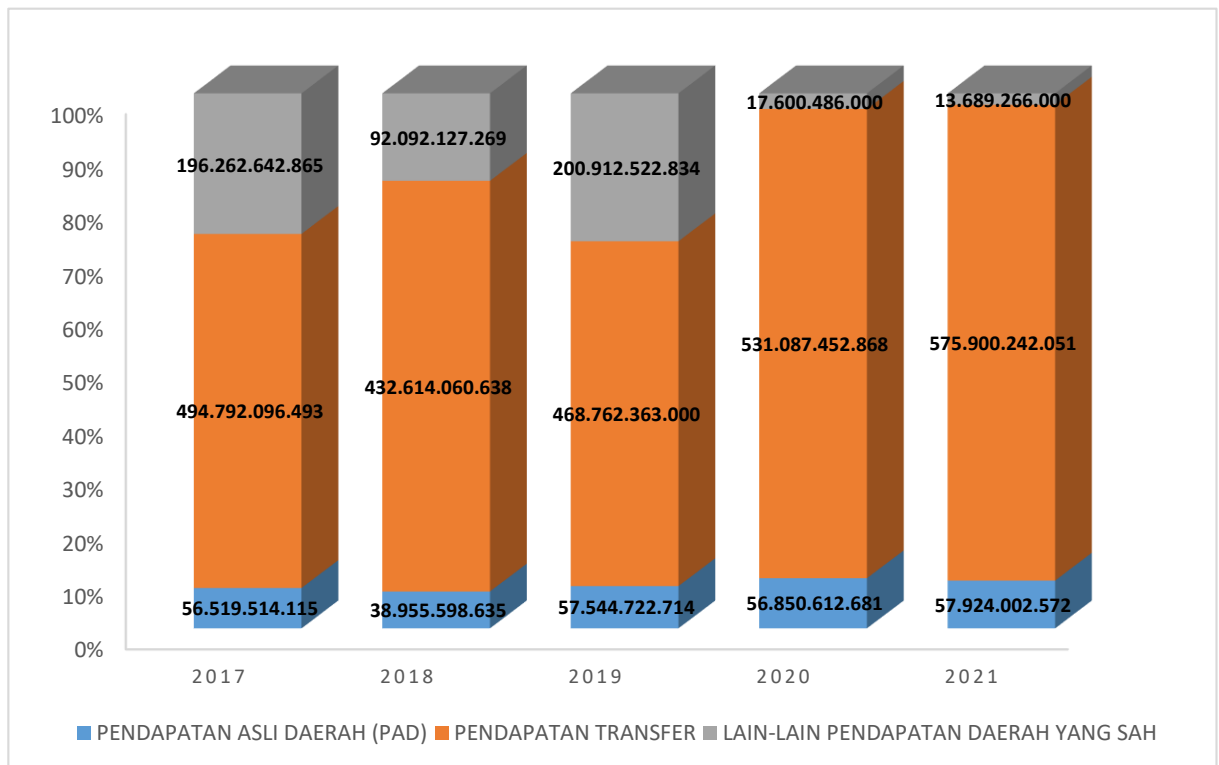
Kondisi keuangan daerah pada lingkup Pemerintah Kota Subulussalam tidak terlepas dari kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditempuh, baik pengelolaan terhadap upaya-upaya optimalisasi target Penerimaan Daerah hingga mobilisasi sumber-sumber yang tersedia untuk percepatan pelaksanaan program prioritas pembangunan melalui Pengeluaran Daerah.

Dalam rangka pelayanan publik, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di berbagai sektor. APBD merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan dengan peraturan daerah, sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakat mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan DPRK. APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

A. Analisis Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan pendapatan lainnya. Dalam kurun lima tahun terakhir (2017-2021), komposisi pendapatan daerah dapat dicermati dalam gambar berikut:

Gambar 4.70 Komposisi Pendapatan Daerah Kota Subulussalam Tahun 2017 – 2021



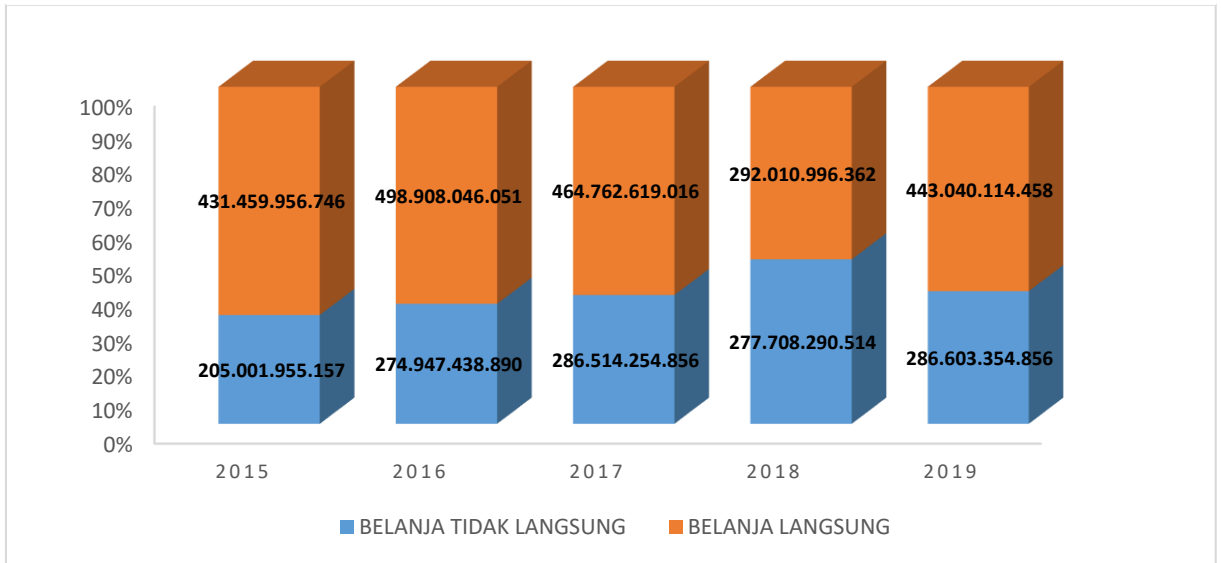
Sumber: BPKD Kota Subulussalam

Dari gambar diatas, dapat dicermati bahwa komposisi Pendapatan Daerah di dominasi oleh pendapatan transfer, kemudian diikuti oleh pendapatan daerah lainnya yang sah pada tahun 2017 – 2019. Namun pada tahun 2020 – 2021, komposisi pendapatan asli daerah menjadi persentase kedua tertinggi setelah pendapatan transfer.

B. Analisis Belanja Daerah

Komponen belanja daerah menggambarkan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanjanya untuk pelayanan publik. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015-2019) komposisi belanja daerah, dapat di cermati dalam gambar berikut:

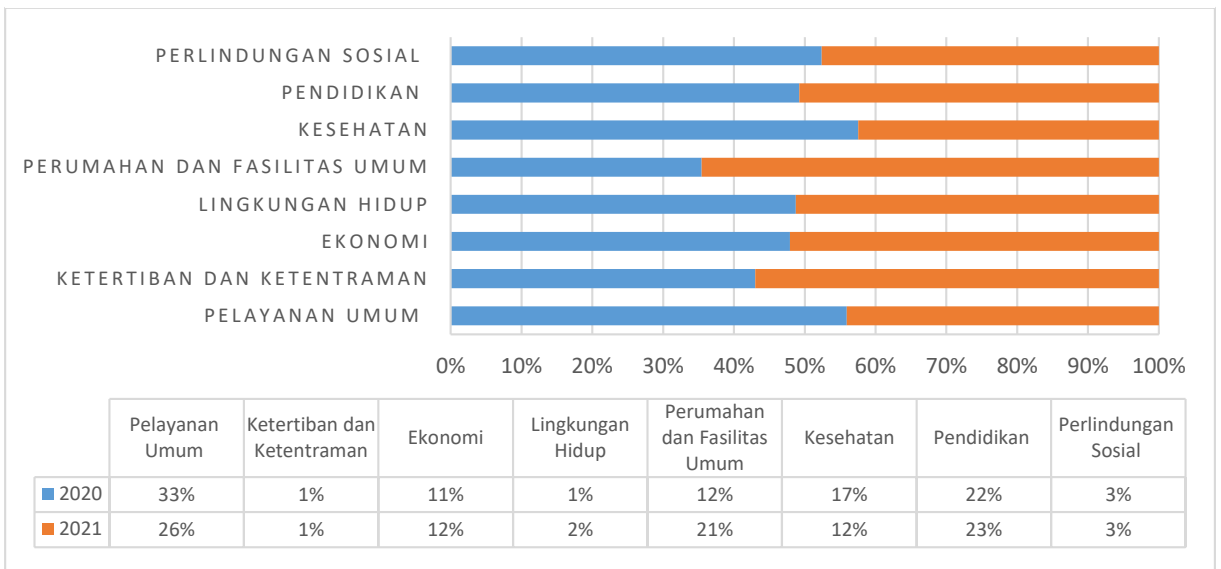
Gambar 4.71 Komposisi Belanja Daerah Kota Subulussalam Tahun 2017 – 2021



Sumber: BPKD Kota Subulussalam

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa belanja langsung menjadi belanja dengan proporsi terbesar dalam kurun 5 tahun terakhir. Sedangkan realisasi belanja menurut fungsi pelayanan dapat dicermati dalam gambar berikut:

Gambar 4.72 Komposisi Belanja Daerah Kota Subulussalam Berdasarkan Fungsi Pelayanan Tahun 2020 – 2021



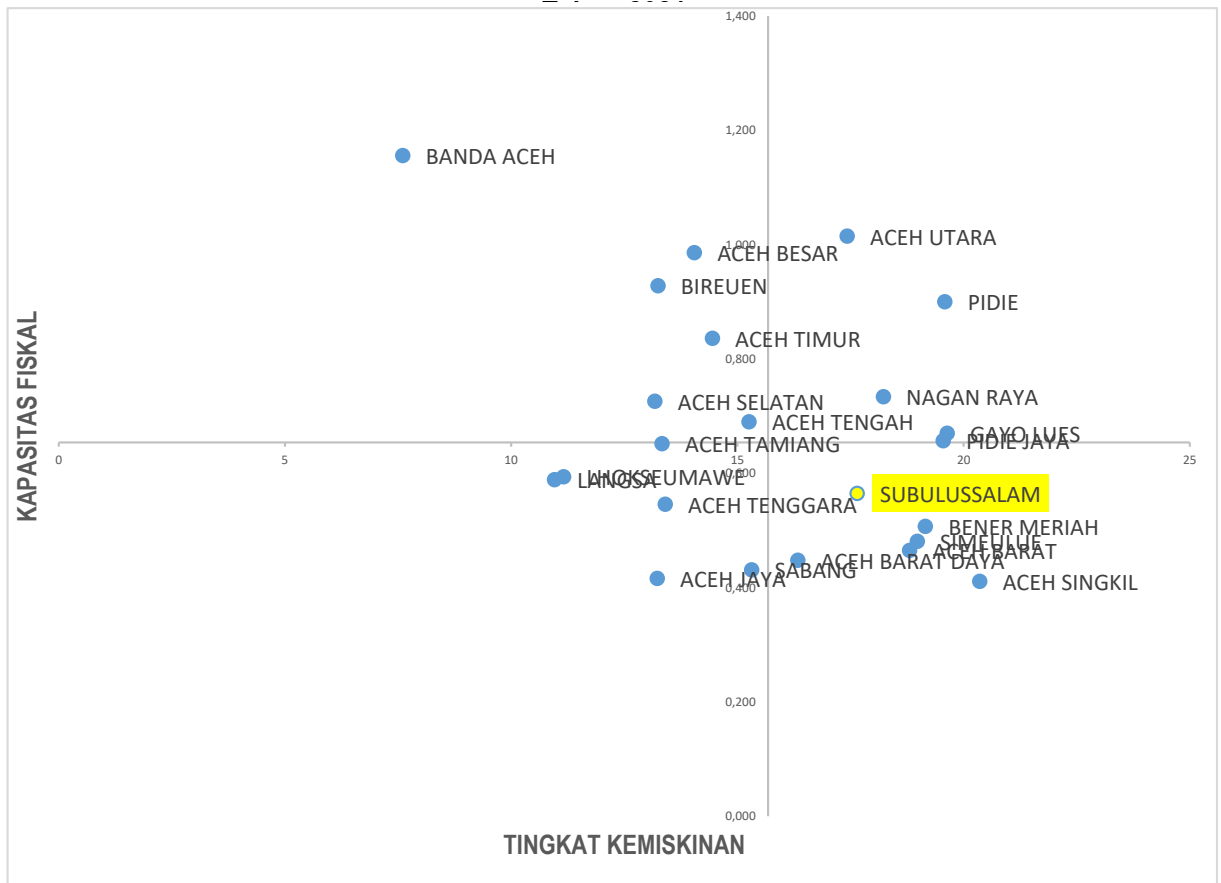
Sumber: BPKD Kota Subulussalam

Dari gambar diatas, dapat diketahui bahwa belanja daerah dengan proporsi lima (5) terbesar digunakan untuk fungsi pelayanan: Pelayanan Umum, Pendidikan, Kesehatan, Perumahan dan Fasilitas Umum dan Ekonomi pada tahun 2020 dan untuk fungsi pelayanan: Pelayanan Umum, Pendidikan, Perumahan dan Fasilitas Umum , Kesehatan dan Ekonomi pada tahun 2021.

C. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah yang setiap tahunnya di rilis oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan. Pada tahun 2021 indeks kapasitas fiskal daerah sebesar 0,565 dengan kategori rendah. Jika dilakukan analisis kuadran prioritas terhadap indeks kapasitas fiskal daerah dan persentase kemiskinan Kab/Kota di Provinsi Aceh, maka diperoleh sebagai berikut:

Gambar 4.73 Kuadran Prioritas Kapasitas Fiskal Daerah dan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh



Sumber: PMK No. 116/PMK.07/2021

Berdasarkan kuadran prioritas diatas, diketahui Kota Subulussalam dengan kondisi angka kemiskinan cukup tinggi dan indeks kapasitas fiskal yang rendah menempatkan Kota Subulussalam pada kuadran prioritas kedua.

4.2. Strategi, Kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan

Berdasarkan Pasal 17 Permendagri 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, di jelaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

- pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
- peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- pengembangan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan

d. sinergi kebijakan dan Program Penanggulangan Kemiskinan.

Sedangkan dalam Pasal 18 Permendagri 53 Tahun 2020 program penanggulangan kemiskinan terdiri atas:

- a. program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan; dan
- c. program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.

Tabel 4.43 Matriks Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2023-2026

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Cakupan Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang pendidikan TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs	76.233.562.755	69.961.594.709	0,95	39.715.108.000	0,95	39.969.116.550	0,95	39.969.116.550	0,95	40.968.344.464	Disdikbud	Meningkatkan Kualitas SDM
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase cakupan angka partisipasi murni (APN) Jenjang pendidikan SD/MI	50.919.491.390	49.898.699.664	0,95	21.162.313.150	0,95	26.320.738.000	0,95	26.320.738.000	0,95	26.978.756.450	Disdikbud	Meningkatkan Kualitas SDM
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Cakupan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan SMP/MTs	16.175.805.889	13.309.563.389	0,95	11.262.625.800	0,95	7.208.729.550	0,95	7.208.729.550	0,95	7.388.947.789	Disdikbud	Meningkatkan Kualitas SDM
Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Cakupan Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang Pendidikan PAUD	8.716.135.476	6.658.901.656	0,95	6.663.069.050	0,95	5.690.461.000	0,95	5.690.461.000	0,95	5.832.722.525	Disdikbud	Meningkatkan Kualitas SDM
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase pendidikan nonformal/ kesetaraan yang dikelola dengan baik	422.130.000	94.430.000	0,95	627.100.000	0,95	749.188.000	0,95	749.188.000	0,95	767.917.700	Disdikbud	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Persentase Tenaga Pendidik dan Pendidikan Dayah Yang Memenuhi Standar Kompetensi	32.960.900	31.049.300	0,88	32.960.900	0,89	25.120.900	0,88	25.120.900	0,89	25.748.923	Sekretariat MPD	Meningkatkan Kualitas SDM
Pengelolaan Pendidikan Dayah	Meningkatnya persentase Dayah yang menerapkan standar manajemen Dayah	32.960.900	31.049.300	87,6%	32.960.900	88,5%	25.120.900	87,6%	25.120.900	88,5%	25.748.923	Sekretariat MPD	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH	Rata-rata Sarjana per Kampung	400.850.600	397.447.400	16 Orang	150.850.600	18 Orang	121.284.600	16 Orang	121.284.600	18 Orang	124.316.715	Sekretariat MPD	Meningkatkan Kualitas SDM
Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh	Persentase Mutu Pendidikan di semua tingkatan Pendidikan	32.640.800	32.640.800	94,5 %	32.640.800	94,5 %	21.020.800	94,5 %	21.020.800	94,5 %	21.546.320	Sekretariat MPD	Meningkatkan Kualitas SDM
Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh	Persentase siswa yang melanjutkan ke Perguruan tinggi	327.411.800	326.255.000	94,5 %	77.411.800	94,5 %	60.057.800	94,5 %	60.057.800	94,5 %	61.559.245	Sekretariat MPD	Meningkatkan Kualitas SDM
Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Persentase Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	40.798.000	38.551.600	94,5 %	40.798.000	94,5 %	40.206.000	94,5 %	40.206.000	94,5 %	41.211.150	Sekretariat MPD	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN	Persentase Pelayanan Kesehatan Yang Terlaksana	24.722.208.611	20.176.756.266	0,80	14.643.759.297	0,80	19.439.086.711	0,80	19.439.086.711	0,80	19.925.063.879	Dinkes	Menurunkan Beban Pengeluaran

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT													
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Fasilitas Kesehatan	8.066.428.266	7.507.414.312	0,80	6.854.803.000	0,80	4.866.200.000	0,80	4.866.200.000	0,80	4.987.855.000	Dinkes	Menurunkan Beban Pengeluaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kesehatan	16.605.775.145	12.619.336.754	0,80	7.738.951.097	0,80	14.532.886.729	0,80	14.532.886.729	0,80	14.896.208.897	Dinkes	Menurunkan Beban Pengeluaran
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Data Base Informasi Kesehatan	50.005.200	50.005.200	0,80	50.005.200	0,80	39.999.982	0,80	39.999.982	0,80	40.999.982	Dinkes	Mengurangi Biaya Transaksi Ekonomi
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN													
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sumber Daya Tenaga Kesehatan	22.999.999	12.999.999	0,80	1.088.124.999	0,80	977.136.949	0,80	977.136.949	0,80	1.001.565.373	Dinkes	Meningkatkan Kualitas SDM
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Izin Praktik	8.000.000	8.000.000	0,80	8.000.000	0,80	20.000.000	0,80	20.000.000	0,80	20.500.000	Dinkes	Meningkatkan Kualitas SDM
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Kebutuhan Tenaga Kesehatan	4.999.999	4.999.999	0,80	206.627.999	0,80	233.639.949	0,80	233.639.949	0,80	239.480.948	Dinkes	Meningkatkan Kualitas SDM
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	10.000.000	-	0,80	873.497.000	0,80	723.497.000	0,80	723.497.000	0,80	741.584.425	Dinkes	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN													
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang	Persentase Ketersediaan Obat dan Alat Kesehatan	99.166.000	95.346.000	0,80	294.876.000	0,80	283.630.000	0,80	283.630.000	0,80	290.720.750	Dinkes	Menurunkan Beban Pengeluaran
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang	Persentase Sertifikat P- IRT	-	-	0,80	128.278.000	0,80	127.850.000	0,80	127.850.000	0,80	131.046.250	Dinkes	Menurunkan Beban Pengeluaran

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga													
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase Rumah Industri Yang Memenuhi Syarat	99.166.000	95.346.000	0,80	166.598.000	0,80	155.780.000	0,80	155.780.000	0,80	159.674.500	Dinkes	Menurunkan Beban Pengeluaran
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Cakupan ketersediaan obat	22.152.435.984	18.288.131.293	0,89	2.300.000.000	0,93	10.840.170.000	0,89	10.840.170.000	0,93	11.111.174.250	RSUD	Menurunkan Beban Pengeluaran
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	cakupan ketersediaan obat	22.152.435.984	18.288.131.293	92.56%	2.300.000.000	98.78%	3.000.000.000	92.56%	3.000.000.000	98.78%	3.075.000.000	RSUD	Menurunkan Beban Pengeluaran
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	-	-	0,95	-	0,95	7.840.170.000	0,95	7.840.170.000	0,95	8.036.174.250	RSUD	Menurunkan Beban Pengeluaran
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Meningkatnya Persentase Cakupan Rumah Tangga Menggunakan Air Minum Layak	7.757.468.700	5.457.221.526	0,93	8.430.881.000	0,93	6.656.000.000	0,93	6.656.000.000	0,93	6.822.400.000	PUPR	Menurunkan Beban Pengeluaran
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan cakupan Layanan Sistem Penyediaan Air Minum	7.757.468.700	5.457.221.526	0,93	8.430.881.000	0,93	6.656.000.000	0,93	6.656.000.000	0,93	6.822.400.000	PUPR	Menurunkan Beban Pengeluaran
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Meningkatnya Persentase Akses Sanitasi Layak	-	-	0,59	600.000.000	0,62	-	0,59	-	0,62	-	PUPR	Mengatasi Dampak Bencana
Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-	0,59	600.000.000	0,62	-	0,59	-	0,62	-	PUPR	Mengatasi Dampak Bencana
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Meningkatnya Persentase Akses Sanitasi Layak	4.004.520.000	4.004.520.000	0,81	5.039.126.000	0,83	11.400.000.000	0,81	11.400.000.000	0,83	11.685.000.000	PUPR	Mengatasi Dampak Bencana

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan cakupan Layanan Sistem Air Limbah Domestik	4.004.520.000	4.004.520.000	0,81	5.039.126.000	0,83	11.400.000.000	0,81	11.400.000.000	0,83	11.685.000.000	PUPR	Mengatasi Dampak Bencana
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Meningkatnya Persentase Akses Sanitasi Layak	11.620.595.609	8.925.035.182	0,15	7.491.000.000	0,15	51.000.000	0,15	51.000.000	0,15	52.275.000	PUPR	Mengatasi Dampak Bencana
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi baik	11.620.595.609	8.925.035.182	0,15	7.491.000.000	0,15	51.000.000	0,15	51.000.000	0,15	52.275.000	PUPR	Mengatasi Dampak Bencana
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Peningkatan Persentase Layanan Sistem Irigasi	28.461.000.351	25.694.233.500	0,10	3.013.000.000	0,10	2.000.000	0,10	2.000.000	0,10	2.050.000	PUPR	Mengatasi Dampak Bencana
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan cakupan Luas Pengelolaan Wilayah Sungai (WS) Kabupaten/Kota	27.961.000.351	25.694.233.500	0,10	3.013.000.000	0,10	2.000.000	0,10	2.000.000	0,10	2.050.000	PUPR	Mengatasi Dampak Bencana
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	29.939.416.363	22.432.226.801	0,99	17.048.000.000	0,99	-	0,99	-	0,99	-	PUPR	Menurunkan Beban Pengeluaran
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penanganan Kumuh Kab/Kota	29.939.416.363	22.432.226.801	0,99	17.048.000.000	0,99	-	0,99	-	0,99	-	PUPR	Menurunkan Beban Pengeluaran
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Terpenuhinya Kebutuhan perumahan yang layak huni bagi masyarakat miskin	139.496.800	24.096.800	0,81	74.096.800	83,41 %	21.000.000	0,81	21.000.000	83,41 %	21.525.000	PUPR	Mengurangi Biaya Transaksi Ekonomi
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Persentase meningkatnya layanan penataan bangunan Gedung	139.496.800	24.096.800	0,81	74.096.800	0,83	21.000.000	0,81	21.000.000	0,83	21.525.000	PUPR	Mengurangi Biaya Transaksi Ekonomi

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Peningkatan dan pembinaan SDM di Bidang Jasa Konstruksi	-	-	0,65	-	0,70	1.000.000	0,65	1.000.000	0,70	1.025.000	PUPR	Menurunkan Beban Pengeluaran
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Meningkatnya Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-	1 Keg	-	1 Keg	1.000.000	1 Keg	1.000.000	1 Keg	1.025.000	PUPR	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terpenuhinya Kebutuhan Perumahan Yang layak Huni Bagi Masyarakat Miskin	387.992.000	387.992.000	1 Dok	-	1 Dok	4.096.800	1 Dok	4.096.800	1 Dok	4.199.220	PUPR	Menurunkan Beban Pengeluaran
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Meningkatnya Layanan Perencanaan Tata Ruang Kota	387.992.000	387.992.000	1 Dok	-	1 Dok	4.096.800	1 Dok	4.096.800	1 Dok	4.199.220	PUPR	Mengatasi Dampak Bencana
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya Kebutuhan perumahan yang layak huni bagi masyarakat miskin	10.134.227.385	7.360.864.004	0,94	3.497.973.311	0,95	2.000.000	0,94	2.000.000	0,95	2.050.000	PUPR	Menurunkan Beban Pengeluaran
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Layanan Permukiman Kumuh kab/Kota	3.484.452.604	1.881.322.504	0,96	1.516.000.000	0,96	1.000.000	0,96	1.000.000	0,96	1.025.000	PUPR	Menurunkan Beban Pengeluaran
Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Peningkatan Layanan Permukiman Kumuh kab/Kota	6.649.774.781	5.479.541.500	0,92	1.981.973.311	0,93	1.000.000	0,92	1.000.000	0,93	1.025.000	PUPR	Mengatasi Dampak Bencana
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	356.680.800	117.430.500	0,08	69.261.400	0,07	69.261.400	0,08	69.261.400	0,07	70.992.935	Satpol PP - WH	Menurunkan Beban Pengeluaran
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Kentrantibmas	117.430.500	117.430.500	12 bulan	69.261.400	12 bulan	69.261.400	12 bulan	69.261.400	12 bulan	70.992.935	Satpol PP - WH	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	474.058.490	469.858.490	0,60	30.000.000	0,60	42.000.000	0,60	42.000.000	0,60	43.050.000	Dinsos	Menurunkan Beban Pengeluaran
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	474.058.490	469.858.490	0,60	30.000.000	0,60	42.000.000	0,60	42.000.000	0,60	43.050.000	Dinsos	Menurunkan Beban Pengeluaran

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis diluar panti	425.005.600	425.005.550	1,00	68.884.600	1,00	135.046.500	1,00	135.046.500	1,00	138.422.663	Dinsos	Menurunkan Beban Pengeluaran
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti	45.850.600	45.850.550	1,00	55.850.600	1,00	95.102.350	1,00	95.102.350	1,00	97.479.909	Dinsos	Menurunkan Beban Pengeluaran
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti	379.155.000	379.155.000	1,00	13.034.000	1,00	39.944.150	1,00	39.944.150	1,00	40.942.754	Dinsos	Menurunkan Beban Pengeluaran
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan PMKS yang memperoleh bantuan perlindungan dan jaminan sosial	503.347.100	141.597.700	1,00	1.064.407.700	1,00	30.607.700	1,00	30.607.700	1,00	31.372.893	Dinsos	Menurunkan Beban Pengeluaran
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan PPKS yang memperoleh bantuan perlindungan jaminan sosial	503.347.100	141.597.700	1,00	1.064.407.700	1,00	30.607.700	1,00	30.607.700	1,00	31.372.893	Dinsos	Menurunkan Beban Pengeluaran
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota	99.774.400	69.150.000	1,00	98.954.200	1,00	96.592.300	1,00	96.592.300	1,00	99.007.108	Dinsos	Mengatasi Dampak Bencana
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten /Kota	61.820.200	31.195.800	1,00	61.000.000	1,00	65.638.100	1,00	65.638.100	1,00	67.279.053	Dinsos	Menurunkan Beban Pengeluaran
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan	Persentase terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam	37.954.200	37.954.200	1,00	37.954.200	1,00	30.954.200	1,00	30.954.200	1,00	31.728.055	Dinsos	Menurunkan Beban Pengeluaran

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Bencana Kabupaten/Kota	dan sosial daerah kab/Kota												
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (>90%)	2.241.270.000	1.741.270.000	0,89	1.603.989.500	0,90	-	0,89	-	0,90	-	BPBD	Mengatasi Dampak Bencana
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (>90%)	2.241.270.000	1.741.270.000	0,89	1.603.989.500	0,90	-	0,89	-	0,90	-	BPBD	Mengatasi Dampak Bencana
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penurunan Kasus Bencana Alam	234.160.385	233.585.585	0,29	73.354.000	0,33	-	0,29	-	0,33	-	BPBD	Mengatasi Dampak Bencana
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase kapasitas kawasan dalam menghadapi bencana	219.160.385	218.585.585	1,00	51.654.000	1,00	-	1,00	-	1,00	-	BPBD	Mengatasi Dampak Bencana
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase kecepatan respons kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	15.000.000	15.000.000	1,00	21.700.000	1,00	-	1,00	-	1,00	-	BPBD	Mengatasi Dampak Bencana
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya besaran pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	120.361.100	120.160.160	185 orang	1.021.592	190 orang	66.324.678	185 orang	66.324.678	190 orang	67.982.795	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Pelatihan Berbasis Kompetensi	120.361.100	120.160.160	185 Orang	1.021.592	190 Orang	66.324.678	185 Orang	66.324.678	190 Orang	67.982.795	Disnakertrans	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus Hubungan Industrial yang dapat ditangani	15.525.850	15.525.850	1,00	34.525.850	1,00	35.000.000	1,00	35.000.000	1,00	35.875.000	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Mediasi Penyelesaian Hubungan Industrial	15.525.850	15.525.850	1,00	34.525.850	1,00	35.000.000	1,00	35.000.000	1,00	35.875.000	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang mandiri dan memiliki keterampilan kerja	3.116.796.335	1.808.065.135	0,20	26.796.335	0,25	24.000.000	0,20	24.000.000	0,25	24.600.000	Disnakertrans	Meningkatkan Pendapatan

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bidang Lahan Transmigrasi yang diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM)	3.116.796.335	1.808.065.135	300 Bidang	26.796.335	300 Bidang	24.000.000	300 Bidang	24.000.000	300 Bidang	24.600.000	Disnakertrans	Mengurangi Biaya Transaksi Ekonomi
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Tingkat Konsumsi Pangan Utama Lokal (DINAS PANGAN)	247.007.000	3.500.000	Ton	102.000.000	Ton	44.771.920	Ton	44.771.920	Ton	45.891.218	Dinas Pangan	Menjaga Stabilitas Pangan
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	tersedianya stok pangan dan konsumsi pangan	7.000.000	3.500.000	100 Ton	7.000.000	100 Ton	10.000.000	100 Ton	10.000.000	100 Ton	10.250.000	Dinas Pangan	Menjaga Stabilitas Pangan
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Peningkatan Kebutuhan Pangan Lokal	-	-	40 Ton	10.000.000	30 Ton	-	40 Ton	-	30 Ton	-	Dinas Pangan	Menjaga Stabilitas Pangan
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan per kapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat	-	-	40 Ton	85.000.000	30 Ton	34.771.920	40 Ton	34.771.920	30 Ton	35.641.218	Dinas Pangan	Menjaga Stabilitas Pangan
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Meningkatnya Indeks Pemanfaatan Pangan (DINAS PANGAN)	2.800.000	2.800.000	47 Indeks	9.200.000	52 Indeks	9.999.804	47 Indeks	9.999.804	52 Indeks	10.249.799	Dinas Pangan	Menjaga Stabilitas Pangan
Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	tersedianya peta kerawanan pangan	2.800.000	2.800.000	1,00	9.200.000	-	9.999.804	1,00	9.999.804	-	10.249.799	Dinas Pangan	Menjaga Stabilitas Pangan
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Meningkatnya pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (DINAS PANGAN)	8.572.000	-	0,85	8.572.000	0,90	10.000.000	0,85	10.000.000	0,90	10.250.000	Dinas Pangan	Menjaga Stabilitas Pangan
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengawasan pangan segar	8.572.000	-	1 Tahun	8.572.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.250.000	Dinas Pangan	Menjaga Stabilitas Pangan
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Ruang Terbuka Hijau	4.869.010.222	4.601.190.850	0,01	1.306.661.750	0,01	332.661.750	0,01	332.661.750	0,01	340.978.294	DLHK	Mengatasi Dampak Bencana

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terawatnya Ruang Terbuka Hijau Kota	4.869.010.222	4.601.190.850	0.70 %	1.306.661.750	0.95 %	332.661.750	0.70 %	332.661.750	0.95 %	340.978.294	DLHK	Mengatasi Dampak Bencana
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya Persentase Akses Sanitasi Layak	3.455.915.640	3.455.911.640	0,59	2.956.525.140	0,62	2.956.525.140	0,59	2.956.525.140	0,62	3.030.438.269	DLHK	Mengatasi Dampak Bencana
Pengelolaan Sampah	Meningkatnya Pelayanan untuk Penanganan Sampah	3.455.915.640	3.455.911.640	59.25 %	2.956.525.140	61.57 %	2.956.525.140	59.25 %	2.956.525.140	61.57 %	3.030.438.269	DLHK	Mengatasi Dampak Bencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kampung Aktif	435.007.050	415.815.050	1,00	49.121.100	1,00	54.121.100	1,00	54.121.100	1,00	55.474.128	DPMK	Meningkatkan Pendapatan
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Kampung Aktif	435.007.050	415.815.050	1,00	49.121.100	1,00	54.121.100	1,00	54.121.100	1,00	55.474.128	DPMK	Meningkatkan Pendapatan
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan	10.492.000	10.492.000	85 Indeks	55.000.000	87 Indeks	51.000.000	85 Indeks	51.000.000	87 Indeks	52.275.000	DPMP2TSP	Meningkatkan Pendapatan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	10.492.000	10.492.000	85 Indeks	55.000.000	87 Indeks	51.000.000	85 Indeks	51.000.000	87 Indeks	52.275.000	DPMP2TSP	Meningkatkan Pendapatan
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase perusahaan Yang Menyusun dan Menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal	355.475.800	186.137.900	0,60	500.800.000	0,65	500.800.000	0,60	500.800.000	0,65	513.320.000	DPMP2TSP	Meningkatkan Pendapatan

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	355.475.800	186.137.900	0,60	500.800.000	0,65	500.800.000	0,60	500.800.000	0,65	513.320.000	DPMP2TSP	Meningkatkan Pendapatan
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Penanaman Modal Tingkat Nasional	6.266.000	6.266.000	0,80	20.000.000	0,85	-	0,80	-	0,85	-	DPMP2TSP	Mengurangi Biaya Transaksi Ekonomi
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	6.266.000	6.266.000	0,80	20.000.000	0,85	-	0,80	-	0,85	-	DPMP2TSP	Meningkatkan Pendapatan
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Jumlah Pemuda Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas SDM	747.825.700	557.542.600	0,67	1.100.000.000	0,72	22.991.400	0,67	22.991.400	0,72	23.566.185	Disporapar	Meningkatkan Kualitas SDM
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase Penyadaran, Pemberdayaan Pemuda dan Kepemudaan Kab/Kota	747.825.700	557.542.600	23,8%	1.100.000.000	23,2%	22.991.400	23,8%	22.991.400	23,2%	23.566.185	Disporapar	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Jumlah Destinasi Unggulan Kota Yang di Intervensi Pengembangannya	853.991.400	285.876.400	5 Destinasi	1.649.991.400	5 Destinasi	39.999.988	5 Destinasi	39.999.988	5 Destinasi	40.999.988	Disporapar	Meningkatkan Pendapatan
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-	0,05	-	0,05	39.999.988	0,05	39.999.988	0,05	40.999.988	Disporapar	Meningkatkan Pendapatan
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	persentase Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	853.991.400	285.876.400	0,31	1.649.991.400	0,49	-	0,31	-	0,49	-	Disporapar	Meningkatkan Pendapatan
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Peningkatan Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara	527.550.400	407.850.400	2,30 Hari	985.000.000	2,30 Hari	740.000.000	2,30 Hari	740.000.000	2,30 Hari	758.500.000	Disporapar	Meningkatkan Pendapatan

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Pemasaran Pariwisata Kab/Kota	527.550.400	407.850.400	29.2%	985.000.000	32.1%	740.000.000	29.2%	740.000.000	32.1%	758.500.000	Disporapar	Meningkatkan Pendapatan
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Peningkatan jumlah SDM Pariwisata Yang Bersertifikat	-	-	0,50	-	0,50	20.000.000	0,50	20.000.000	0,50	20.500.000	Disporapar	Meningkatkan Kualitas SDM
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	-	-	33.3%	-	33.3%	20.000.000	33.3%	20.000.000	33.3%	20.500.000	Disporapar	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	95.000.000	-	137 Ton	-	142 Ton	500.000.000	137 Ton	500.000.000	142 Ton	512.500.000	Distanbunkan	Meningkatkan Pendapatan
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	95.000.000	-	137 Ton	-	142 Ton	500.000.000	137 Ton	500.000.000	142 Ton	512.500.000	Distanbunkan	Meningkatkan Pendapatan
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	3.766.410.250	3.135.186.514	45 Ton	1.170.000.000	45 Ton	45.000.000	45 Ton	45.000.000	45 Ton	46.125.000	Distanbunkan	Meningkatkan Pendapatan
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	3.766.410.250	3.135.186.514	45 Ton	1.170.000.000	45 Ton	45.000.000	45 Ton	45.000.000	45 Ton	46.125.000	Distanbunkan	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya Populasi Peternakan	4.977.766.776	3.110.684.200	170000 Ekor	-	175000 Ekor	500.000.000	170000 Ekor	500.000.000	175000 Ekor	512.500.000	Distanbunkan	Meningkatkan Pendapatan
Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Meningkatnya Populasi Peternakan	4.977.766.776	3.110.684.200	170000 Ekor	-	175000 Ekor	500.000.000	170000 Ekor	500.000.000	175000 Ekor	512.500.000	Distanbunkan	Meningkatkan Pendapatan
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi pertanian/perkebunan	73.278.459.750	59.853.761.942	45000 Ton	43.577.649.300	46000 Ton	440.549.300	45000 Ton	440.549.300	46000 Ton	46.125.000	Distanbunkan	Meningkatkan Pendapatan

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pengembangan Prasarana Pertanian		20.549.300	-		20.549.300		395.549.300		395.549.300			Distanbunkan	
Pembangunan Prasarana Pertanian	Tersedianya Prasarana Pertanian	73.257.910.450	59.853.761.942	45000 Ton	43.557.100.000	46000 Ton	45.000.000	45000 Ton	45.000.000	46000 Ton	46.125.000	Distanbunkan	Menurunkan Beban Pengeluaran
PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Peternakan	10.580.542.141	7.411.467.786	16020 Ton	175.575.000	16230 Ton	150.575.000	16020 Ton	150.575.000	16230 Ton	154.339.375	Distanbunkan	Meningkatkan Pendapatan
Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Meningkatnya Produksi Peternakan	10.580.542.141	7.411.467.786	16020 Ton	175.575.000	16230 Ton	150.575.000	16020 Ton	150.575.000	16230 Ton	154.339.375	Distanbunkan	Meningkatkan Pendapatan
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	cakupan desa yang mendapatkan akses tenaga penyuluh	510.500.000	510.500.000	1,00	1.102.500.000	1,00	557.500.000	1,00	557.500.000	1,00	571.437.500	Distanbunkan	Mengurangi Biaya Transaksi Ekonomi
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	cakupan desa yang mendapatkan akses tenaga penyuluh	510.500.000	510.500.000	1,00	1.102.500.000	1,00	557.500.000	1,00	557.500.000	1,00	571.437.500	Distanbunkan	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya persentase jumlah Usaha Mikro Naik Kelas (DISPERINDAGKOP - UMKM)	30.655.950	13.735.575	0,47	20.655.950	0,50	40.000.000	0,47	236.814.975	0,50	41.000.000	Disperindagkop - UKM	Meningkatkan Pendapatan
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Meningkatnya Usaha UMKM	30.655.950	13.735.575	1,00	20.655.950	1,00	40.000.000	1,00	40.000.000	1,00	41.000.000	Disperindagkop - UKM	Meningkatkan Pendapatan
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Meningkatnya jumlah UMKM (DISPRINDAGKOP - UMKM)	9.023.890.539	2.734.608.800	2700 Unit	6.029.000.000	2850 Unit	-	2700 Unit	-	2850 Unit	-	Disperindagkop - UKM	Meningkatkan Pendapatan
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya Usaha UMKM	9.023.890.539	2.734.608.800	1,00	6.029.000.000	1,00	-	1,00	-	1,00	-	Disperindagkop - UKM	Meningkatkan Pendapatan
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Cakupan sarana perdagangan (DISPERINDAGKOP - UMKM)	4.498.888.100	1.178.928.083	0,60	2.333.020.750	0,64	258.020.750	0,60	258.020.750	0,64	264.471.269	Disperindagkop - UKM	Meningkatkan Pendapatan

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Pasar Bagi Masyarakat	4.498.888.100	1.178.928.083	1,00	2.333.020.750	1,00	258.020.750	1,00	258.020.750	1,00	264.471.269	Disperindagkop - UKM	Menjaga Stabilitas Pangan
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Cakupan pengawasan perdagangan (DISPERINDAGKOP - UMKM)	94.941.000	94.941.000	1,00	139.941.000	1,00	164.366.750	1,00	164.366.750	1,00	168.475.919	Disperindagkop - UKM	Meningkatkan Pendapatan
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terjaminnya Barang Kebutuhan Pokok	94.941.000	94.941.000	1,00	139.941.000	1,00	164.366.750	1,00	164.366.750	1,00	168.475.919	Disperindagkop - UKM	Menjaga Stabilitas Pangan
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya jumlah IKM (DISPERINDAGKOP - UMKM)	1.502.775.800	1.156.382.273	1200 Unit	692.775.800	1300 Unit	500.000.000	1200 Unit	500.000.000	1300 Unit	512.500.000	Disperindagkop - UKM	Meningkatkan Pendapatan
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Pengembangan industri masyarakat	1.502.775.800	1.156.382.273	1,00	692.775.800	1,00	500.000.000	1,00	500.000.000	1,00	512.500.000	Disperindagkop - UKM	Mengurangi Biaya Transaksi Ekonomi
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tingkat Ketersediaan Sistem Informasi Perindustrian Tingkat Nasional (DISPERINDAGKOP - UMKM)	7.223.200	-	1,00	10.994.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.625.000	Disperindagkop - UKM	Mengurangi Biaya Transaksi Ekonomi
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Industri	7.223.200	-	1,00	10.994.000	1,00	25.000.000	1,00	25.000.000	1,00	25.625.000	Disperindagkop - UKM	Mengurangi Biaya Transaksi Ekonomi
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Jumlah Kebijakan Daerah dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta mental spiritual	2.721.694.900	2.025.582.000	25 Dok	2.178.964.700	30 Dok	1.753.678.125	25 Dok	1.753.678.125	30 Dok	1.797.520.078	Setdako	Menurunkan Beban Pengeluaran
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	1.669.113.150	1.666.257.050	1,00	1.784.493.150	1,00	1.327.111.238	1,00	1.327.111.238	1,00	1.360.289.019	Setdako	Menurunkan Beban Pengeluaran
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Cakupan Pelaksanaan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	384.471.550	359.324.950	1,00	394.471.550	1,00	426.566.887	1,00	426.566.887	1,00	437.231.059	Setdako	Menurunkan Beban Pengeluaran
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pertumbuhan PDRB Kota Subulussalam	6.928.386.152	5.672.827.066	0,04	5.292.918.940	0,04	5.334.145.032	0,04	5.334.145.032	0,04	5.467.498.658	Setdako	Meningkatkan Pendapatan

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Cakupan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	551.153.172	550.763.592	1,00	335.569.472	1,00	425.985.170	1,00	425.985.170	1,00	436.634.799	Setdako	Mengurangi Biaya Transaksi Ekonomi
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Tepat Waktu	983.149.300	981.289.300	1,00	897.349.300	1,00	986.972.922	1,00	986.972.922	1,00	1.011.647.245	Setdako	Mengurangi Biaya Transaksi Ekonomi
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Cakupan Kegiatan SDA yang Terpenuhi	4.141.574.174	4.140.774.174	1,00	4.060.000.168	1,00	3.921.186.940	1,00	3.921.186.940	1,00	4.019.216.614	Setdako	Menjaga Stabilitas Pangan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga swadaya Masyarakat yang aktif (Kec. Longkib)	7.532.000	7.532.000	0,98	7.000.000	0,99	10.000.000	0,98	10.000.000	0,99	10.250.000	Kec. Longkib	Meningkatkan Pendapatan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	7.532.000	7.532.000	0,99	7.000.000	0,99	10.000.000	0,99	10.000.000	0,99	10.250.000	Kec. Longkib	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) (Kec. Longkib)	4.138.000	4.138.000	0,95	20.000.000	0,96	20.000.000	0,95	20.000.000	0,96	20.500.000	Kec. Longkib	Menurunkan Beban Pengeluaran
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.138.000	4.138.000	0,96	20.000.000	0,97	20.000.000	0,96	20.000.000	0,97	20.500.000	Kec. Longkib	Mengatasi Dampak Bencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga swadaya Masyarakat yang aktif (Kec. Penanggalan)	17.752.900	15.712.900	0,98	9.000.000	0,99	9.000.000	0,98	9.000.000	0,99	9.225.000	Kec. Penanggalan	Meningkatkan Pendapatan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	17.752.900	15.712.900	0,98	9.000.000	0,99	9.000.000	0,98	9.000.000	0,99	9.225.000	Kec. Penanggalan	Meningkatkan Pendapatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) (Kec. Penanggalan)	-	-	0,95	10.000.000	0,96	10.000.000	0,95	10.000.000	0,96	10.250.000	Kec. Penanggalan	Menurunkan Beban Pengeluaran
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,	-	-	0,95	10.000.000	0,96	10.000.000	0,95	10.000.000	0,96	10.250.000	Kec. Penanggalan	Meningkatkan Kualitas SDM

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Ketenteraman dan Keindahan												
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga swadaya Masyarakat yang aktif (Kec. Rundeng)	16.416.000	9.150.000	0,98	18.000.000	0,99	18.000.000	0,98	18.000.000	0,99	18.450.000	Kec. Rundeng	Meningkatkan Pendapatan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peralatan Perlengkapan Operasional Kantor	16.416.000	9.150.000	2 Keg	18.000.000	2 Keg	18.000.000	2 Keg	18.000.000	2 Keg	18.450.000	Kec. Rundeng	Mengurangi Biaya Transaksi Ekonomi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) (Kec. Rundeng)	3.528.000	3.528.000	0,95	9.000.000	0,96	10.000.000	0,95	10.000.000	0,96	10.250.000	Kec. Rundeng	Menurunkan Beban Pengeluaran
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Sinergi Antara Instansi Pemerintah Kecamatan	3.528.000	3.528.000	94.50 %	9.000.000	85.50 %	10.000.000	94.50 %	10.000.000	85.50 %	10.250.000	Kec. Rundeng	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga swadaya Masyarakat yang aktif (Kec. Simpang Kiri)	-	-	0,98	17.000.000	0,99	20.000.000	0,98	20.000.000	0,99	20.500.000	Kec. Simpang Kiri	Meningkatkan Pendapatan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase lembaga swadaya Masyarakat yang aktif	-	-	1,00	17.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.000.000	1,00	20.500.000	Kec. Simpang Kiri	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan) (Kec. Simpang Kiri)	-	-	0,95	20.000.000	0,96	10.000.000	0,95	10.000.000	0,96	10.250.000	Kec. Simpang Kiri	Menurunkan Beban Pengeluaran
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman dan Keindahan)	-	-	0,98	20.000.000	0,99	10.000.000	0,98	10.000.000	0,99	10.250.000	Kec. Simpang Kiri	Mengatasi Dampak Bencana
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase lembaga swadaya Masyarakat yang aktif (Kec. Sultan Daulat)	19.938.050	19.938.050	0,98	7.000.000	0,99	8.999.772	0,98	8.999.772	0,99	9.224.766	Kec. Sultan Daulat	Meningkatkan Pendapatan
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	19.938.050	19.938.050	0,87	7.000.000	0,88	8.999.772	0,87	8.999.772	0,88	9.224.766	Kec. Sultan Daulat	Meningkatkan Pendapatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban,	-	-	0,95	20.000.000	0,96	10.000.000	0,95	10.000.000	0,96	10.250.000	Kec. Sultan Daulat	Menurunkan Beban Pengeluaran

Program / Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan	BASELINE 2022		2023		2024		2025		2026		OPD Pelaksana	Strategi
		Target Rp.	Realisasi Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Ketenteraman dan Keindahan) (Kec. Sultan Daulat)												
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terwujudnya Sinergitas Kecamatan dengan POLSI dan TNI	-	-	0,87	20.000.000	0,88	10.000.000	0,87	10.000.000	0,88	10.250.000	Kec. Sultan Daulat	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan Poleksosbudhankam	51.912.000	51.912.000	0,04	51.912.000	0,04	125.000.000	0,04	125.000.000	0,04	128.125.000	Kesbangpol	Meningkatkan Pendapatan
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase jumlah masyarakat yang mendapat pembinaan Poleksosbudhankam	51.912.000	51.912.000	0,04	51.912.000	0,04	125.000.000	0,04	125.000.000	0,04	128.125.000	Kesbangpol	Meningkatkan Kualitas SDM
PROGRAM BAITUL MAL	Persentase Tingkat Penerimaan ZIS	3.534.643.925	3.533.534.500	0,75	5.317.000.000	0,75	5.174.200.000	0,75	5.174.200.000	0,75	5.303.555.000	Sekretariat Baitul Mal	Meningkatkan Pendapatan
Pengelolaan ZISWAF	Persentase Tingkat Penyaluran ZIS	106.020.000	106.020.000	1,00	80.000.000	1,00	-	1,00	-	1,00	-	Sekretariat Baitul Mal	Menurunkan Beban Pengeluaran
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	Persentase Tingkat Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal	291.969.500	290.905.500	1,00	237.000.000	1,00	174.200.000	1,00	174.200.000	1,00	178.555.000	Sekretariat Baitul Mal	Mengurangi Biaya Transaksi Ekonomi
Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	Persentase Tingkat Pendistribusian dan Pendayagunaan ZISWAF	3.136.654.425	3.136.609.000	1,00	5.000.000.000	1,00	5.000.000.000	1,00	5.000.000.000	1,00	5.125.000.000	Sekretariat Baitul Mal	Menurunkan Beban Pengeluaran
PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH	Jumlah guru dayah, Balai pengajian yang terakreditasi	10.103.820.768	7.160.410.733	0,61	4.280.000.000	0,64	1.500.000.000	0,61	1.500.000.000	0,64	1.537.500.000	DSIPD	Meningkatkan Kualitas SDM
Pengelolaan Pendidikan Dayah	Jumlah guru dayah, Balai pengajian yang terakreditasi	10.103.820.768	7.160.410.733	0,61	4.280.000.000	0,64	1.500.000.000	0,61	1.500.000.000	0,64	1.537.500.000	DSIPD	Meningkatkan Kualitas SDM
JUMLAH		366.992.611.530	296.029.008.012	-	187.743.730.914	-	112.268.380.919	-	112.465.195.894	-	114.669.652.409		

BAB V LOKASI PROGRAM

Dalam menentukan lokasi prioritas program penanggulangan kemiskinan di dokumen RPKD ini, sebagian besar menggunakan Data **Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)** yang merupakan kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021) di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan setiap tingkatan wilayah administrasi (desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL serta memiliki status kesejahteraan (Desil).

Suatu indikator dari data P3KE akan disandingkan dengan indikator dari data P3KE lainnya, sehingga akan membentuk 4 kuadran yang menjadi prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan prioritas 4.

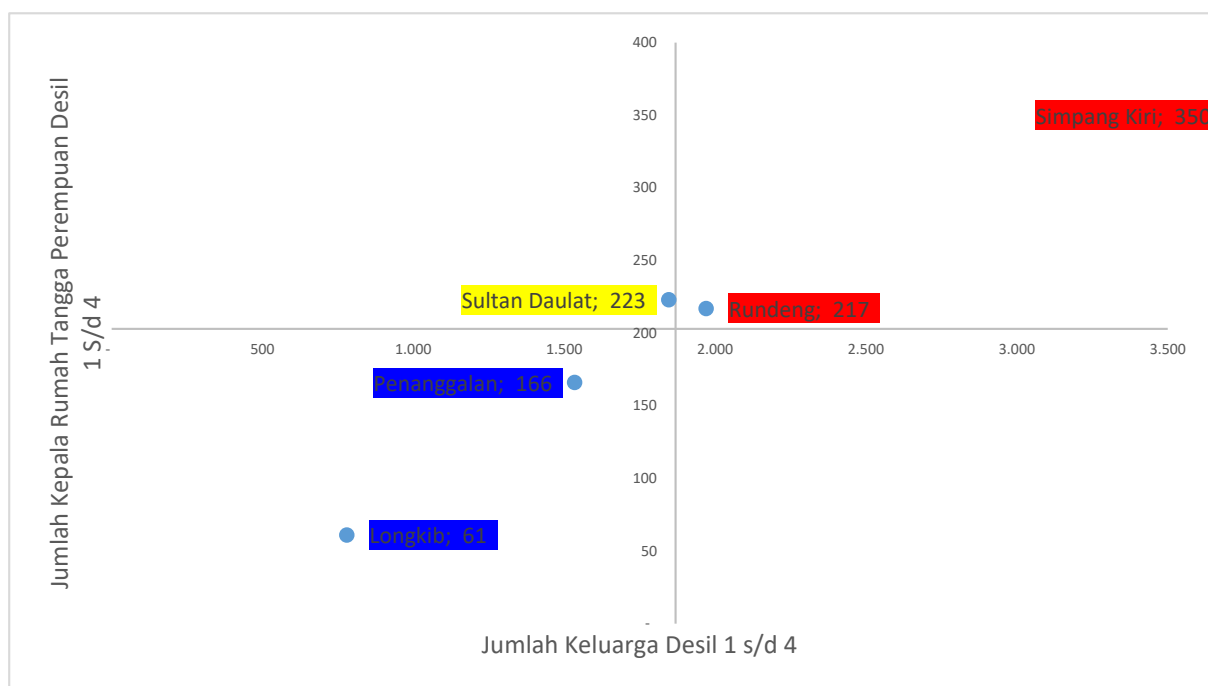
5.1. Prioritas Wilayah Bidang Kemiskinan

Untuk menentukan lokasi yang menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan bidang kemiskinan, dilakukan perbandingan yaitu jumlah kepala rumah tangga perempuan memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 dengan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4. Dengan melakukan perbandingan tersebut, kita akan memperoleh Kecamatan mana yang menjadi prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan prioritas 4.

Kecamatan dengan jumlah kepala rumah tangga perempuan memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata), akan menjadi prioritas 1. Kecamatan dengan jumlah kepala rumah tangga perempuan memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 2. Kecamatan dengan jumlah kepala rumah tangga perempuan memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 3. Kecamatan dengan jumlah kepala rumah tangga perempuan memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 4.

Dengan melakukan perbandingan tersebut, dihasilkan kuadran prioritas berikut:

Gambar 5.74 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Kemiskinan



Sumber: P3KE, Kemenko PMK

Dengan melakukan analisa perbandingan antar indikator, dapat diklasifikasikan prioritas wilayah, yaitu: Prioritas 1 (Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Rundeng), Prioritas 2 (Kecamatan Sultan Daulat), Prioritas 3 (tidak ada) dan Prioritas 4 (Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkib).

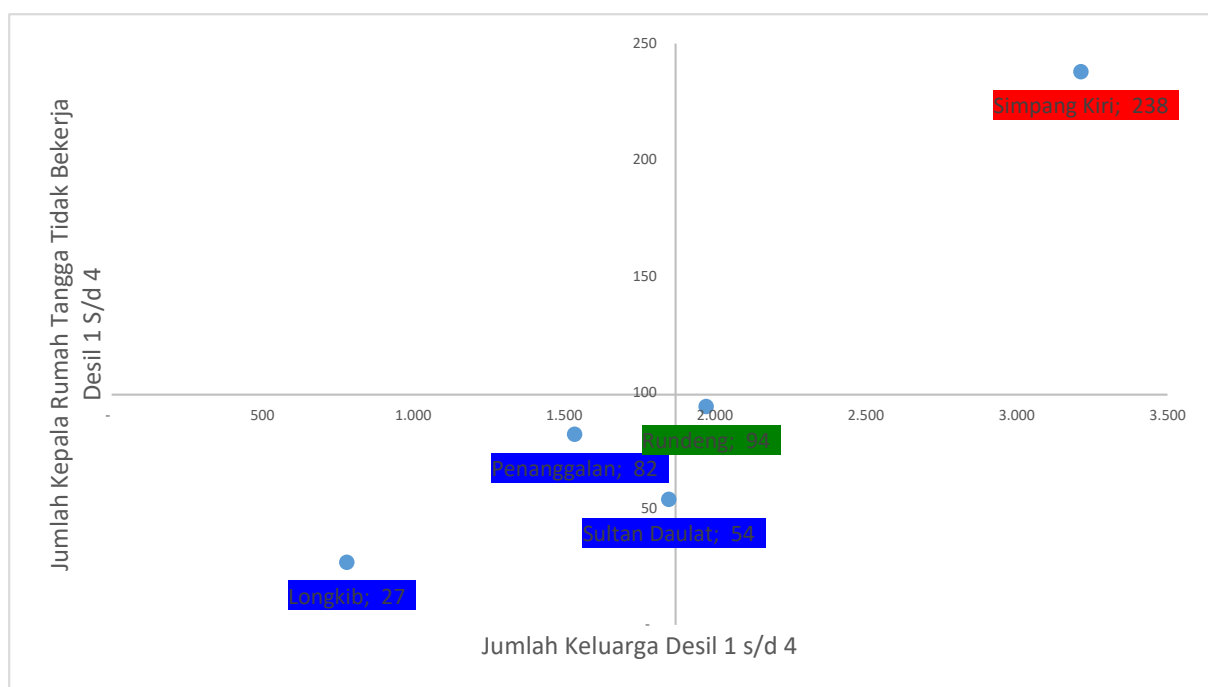
5.2. Prioritas Wilayah Bidang Ketenagakerjaan

Dalam menentukan lokasi yang menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan bidang ketenagakerjaan, dilakukan perbandingan yaitu jumlah kepala rumah tangga tidak bekerja memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 dengan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4. Dengan melakukan perbandingan tersebut, kita akan memperoleh Kecamatan mana yang menjadi prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan prioritas 4.

Kecamatan dengan jumlah kepala rumah tangga tidak bekerja memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata), akan menjadi prioritas 1. Kecamatan dengan jumlah kepala rumah tangga tidak bekerja memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 2. Kecamatan dengan jumlah kepala rumah tangga tidak bekerja memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 3. Kecamatan dengan jumlah kepala rumah tangga tidak bekerja memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 4.

Dengan melakukan perbandingan tersebut, dihasilkan kuadran prioritas berikut:

Gambar 5.75 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Ketenagakerjaan



Sumber: P3KE, Kemenko PMK

Dengan melakukan analisa perbandingan jumlah rumah tangga tidak bekerja dan jumlah keluarga status kesejahteraan Desil 1 s/d 4, dapat diklasifikasikan prioritas wilayah, yaitu: Prioritas 1 (Kecamatan Simpang Kiri), Prioritas 2 (tidak ada), Prioritas 3 (Kecamatan Rundeng) dan Prioritas 4 (Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkib).

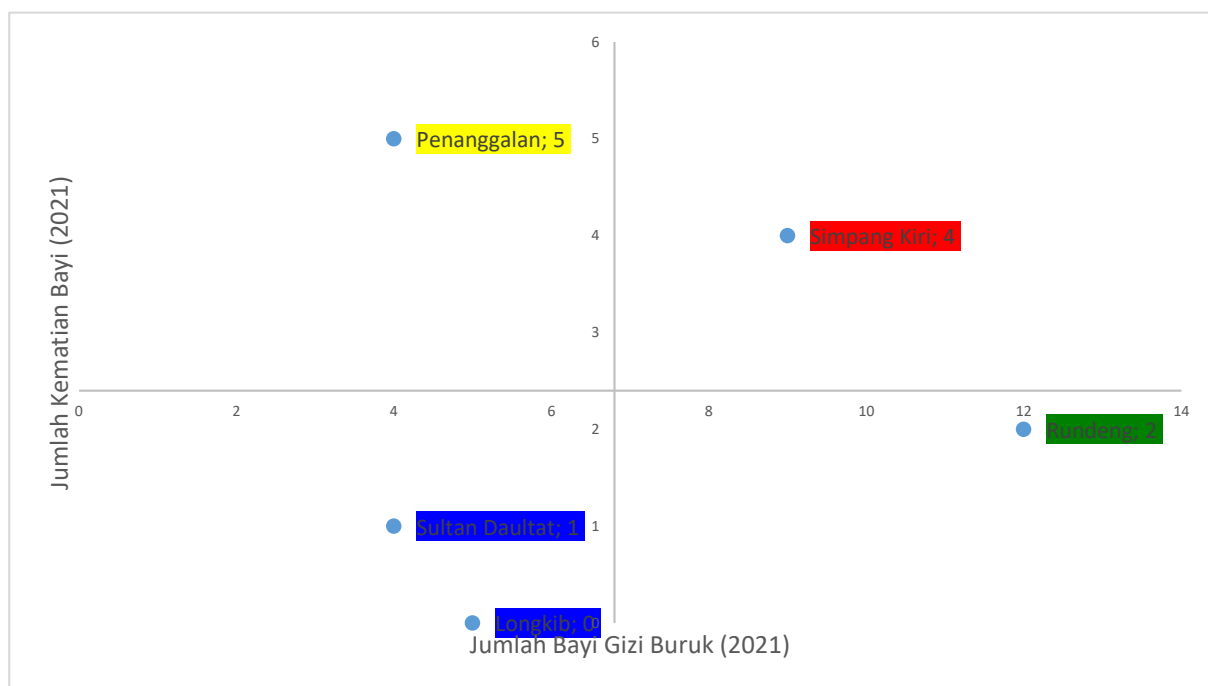
5.3. Prioritas Wilayah Bidang Kesehatan

Dalam menentukan lokasi yang menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan bidang kesehatan, dilakukan 2 (dua) analisa perbandingan yang bersumber dari data BPS dan data P3KE. Perbandingan indikator kesehatan yang bersumber dari data BPS yaitu Jumlah Angka Kematian Bayi dan Jumlah Bayi Gizi Buruk (2021).

Kecamatan dengan jumlah angka kematian bayi tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah bayi gizi buruk tinggi (lebih tinggi dari rata-rata), akan menjadi prioritas 1. Kecamatan dengan jumlah angka kematian bayi tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah bayi gizi buruk relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 2. Kecamatan dengan jumlah angka kematian bayi relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah bayi gizi buruk tinggi (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 3. Kecamatan dengan jumlah angka kematian bayi relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah bayi gizi buruk relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 4.

Dengan melakukan perbandingan tersebut, dihasilkan kuadran prioritas berikut:

Gambar 5.76 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Kesehatan (AKI dan Gizi Buruk)



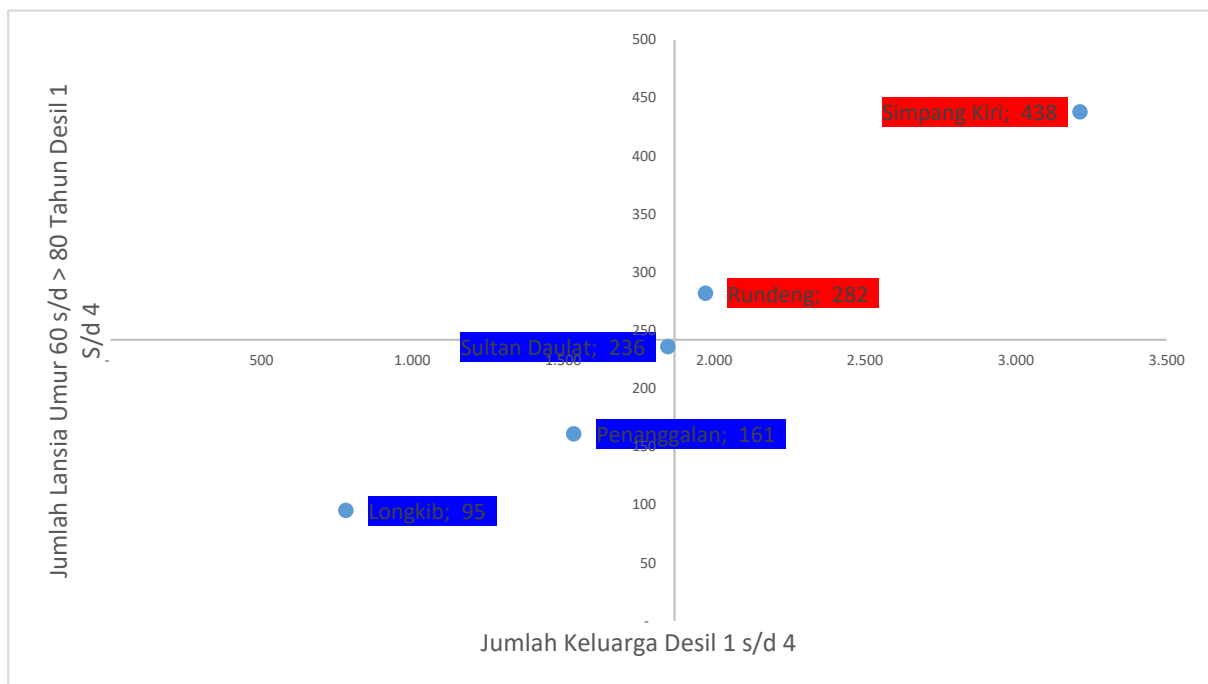
Sumber: P3KE, Kemenko PMK

Hasil dari analisa perbandingan jumlah angka kematian bayi dan jumlah bayi gizi buruk, dapat diklasifikasikan prioritas wilayah, yaitu: Prioritas 1 (Kecamatan Simpang Kiri), Prioritas 2 (Penanggalan), Prioritas 3 (Kecamatan Rundeng) dan Prioritas 4 (Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Longkib).

Perbandingan indikator kesehatan yang bersumber dari data P3KE yaitu jumlah lansia umur 60 s/d > 80 tahun status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 dan jumlah keluarga dengan status kesejahteraan desil 1 s/d 4. Kecamatan dengan jumlah lansia umur 60 s/d > 80 tahun memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata), akan menjadi prioritas 1. Kecamatan dengan jumlah lansia umur 60 s/d > 80 tahun memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 2. Kecamatan dengan jumlah lansia umur 60 s/d > 80 tahun memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 3. Kecamatan dengan jumlah lansia umur 60 s/d > 80 tahun memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 4.

Dengan melakukan perbandingan tersebut, dihasilkan kuadran prioritas berikut:

Gambar 5.77 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Kesehatan (Lansia)



Sumber: P3KE, Kemenko PMK

Hasil dari analisa perbandingan jumlah lansia umur 60 s/d > 80 tahun status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 dan jumlah keluarga dengan status kesejahteraan desil 1 s/d 4, dapat diklasifikasikan prioritas wilayah, yaitu: Prioritas 1 (Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Rundeng), Prioritas 2 (tidak ada), Prioritas 3 (tidak ada) dan Prioritas 4 (Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkib).

5.4. Prioritas Wilayah Bidang Pendidikan

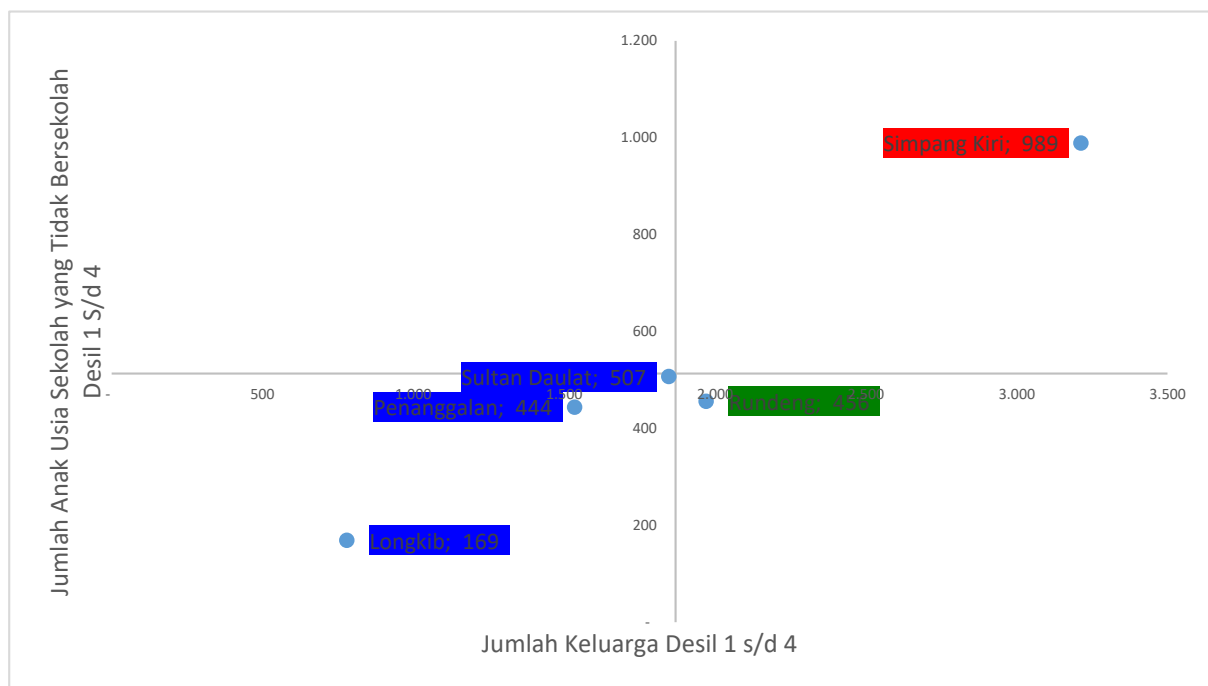
Dalam menentukan lokasi yang menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan bidang pendidikan, dilakukan perbandingan yaitu jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 dengan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4. Dengan melakukan perbandingan tersebut, kita akan memperoleh Kecamatan mana yang menjadi prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan prioritas 4.

Kecamatan dengan jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata), akan menjadi prioritas 1. Kecamatan dengan jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 2. Kecamatan dengan jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 3. Kecamatan dengan jumlah anak

usia sekolah yang tidak bersekolah memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 4.

Dengan melakukan analisa perbandingan antar indikator tersebut, dihasilkan kuadran prioritas wilayah sebagai berikut:

Gambar 5.78 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Pendidikan



Sumber: P3KE, Kemenko PMK

Dengan melakukan analisa perbandingan jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah dengan status kesejahteraan desil 1 s/d 4 dan jumlah keluarga status kesejahteraan Desil 1 s/d 4, dapat diklasifikasikan prioritas wilayah, yaitu: Prioritas 1 (Kecamatan Simpang Kiri), Prioritas 2 (tidak ada), Prioritas 3 (Kecamatan Rundeng) dan Prioritas 4 (Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkib).

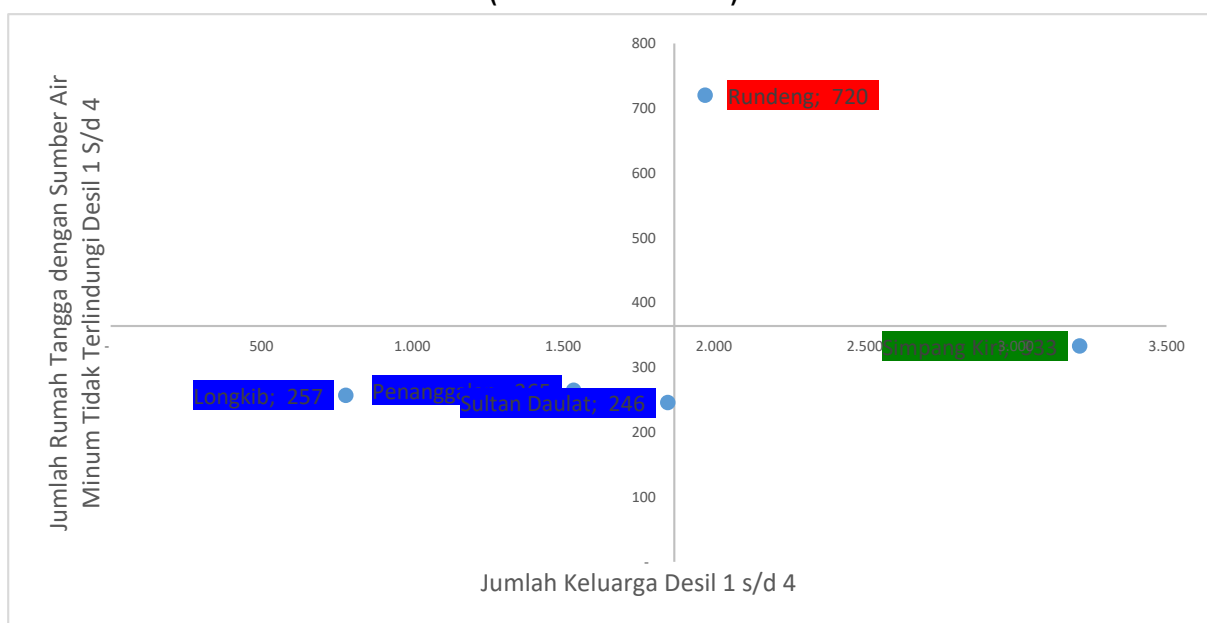
5.5. Prioritas Wilayah Bidang Infrastruktur Dasar

Dalam menentukan lokasi yang menjadi wilayah prioritas dalam penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur, dilakukan 4 (empat) analisa perbandingan yaitu: 1) jumlah rumah tangga dengan sumber air minum tidak terlindungi; 2) jumlah rumah tangga dengan tanpa septik tank; 3) jumlah rumah tangga dengan sumber penerangan non listrik; dan 4) jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan rumah bukan milik sendiri. Dengan melakukan perbandingan dari salah satu dari ketiga indikator tersebut dengan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4, kita akan memperoleh Kecamatan mana yang menjadi prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan prioritas 4.

Pertama, bidang infrastruktur dasar air minum. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga dengan sumber air minum tidak terlindungi tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata), akan menjadi prioritas 1. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga dengan sumber air minum tidak terlindungi tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 2. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga dengan sumber air minum tidak terlindungi relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 tinggi (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 3. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga dengan sumber air minum tidak terlindungi relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 4.

Dengan melakukan analisa perbandingan antar indikator tersebut, dihasilkan kuadran prioritas wilayah sebagai berikut:

Gambar 5.79 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Infrastruktur Dasar (Sumber Air Minum)



Sumber: P3KE, Kemenko PMK

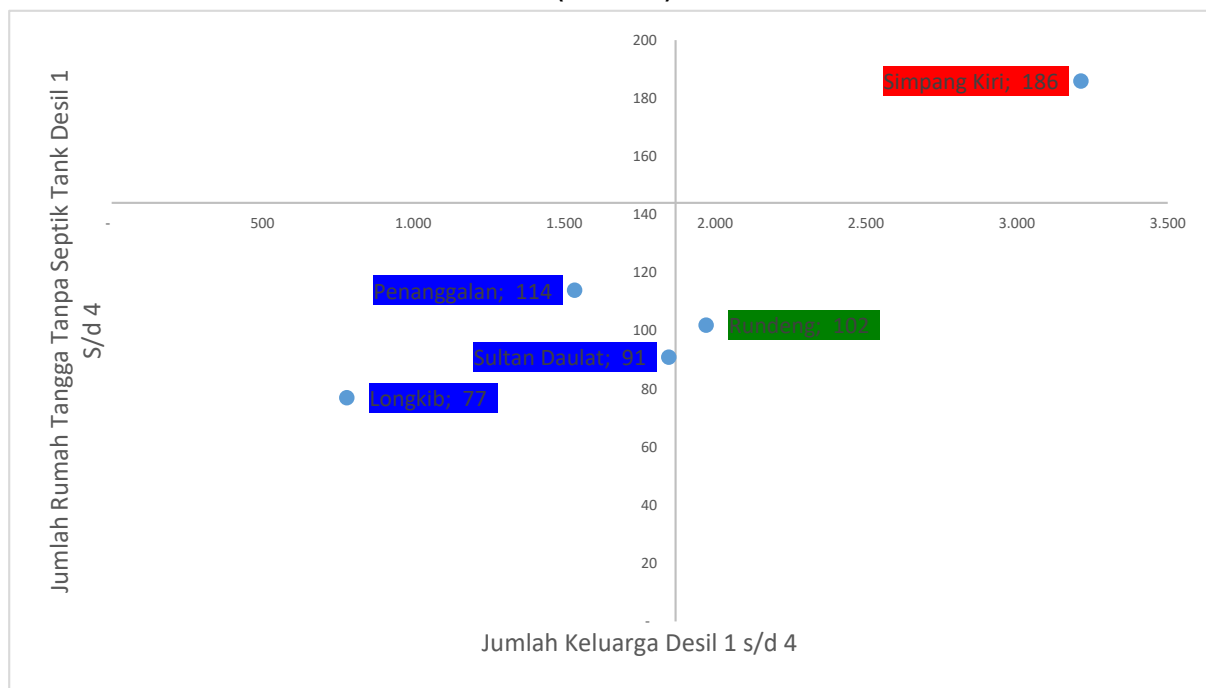
Dengan melakukan analisa perbandingan jumlah rumah tangga dengan sumber air minum tidak terlindungi dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 diatas, dapat diklasifikasikan prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur sumber air minum yang layak, yaitu: Prioritas 1 (Kecamatan Rundeng), Prioritas 2 (tidak ada), Prioritas 3 (Kecamatan Simpang Kiri) dan Prioritas 4 (Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkib).

Kedua, bidang infrastruktur dasar sanitasi. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga tanpa septik tank tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata), akan menjadi prioritas 1. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga tanpa septik tank tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 2. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga tanpa septik tank relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 tinggi (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 3. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga

tanpa septik tank relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 4.

Dengan melakukan analisa perbandingan antar indikator tersebut, dihasilkan kuadran prioritas wilayah sebagai berikut:

Gambar 5.80 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Infrastruktur Dasar (Sanitasi)



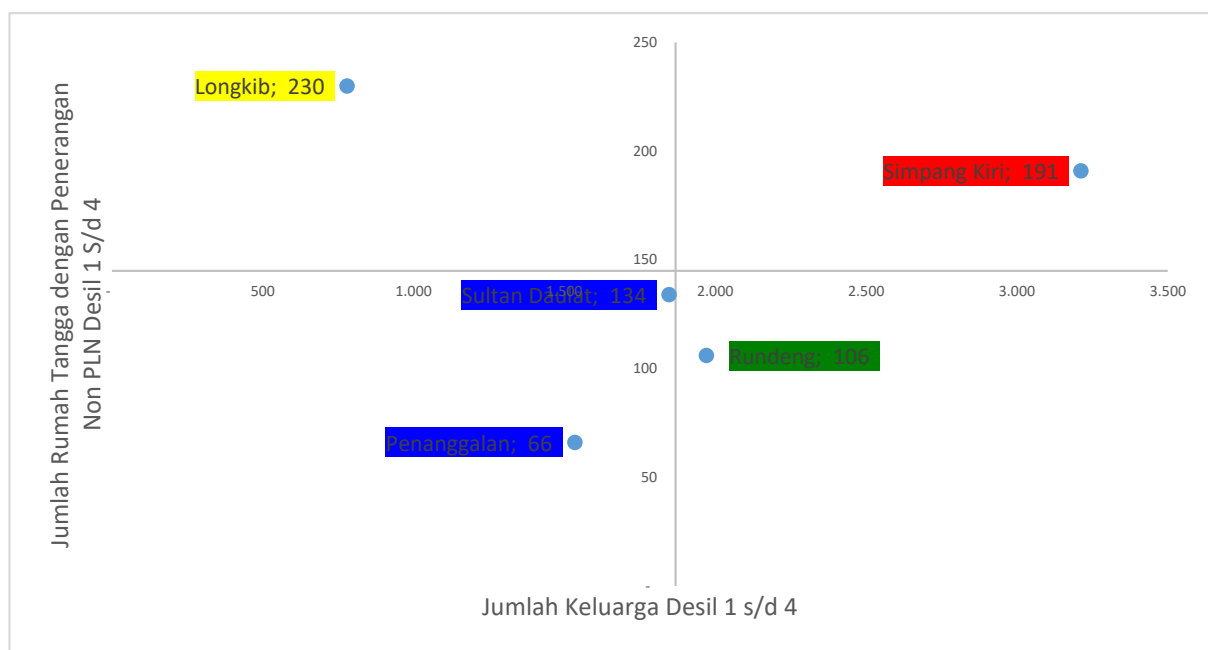
Sumber: P3KE, Kemenko PMK

Dengan melakukan analisa perbandingan jumlah rumah tangga dengan tanpa septik tank dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 diatas, dapat diklasifikasikan prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur sanitasi yang layak, yaitu: Prioritas 1 (Kecamatan Simpang Kiri), Prioritas 2 (tidak ada), Prioritas 3 (Kecamatan Rundeng) dan Prioritas 4 (Kecamatan Sultan Daulat, Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkib).

Ketiga, bidang infrastruktur dasar elektrifikasi/penerangan. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga dengan penerangan non PLN tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata), akan menjadi prioritas 1. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga dengan penerangan non PLN tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 2. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga dengan penerangan non PLN relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 tinggi (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 3. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga dengan penerangan non PLN relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 4.

Dengan melakukan analisa perbandingan antar indikator tersebut, dihasilkan kuadran prioritas wilayah sebagai berikut:

Gambar 5.81 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang (Elektrifikasi/Penerangan)



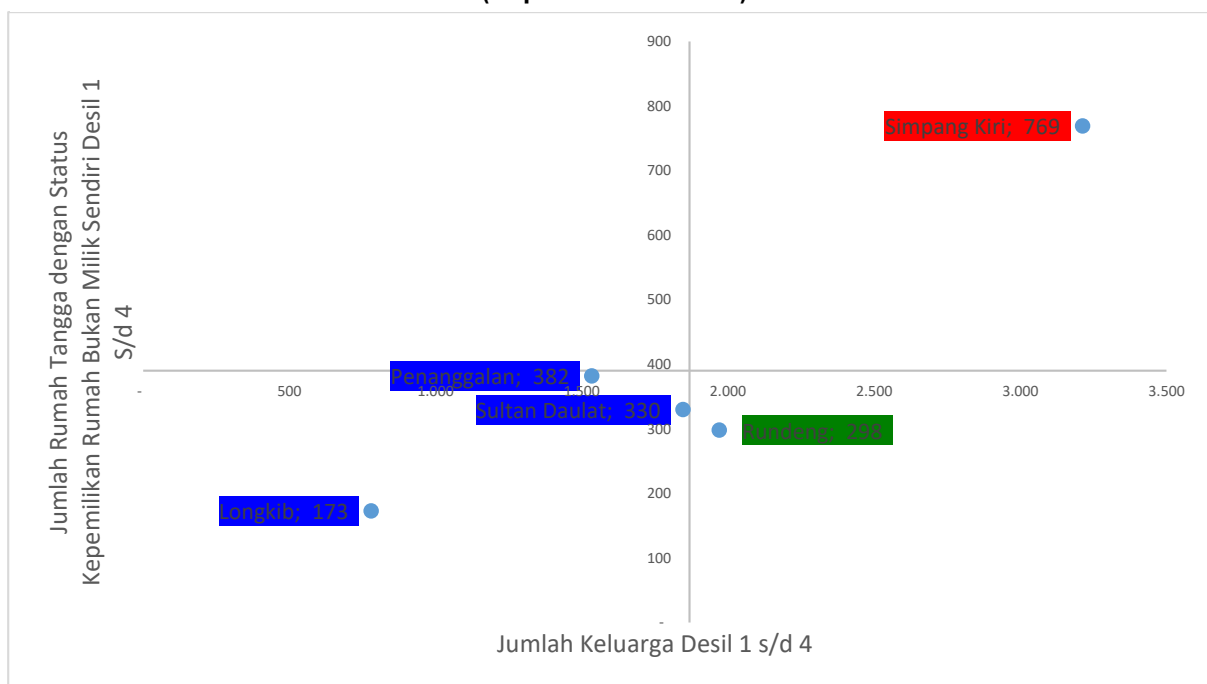
Sumber: P3KE, Kemenko PMK

Dengan melakukan analisa perbandingan jumlah rumah tangga dengan tanpa septik tank dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 diatas, dapat diklasifikasikan prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur sanitasi yang layak, yaitu: Prioritas 1 (Kecamatan Simpang Kiri), Prioritas 2 (Kecamatan Longkib), Prioritas 3 (Kecamatan Rundeng) dan Prioritas 4 (Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Penanggalan).

Dan keempat, bidang infrastruktur dasar perumahan. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan rumah bukan milik sendiri tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata), akan menjadi prioritas 1. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan rumah bukan milik sendiri tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 2. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan rumah bukan milik sendiri relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 tinggi (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 3. Kecamatan dengan jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan rumah bukan milik sendiri relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 4.

Dengan melakukan analisa perbandingan antar indikator tersebut, dihasilkan kuadran prioritas wilayah sebagai berikut:

Gambar 5.82 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Infrastruktur Dasar (Kepemilikan Rumah)



Sumber: P3KE, Kemenko PMK

Dari hasil analisa perbandingan jumlah rumah tangga dengan status kepemilikan rumah bukan milik sendiri dan jumlah rumah tangga (Desil) 1 s/d 4 diatas, dapat diklasifikasikan prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan bidang infrastruktur perumahan, yaitu: Prioritas 1 (Kecamatan Simpang Kiri), Prioritas 2 (tidak ada), Prioritas 3 (Kecamatan Rundeng) dan Prioritas 4 (Kecamatan Penanggalan, Kecamatan Sultan Daulat dan Kecamatan Longkib).

5.6. Prioritas Wilayah Bidang Perlindungan Sosial

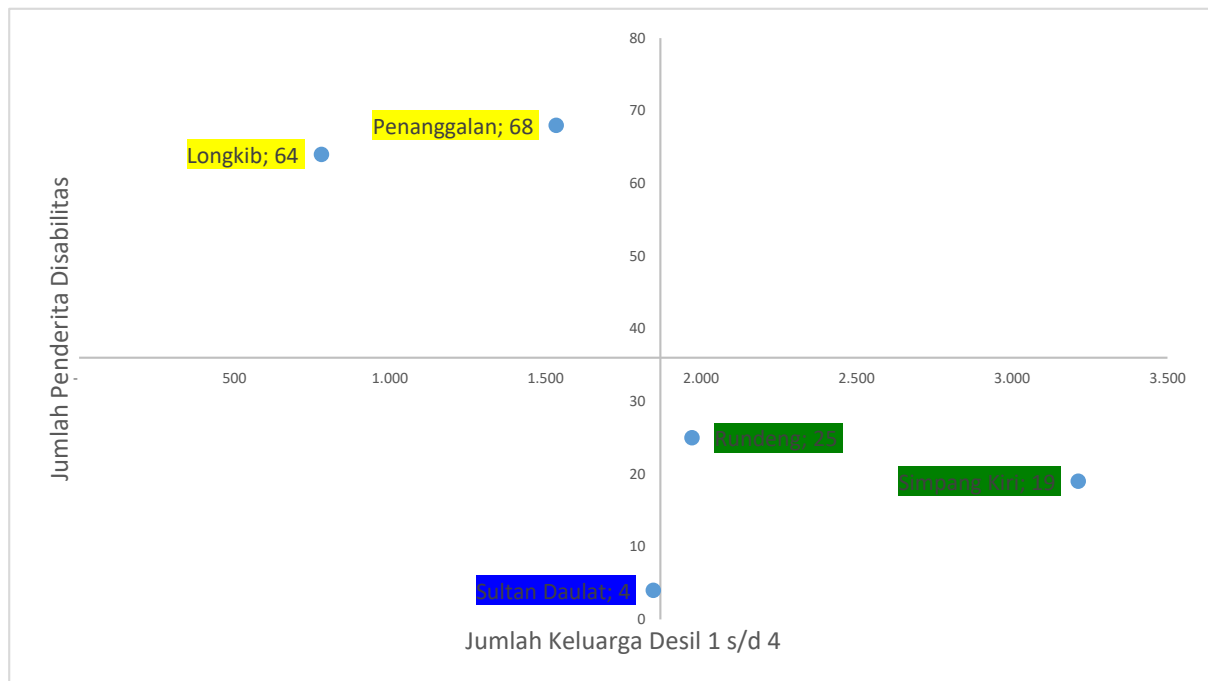
Dalam menentukan lokasi yang menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan bidang perlindungan sosial, dilakukan perbandingan yaitu jumlah penderita disabilitas dengan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4. Dengan melakukan perbandingan tersebut, kita akan memperoleh Kecamatan mana yang menjadi prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan prioritas 4.

Kecamatan dengan jumlah penderita disabilitas tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (lebih tinggi dari rata-rata), akan menjadi prioritas 1. Kecamatan dengan jumlah penderita disabilitas tinggi (lebih tinggi dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 2. Kecamatan dengan jumlah penderita disabilitas relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 tinggi (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 3. Kecamatan

dengan jumlah penderita disabilitas relatif rendah (dari rata-rata) dan jumlah rumah tangga memiliki status kesejahteraan (Desil) 1 s/d 4 relatif rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 4.

Dengan melakukan analisa perbandingan antar indikator tersebut, dihasilkan kuadran prioritas wilayah sebagai berikut:

Gambar 5.83 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Perlindungan Sosial



Sumber: P3KE, Kemenko PMK

Dari hasil analisa perbandingan jumlah penderita disabilitas dengan jumlah keluarga (Desil) 1 s/d 4 diatas, dapat diklasifikasikan prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan bidang perlindungan sosial, yaitu: Prioritas 1 (tidak ada), Prioritas 2 (Kecamatan Penanggalan dan Kecamatan Longkib), Prioritas 3 (Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Rundeng) dan Prioritas 4 (Kecamatan Sultan Daulat).

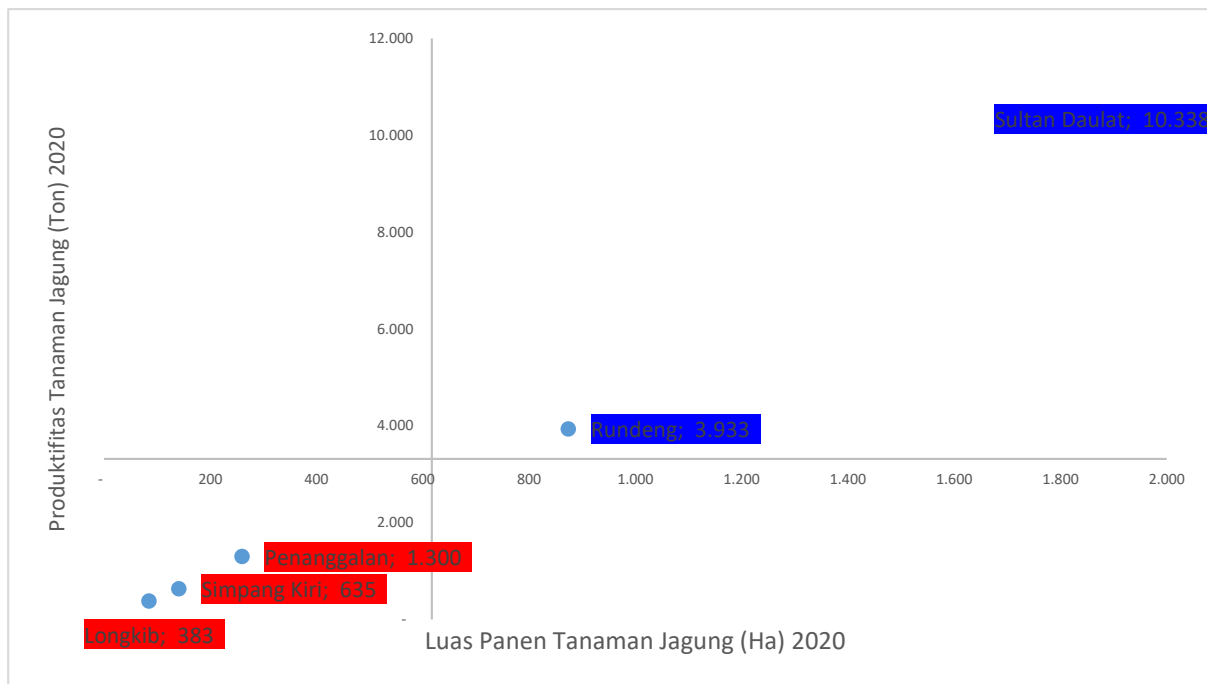
5.7. Prioritas Wilayah Bidang Ketahanan Pangan

Dalam menentukan lokasi yang menjadi prioritas dalam penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan, dilakukan perbandingan yaitu produktivitas tanaman jagung dengan luas panen tanaman jagung. Dengan melakukan perbandingan tersebut, kita akan memperoleh Kecamatan mana yang menjadi prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3 dan prioritas 4.

Kecamatan dengan produktivitas tanaman jagung rendah (dari rata-rata) dan luas panen tanaman jagung rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 1. Kecamatan dengan produktivitas tanaman jagung rendah (dari rata-rata) dan luas panen tanaman jagung relatif tinggi (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 2. Kecamatan dengan produktivitas tanaman jagung relatif tinggi (dari rata-rata) dan luas panen tanaman jagung rendah (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 3. Kecamatan dengan produktivitas tanaman jagung tinggi (dari rata-rata) dan luas panen tanaman jagung tinggi (dari rata-rata), akan menjadi prioritas 4.

Dengan melakukan analisa perbandingan antar indikator tersebut, dihasilkan kuadran prioritas wilayah sebagai berikut:

Gambar 5.84 Pengelompokan Prioritas Wilayah (Kecamatan) Bidang Ketahanan Pangan



Sumber: P3KE, Kemenko PMK

Dari hasil analisa perbandingan yaitu produktivitas tanaman jagung dengan luas panen tanaman jagung, dapat diklasifikasikan prioritas wilayah dalam penanggulangan kemiskinan bidang ketahanan pangan, yaitu: Prioritas 1 (Kecamatan Longkib, Simpang Kiri dan Penanggalan), Prioritas 2 (tidak ada), Prioritas 3 (tidak ada) dan Prioritas 4 (Kecamatan Rundeng dan Kecamatan Sultan Daulat).

5.8. Data Spasial

Dalam melengkapi dasar perencanaan penanggulangan kemiskinan, dibutuhkan data-data terperinci dari suatu permasalahan atau indikator yang berkaitan langsung dengan kemiskinan. Dalam sub bab ini, akan disajikan data spasial yang bersumber dari data **Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE)** Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Berikut ini data spasial yang akan menggambarkan kondisi kemiskinan di Kota Subulussalam dari berbagai indikator:

Tabel 5.44 Data Spasial Kemiskinan Kota Subulussalam Tahun 2021

Indikator		Simpang Kiri	Penanggalan	Rundeng	Sultan Daulat	Longkib	Kota Subulussalam
Status Kesejahteraan	Keluarga Desil 1	1.108	406	623	448	184	2.769
	Keluarga Desil 2	626	332	432	361	149	1.900

Indikator		Simpang Kiri	Penanggalan	Rundeng	Sultan Daulat	Longkib	Kota Subulussalam
	Keluarga Desil 3	764	413	482	514	217	2.390
	Keluarga Desil 4	715	384	434	524	230	2.287
	Individu Desil 1	6.499	2.373	3.993	2.624	1.108	16.597
	Individu Desil 2	3.075	1.711	2.260	1.778	771	9.595
	Individu Desil 3	3.465	1.946	2.193	2.415	926	10.945
	Individu Desil 4	3.004	1.753	1.589	2.211	866	9.423
Klasifikasi Usia	Usia < 6 tahun	1.627	815	1.134	997	416	4.989
	Usia 6-14 tahun	3.721	1.931	2.325	2.137	868	10.982
	Usia 15-44 tahun	8.411	4.038	5.243	4.751	1.936	24.379
	Usia 45-59 tahun	1.846	838	1.051	907	356	4.998
	Usia ≥ 60 tahun	438	161	282	236	95	1.212
Individu Lansia	Usia 60-69 tahun	316	114	205	174	69	878
	Usia 70-79 tahun	89	33	53	44	22	241
	Usia ≥ 80 tahun	33	14	24	18	4	93
Usia Sekolah yang Bersekolah	Usia 7-12 tahun	1.657	881	1.122	983	415	5.058
	Usia 13-15 tahun	1.157	627	799	668	277	3.528
	Usia 16-18 tahun	1.137	561	829	669	286	3.482
Usia Sekolah yang Tidak Bersekolah	Usia 7-12 tahun	852	398	437	461	162	2.310
	Usia 13-15 tahun	71	26	11	20	6	134
	Usia 16-18 tahun	66	20	8	26	1	121
Pendidikan Terakhir	SD/ MI/ Sederajat	2.598	1.364	1.797	1.545	665	7.969
	SMP/ MTs/ Sederajat	1.250	626	854	735	313	3.778
	SMA/ MA/ Sederajat	1.160	598	825	635	217	3.435

Indikator		Simpang Kiri	Penanggalan	Rundeng	Sultan Daulat	Longkib	Kota Subulussalam
	Perguruan Tinggi	72	34	63	47	21	237
Fasilitas Buang Air Besar	Dengan Septik Tank	2.839	1.344	1.488	1.459	494	7.624
	Tanpa Septik Tank	186	114	102	91	77	570
	Jamban Umum/ Bersama	150	28	362	264	160	964
	Lainnya	38	49	19	33	49	188
Status Individu Bekerja	Usia 5-14 tahun	29	19	12	13	1	74
	Usia 15-59 tahun	3.974	2.359	2.968	3.332	1.046	13.679
	Usia ≥ 60 tahun	280	118	209	193	69	869
Status Individu Tidak Bekerja	Usia 5-14 tahun	4.069	2.102	2.585	2.370	981	12.107
	Usia 15-59 tahun	6.283	2.517	3.326	2.326	1.246	15.698
	Usia ≥ 60 tahun	158	43	73	43	26	343
Pekerjaan Kepala Rumah Tangga	Tidak Bekerja	238	82	94	54	27	495
	Petani	1.401	779	978	955	594	4.707
	Nelayan	10	6	39	12	2	69
	Pedagang	163	43	77	60	7	350
	Pegawai Swasta	54	66	31	24	9	184
	Wiraswasta	948	350	152	262	89	1.801
	Pensiunan	10	2	17	3	1	33
	Pekerja Lepas	317	174	550	464	43	1.548
	Lainnya	72	33	33	13	8	159
Pekerjaan Individu	Tidak Bekerja	11.760	5.287	6.846	5.490	2.555	31.938

Indikator		Simpang Kiri	Penanggalan	Rundeng	Sultan Daulat	Longkib	Kota Subulussalam
	Petani	1.925	1.170	1.589	1.414	807	6.905
	Nelayan	11	7	43	19	2	82
	Pedagang	307	112	159	136	21	735
	Pegawai Swasta	138	138	85	50	19	430
	Wiraswasta	1.183	517	230	337	130	2.397
	Pensiunan	13	3	17	3	1	37
	Pekerja Lepas	584	498	1.022	1.554	123	3.781
	Lainnya	122	51	44	25	13	255
Kepemilikan Tempat Tinggal	Milik Sendiri	2.444	1.153	1.673	1.517	607	7.394
	Sewa/ Kontrak	404	147	22	64	25	662
	Bebas Sewa	71	60	54	77	22	284
	Lainnya	294	175	222	189	126	1.006
Sumber Air Minum	Air Kemasan / Isi Ulang	182	18	84	216	14	514
	Leding / PAM	2	369	5	127	5	508
	Sumber Terlindung	2.669	838	1.161	1.253	503	6.424
	Sumber Tidak Terlindung	333	265	720	246	257	1.821
	Lainnya	27	45	1	5	1	79
Penerangan	Listrik PLN	3.022	1.469	1.865	1.713	550	8.619
	Listrik Non PLN	186	54	88	127	224	679
	Bukan Listrik	5	12	18	7	6	48
Bahan Bakar Memasak	Listrik/Gas	2.988	1.471	1.624	1.734	731	8.548
	Minyak Tanah	4	1	6	3	-	14

Indikator		Simpang Kiri	Penanggalan	Rundeng	Sultan Daulat	Longkib	Kota Subulussalam
	Arang Kayu	217	63	337	108	49	774
	Lainnya	4	-	4	2	-	10

Sumber: P3KE, Kemenko PMK

BAB VI PENUTUP

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multi dimensi, terjadi tidak hanya disebabkan oleh faktor tunggal, dan juga tidak terjadi secara linier. Sebaliknya, kemiskinan bersifat majemuk dan disebabkan oleh multi faktor yang saling terkait satu dengan yang lain. Secara prinsip ada berbagai faktor penyebab kemiskinan, diantaranya adalah faktor struktural, faktor kultural, dan sumber daya alam yang terbatas. Sehingga dalam penanganan dan penanggulangannya pun memerlukan langkah-langkah dengan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh.

Penanganan dan penanggulangan kemiskinan harus ditujukan untuk mengurangi pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Salah satu upaya penanganan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Subulussalam ialah melalui penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) 2019 -2024 ini.

Sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan Dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) disusun sebagai penjabaran dari strategi dan program penanggulangan kemiskinan. Dengan demikian, kehadiran dokumen RPKD ini harus mampu mewarnai dan menjadi energi positif sehingga memperkuat setiap proses perencanaan dan pengambilan kebijakan yang dilakukan untuk perbaikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Subulussalam.



KOTA SUBULUSSALAM

BISA

RPKD

**RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM 2023-2026**

<http://bappeda.subulussalamkota.go.id>